

SEJARAH KERAJAAN ARAB SAUDI

Gian Faiq Al Ahnaf, Ade Ayu Sulistiani, Muhammad Fu'ad Muhtadi,
Fariz Ardani, Nolla Alfa Ramadhani, Latifah Ainun Hardini,
Ismi Romadona, Syofi Latifah, Maryam Agusti, Chimayah Abadiyah



SEJARAH KERAJAAN Arab Saudi

*Gian Faiq Al Ahnaf, Ade Ayu Sulistiani, Muhammad Fu'ad Muhtadi,
Farij Ardani, Nolla Alifa Ramadhani, Latifah Ainun Hardini,
Ismi Romadona, Syofi Latifah, Maryam Agusti, Chimayah Abadiyah*

SEJARAH KERAJAAN Arab Saudi

Editor:

Rahmat Purwanto

Tata Letak:

Dwi Yuliari

Desain Sampul:

Haris Dwi Prasetyo

Penerbit dan Pencetak:

Satria Publisher

Anggota IKAPI No. 232/JTE/2021

Jalan Raya Tinggarjaya RT 01/09 Jatilawang,

Banyumas, Jawa Tengah HP: 085867822579

ISBN:

978-623-412-786-7

188 Halaman, 14, 8 x 21 cm

Terbitan Pertama

Cetakan Pertama

2024

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga penulisan buku yang berjudul “Sejarah Kerajaan Arab Saudi” telah selesai sebagaimana yang diharapkan.

Shalawat beriring salam kepada baginda.Rasulullah saw. yang telah membawa risalah yang begituagung al-Qur’ān al-karīm, sebagai petunjuk dalammengarungi kehidupan yang fana ini.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa, khususnya mahasiswa dalam mempelajari Sejarah. Dengan menjadikan buku ini sebagai sumber bacaan dan referensi sehingga banyak melahirkan pakar-pakar sejarah. Dan pada umumnya, juga diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat Muslim di Indonesia.

Buku ini mengulas mengenai proses terbentuknya kerajaan Arab Saudi sampai dengan visi misinya di 2030. Setelah mempelajari pokok-pokok bahasan dalam buku ini diharapkan pembaca mampu memahami sejarah kerajaan arab saudi.

Penulis, mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, terutama kepada kedua orang tua, yang telah banyak memberikan pengorbanan, baik moral maupun material, sehingga penulis bisa seperti saat ini, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Fahri Hidayat yang telah membimbing penulis dalam penyusunan bukuini.

Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu tegur sapa dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi kesempurnaan. Akhirnya semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, hidayah, dan lindungan-Nya. Aaamiiin...ya robbal ‘alamin.

Purwokerto, 14 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PEMBENTUKAN KERAJAAN ARAB SAUDI1

Gerakan Wahabi dan Perang dengan TurkiUsmani

<i>Gian Faiq Al Ahnaf</i>	2
---------------------------------	---

Asal Usul Dinasti Saud

<i>Ade Ayu Sulistiani</i>	19
---------------------------------	----

Abdul Aziz Bin Saud : Penyatuan Jazirah Arab

<i>Muhammad Fu'ad Muhtadi</i>	34
-------------------------------------	----

Proklamasi Kerajaan Arab Saudi (1932)

<i>Farij Ardani</i>	58
---------------------------	----

BAB II ARAB SAUDI DAN ISU-ISU DUNIA ISLAM78

Peran Arab Saudi dalam Oki

<i>Syofi Latifah</i>	79
----------------------------	----

Arab Saudi dan Gerakan Salafi Global

<i>Nolla Alifa Ramadhani</i>	91
------------------------------------	----

Peran Ulama dan Lembaga Fatwa di Saudi

<i>Chimayah Abadiyah</i>	112
--------------------------------	-----

Perkembangan Pendidikan di Saudi

<i>Maryam Agusti</i>	131
----------------------------	-----

BAB III ARAB SAUDI DAN TANTANGAN GLOBAL150

Hubungan Arab Saudi dengan Iran

<i>Latifah Ainun Hardini</i>	151
------------------------------------	-----

Arab Saudi dan Visi 2030

<i>Ismi Romadona</i>	166
----------------------------	-----

BIONARASI PENULIS175

BAB I
PEMBENTUKAN KERAJAAN ARAB SAUDI

Penyusun :

Gian Faiq Al Ahnaf

Ade Ayu Sulistiani

Muhammad Fu'ad Muhtadi

Farij Ardani

Gerakan Wahabi dan Perang dengan TurkiUsmani

Oleh : Gian Faiq Al Ahnaf

Sekilas tentang Wahabi

Wahabi merupakan sebuah aliran dalam Islam yang memiliki karakteristik “keras” dan bersifat tekstual, puritan, yang identik pula dengan jargonnya yaitu kembali ke Al Qur'an dan Hadis. Wahabi menyerukan penafsiran yang ketat terhadap Al-Qur'an dan sunnah untuk menghentikan apa yang dia anggap sebagai inovasi yang melanggar hukum yang mengancam doktrin absolut keesaan Tuhan.¹ Aliran ini kerap menimbulkan berbagai macam kontroversi di tengah masyarakat karena pemahaman yang mereka pegang bertentangan dengan moderasi beragama dan beberapa kali ditemui mereka menyalahkan ritual ibadah maupun konsep keagamaan dari aliran lain. Namun, kini Wahabi telah beralih cara dalam menjaga eksistensinya. Mereka memilih jalan-jalan yang diplomatis yang tentu tujuannya agar lebih mudah diterima oleh khayalak umum. Tak heran hingga saat ini Wahabi terus berkembang pesat di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, walaupun hakikatnya masih tergolong minoritas. Bahkan berbagai golongan yang serupa atau bahkan sebenarnya sama dengan wahabi ini semakin meluas dimana-mana, banyak ditemui orang-orang yang mudah sekali menyalahkan praktik ibadah orang lain yang sebenarnya mereka punya landasan

¹ Sami Jiriyis Sweis, “Hashimite depictions of Wahhabi Islam as a rhetorical front in the late Ottoman period,” *Cogent Arts and Humanities*, 11.1 (2024)
<<https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2391642>>.

tersendiri dalam pelaksanaannya. Namun, memang perlu untuk menciptakan pemikiran terbuka supaya dapat memahami perbedaan dalam agama yang berasal dari satu sumber atau rujukan.²

Salah satu amalan yang ditentang kaum Wahhabi adalah peringatan hari lahir (maulid) Nabi Muhammad SAW. Padahal, di dalam maulid nabi berisikan berbagai kegiatan yang positif dan terdapat dalil secara umum di dalam Al-Qur'an. Maulid nabi biasanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kemudian setelahnya dilanjutkan dengan shalawat bersama ataupun kajian mengenai kisah nabi semasa di dunia, mulai dari kecil hingga diutus menjadi nabi dst. Dengan maulid ini tentu akan meningkatkan pengetahuan muslim mengenai sejarah nabi, dengan begitu akan menumbuhkan rasa cinta pada baginda nabi. Namun, acara semacam ini ditentang oleh mereka dengan alasan maulid nabi ini tidak dilakukan dan tidak diperintahkan oleh nabi. Padahal seperti yang disinggung sebelumnya, dalam Al-Qur'an jelas-jelas ada perintah untuk membaca Al-Qur'an, mencari ilmu, dsb. Yang mana hal tersebut tercakup dalam kegiatan maulid nabi. Disamping itu, dalam kegiatan maulid nabi terdapat kegiatan positif lainnya seperti silaturahmi dan sedekah. Karena dalam kegiatan maulid nabi, antar sesama muslim akan bertemu di sebuah tempat dan disana mereka akan saling menyapa dan berinteraksi antar satu dengan yang lain. Kemudian terdapat nilai sedekah karena dalam penyelenggaraannya sering kali terdapat konsumsi untuk hadirin. Selain

² Unggul Purnomo Aji dan Kerwanto, "Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangannya," *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2023), 45–61 <<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>>.

menyinggung larangan maulid, Wahabi juga tidak menggunakan kata “sayyidina”, sampai-sampai misalnya beliau menyebut ayah Rasulullah masuk neraka. Hal ini membuat masyarakat geram terhadap Wahhabisme. Tokoh Wahabi memperkenalkan konsep tauhid al-Usul al-Tsalatsah (rububiyah, uluhiyah, asma wa al-sifat) yang mengacu pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaum Wahabi mulai menganjurkan hal-hal yang dianggap sunnah Nabi, seperti janggut, abaya, jalabiya, celana non-isbal.³

Ditinjau dari pemikirannya, Wahabi cenderung mengikuti jejak dari karya maupun ide Ibnu Taimiyah

dengan semangat pembaharuan untuk mengembalikan akidah yang murni. Sedangkan, dari sisi metodologisnya, aliran ini sering kali ditemukan kesalahan seperti halnya menganggap perkara yang bersifat *furu'* dalam agama

menjadi *ushul*. Seperti yang sudah disinggung diatas mereka mudah membid'akan aliran lain, bahkan sampai menghukumi kafir pada hal-hal yang bertentangan dengan mereka yang sebenarnya masih pada wilayah *khilfiyah* atau terdapat perbedaan pandangan antar ulama.⁴ Hal ini

perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi perpecahan diantara umat Islam yang disebabkan sebuah perbedaan dengan berlandaskan dalilnya masing-masing.

Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwa'ir mengemukakan pendapat yang menarik mengenai

³ Muhammad Ridha Basri, “The Dilemma of Muhammadiyah in Aceh Amidst the Religious Contestation between Wahhabi and Aswaja: A Historical Parallelism,” *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 7.1 (2024), 17–42

<<https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>>.

⁴ Unggul Purnomo Aji dan Kerwanto.

penamaan Wahabi ini. Beliau menyatakan bahwa asal muasal nama wahib merupakan dari sebuah gerakan khawarij Ibadiyah yang terletak di Afrika Utara tepatnya pada abad kedua hijriyah yang sangkutkan kepada tokoh utama Wahabi yakni Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Wahabi memiliki pemimpin lain yang bernama Abdullah bin Wahb Ar-Rasiby, ia merupakan ketua dari Kelompok Wahabi Rustumiyah yang dikenal juga dengan Wahbiyah(bukan Wahabi). Kemudian terdapat beberapa kalangan yang tidak sepemahaman dengan dakwah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab hingga kemudian menamai pengikutnya dengan sebutan Wahabi. Selanjutnya, penyesatan terhadap Wahabi Rustumiyah kerap dilakukan oleh para penentang Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mencari fatwa yang dapat digunakan untuk menyesatkan Wahabi Rustumiyah yang pada akhirnya akan mereka sematkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Aan tetapi, fatwa-fatwa yang telah dituliskan mereka dengan tujuan menyesatkan tadi ternyata ditulis jauh dari kelahiran tokoh Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab.⁵

Tokoh Wahabi

Istilah Wahabi sangat berkaitan erat dengan tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al-Najdi⁶ yang dilahirkan di desa Uyainah, 70 km dari ibu kota Arab Saudi saat ini yaitu Riyadh.

⁵ Khairil Miswar, “Wahhābi dalam Perspektif HUDA dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2.1 (2020), 1–27
<<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.57>>.

⁶ Sweis.

Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 H yang bertepatan dengan 1703 M. Muhammad bin Abdul Wahab mulai menghafal Al-Qur'an sejak kecil dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana tradisi pada negara Islam pada saatnya. Beliau juga terlahir dari keluarga yang terpelajar, dimana ayahnya merupakan tokoh agama, ahli hukum sekaligus *qadi* yang bermadzhab Hanbali. Tidak hanya itu, saudaranya juga merupakan seorang mufti di daerah Najd. Selain menghafal Al-Qur'an Muhammad bin Abdul Wahab juga mempelajari berbagai fan ilmu seperti bahasa Arab, fikih madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu tafsir, dan hadis dengan ayahnya sendiri. Kemudian beliau belajar kepada beberapa guru yang lain diantaranya seperti Abdurrahman bin Ahmad Hasan at-Tamimi yang merupakan seorang ulama Najd.⁷

Muhammad bin Abdul Wahab mengunjungi negara Hijaz pada tahun 1127 H guna melaksanakan ibadah haji dan juga untuk berkumpul dengan para ulama. Ketika sedang dalam perjalanan menuju Makkah, beliau kerap menemukan praktik ibadah yang dianggap tidak ada dasarnya dalam syariat Agama Islam. Setelah, menunaikan ibadah Haji, beliau beranjak menuju Madinah. Disana merupakan tempat terbentuknya karakter dari Muhammad bin Abdul Wahab menganut madzhab Hanbali dan menganut pada *salafu as-salih* sehingga beliau begitu “murni” dalam beragama.⁸

⁷ Abdul Majid et al., “Salafi, Hadith, and Islamic Law: Identity Politics and Wahabi Movement in East Kalimantan,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23.1 (2023), 147–70
<<https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32139>>.

⁸ Majid et al.

Setelahnya, pada tahun 1136 H yang bertepatan dengan 1723 M Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyanah guna belajar dengan ayahnya sendiri dan para ulama. Beliau dikenal sebagai pribadi yang rajin, tekun, dan sabar dalam menimba ilmu. Beliau gemar membaca karangan dari Ibnu Taimiyah dan menjadikannya sebagai motivasi dalam menghilangkan segala perbuatan bid'ah dan juga munkar. Mereka memegang prinsip untuk mengembalikan ajaran Islam pada Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi yang menyimpang dari ajaran mereka ini adalah pemahaman tekstualis yang kerap digunakan dalam memahami Al-Qur'an maupun hadis. Pemahaman tekstual ini tentu sangat berbahaya bagi umat Islam karena tidak mengkaji berbagai runtutan sejarah maupun hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an maupun hadis dengan kompleks.⁹

Muhammad bin Abdul Wahab kembali berdakwah sampai Dariyah usai belajar bersama ayahnya. Pemimpin Dariyah saat itu, yakni Muhammad bin Su'ud turut mendukung dakwah yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab merasa sangat terbantu akan hal itu, karena dengannya beliau menemukan kekuatan yang dapat mendorong perkembangan dakwahnya. Hingga pada akhirnya dakwah beliau tidak hanya di Arab saja, melainkan juga sampai negara luar Arab. Beliau senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utamanya. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, senada dengan misi para tokoh Salafi, mereka berpegang pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

⁹ Majid et al.

- 1) Mengembalikan ilmu-ilmu Islam;
- 2) Menegakan ketauhidan yang murni dan menghilangkan hal-hal musyrik;
- 3) Menjalankan Sunnah dalam kehidupan dan memberantas bid'ah;
- 4) Mensucikan khazanah ilmu Islam;
- 5) Menyebarkan ajaran Islam yang benar;
- 6) Memajukan kebaikan dan mencegah keburukan;
- 7) Menegakkan kekuasaan Allah dalam pemerintahan dan masyarakat;
- 8) Membuka pintu ijtihad untuk menjawab permasalahan kontemporer umat Islam;
- 9) Membela agama Allah dan umat Islam.¹⁰

Ditinjau dari prinsip-prinsip yang tertera diatas, sebenarnya terlihat begitu lurus prinsip yang digunakan, namun yang disayangkan adalah implmentasi dari berbagai prinsip di atas sering kali menjadi kontroversi dan perdebatan dikarenakan pemahaman yang digunakan adalah tektualis.

Pergerakan Wahabi

Wahabi merupakan gerakan keagamaan Islam pertama yang secara struktural didefinisikan sebagai anti-Sufi dan, karena sifatnya yang puritan dan aktivis.¹¹ Wahabi juga merupakan sebuah aliran pemahaman di

¹⁰ Faizin Faizin dan Afridawati Afridawati, "The Salafi Da'wah Movement and its Implications on Religious Rituals in Kota Sungai Penuh," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 5.1 (2023), 133–44 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i1.246>>.

¹¹ Francesco Alfonso Leccese, "Three cases of critical engagement of Sufis with modern Islamic trends," *Kervan*, 28.1 (2024), 243–56 <<https://doi.org/10.13135/1825-263X/9944>>.

dalam Islam yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab melalui proses yang dimana beliau kerap menemukan berbagai macam praktik ibadah dalam Islam yang sudah menyeleweng dari syariat agama Islam yang sebenarnya baik itu berupa adat masyarakat ataupun kepercayaan secara umum. Hakekatnya merupakan gerakan yang mengarah pada pemurnian Islam yang merupakan semangat utama gerakan daripada ini. Wahabi mengacu pada akidah al-salaf al-salih dalam dakwah pemurnian Islamnya. Al-salaf merupakan para sahabat Nabi SAW, atau yang biasa diketahui masyarakat sebagai orang-orang yang hidup di zaman nabi kemudian pernah bertemu nabi dan mengimaninya. kemudian tabi'in atau orang-orang setelah masa sahabat nabi, kemudian tabi al-tabi'in yaitu murid nabi setelah zaman tabi'in. Wahabi juga mengacu pada para imam madzhab karena mereka hidup di tiga abad pertama setelah nabi wafat. Penggunaan *as-salih* dalam konteks ini digunakan sebagai pembeda antara pendahulu kita yang biasa disebut dengan *khalaf*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Muhammad bin Abdul Wahab kesamaan yang kuat dengan Ibnu Taymiyah, karena pada dasarnya beliau mengikuti Ibnu Taymiyah terutama sebagai dasar pemurnian agama Islam yang disebutnya dan tak luput juga dari para imam madzhab Hanbali sebagai panutan Muhammad bin Abdul Wahab.¹²

Asal usul Salafi-Wahhabi (Wahhâbiyah) dapat ditelusuri kembali ke gerakan keagamaan abad ke-18 di Jazirah Arab. Istilah ini umumnya melekat pada

¹² Hesti Andriani, Hasaruddin, dan Susmihara, "Wahabisme: Al-Harakah Al-Tandhifiyah Al-Islamiyyah," *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3.2 (2021), 116–25.

komunitas atau gerakan keagamaan yang dipelopori oleh ulama Najd, Arab Saudi, Muhammad bin Abdul Wahhab—walaupun komunitas atau gerakan keagamaan tersebut lebih suka menyebut dirinya al-Muwahhidûnor ahl al-tawhîd (monoteis). Bahkan ada di antara mereka yang lebih suka menyebut dirinya Salafiyah. Secara historis, Madawi al-Rasheed dan juga Sa'id Ramadhan al-Buthi mengatakan bahwa istilah salafi sebenarnya merupakan istilah modern yang baru muncul pada akhir abad ke-19, terutama dikaitkan dengan pembaharuan Islam. pergerakan Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani di Mesir. Permasalahannya adalah bagaimana kaum Wahhabi yang muncul pada abad ke-18, kemudian menyebut dirinya salafiyah, istilah yang sendiri muncul pada akhir abad ke-19. Menurut al-Buthi, salafiyah merupakan seruan simbolis dari gerakan pembaharuan Islam. Menurutnya, suatu gerakan pembaharuan selalu membutuhkan simbol-simbol tertentu yang dapat menjadi daya tarik dan perhatian umat. Dalam konteks ini, salafiyah dimunculkan sebagai daya tarik simbolis. Bagi mereka, salafiyah merupakan simbol gerakan pemurnian agama dan mengembalikan umat Islam pada pemahaman Islam yang benar, mengikuti jejak salaf al-shâlih. Sehingga meninggalkan segala bentuk bid'ah, kecurigaan dan berbagai bentuk penyimpangan.¹³

Menurut kelompok Wahhabi, apa yang dilakukan umat Islam selama ini adalah kesesatan karena tidak pernah ada teladan dari Nabi dan juga tidak diperintahkan

¹³ Hendar Riyadi, Cecep Taufikurrohman, dan Imas Masturoh, "A Comparative Analysis of the Muhammadiyah and Salafi-Wahhabi Da'wah Movement," *Millatî, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9.1 (2024) <<https://doi.org/10.18326/mlt.v9i1.1945>>.

oleh Nabi. Oleh karena itu, kaum Wahhabi mengkritik dan menolak ritual keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam yang tidak memiliki landasan normatif. Kelompok ini menganggap praktik yang dilakukan oleh umumnya pengikut madzhab Syafi'i adalah sesat dan sesat karena tidak mempunyai dasar hukum baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Artinya, amalan apapun yang tidak pernah dicontohkan dan tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi maka akan tertolak dan sesat.¹⁴ Padahal, sebenarnya mengenai pembahasan bid'ah ini sangat panjang kaitannya, tidak berhenti pada hal-hal yang tidak dilakukan ataupun diperintahkan oleh nabi. Melainkan merupakan perkara baru yang menyalahi dengan syariat agama Islam. Jadi selama hal-hal baru tersebut tidak menyalahi dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas maka tentu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sesat. Contoh hal yang bisa dikatakan sesat dalam hal ini misalnya menambah jumlah raka'at dalam salat subuh menjadi 4 raka'at dengan sengaja dsb.

Kemudian dalam hal-hal dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahab memberantas berbagai praktik yang dianggapnya sebagai syirik, bid'ah, dan juga paganisme yang ada. Paganisme merupakan kepercayaan yang meyakini adanya banyak tuhan, kepercayaan terhadap patung, dan kemusyrikan-kemusyrikan yang lain. Namun, dalam pelaksanaan dakwahnya ini Muhammad bin Abdul Wahab terkesan kaku dan keras dalam menghukuminya, yang digunakan merupakan

¹⁴ Rudik Noor Rohmad, A Husein Ritonga, dan S Sagap Al-munawwar, "Bid'ah and Its Implementaton on Wahhabi's Concept," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 3.1 (2024), 1–9.

pemahaman yang berdasar pada tekstualis. Sehingga tentu sangat rawan terjerumus pada pemahaman yang bukan sebenarnya.¹⁵

Selain hal-hal diatas, Kerancuan Wahabi dapat dilihat dari cara mereka dalam menyifati wujud Allah dengan *tajsim*. Tajsim merupakan sebuah konsep teologis yang meyakini bahwasannya Allah bersifat dengan hal-hal seperti kepala, perut, kaki, tangan, dan atribut fisik lainnya yang ada pada makhluk hidup.¹⁶ Padahal sudah sangat jelas bahwasannya Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak ada keserupaan sama sekali dalam dzat, sifat, maupun perbuatan Allah dengan makhluknya. Masyhuri menyatakan bahwa Wahabi tidak hanya merupakan aliran keagamaan atau semacamnya. Namun, Wahabi juga merupakan gerakan politik keagamaan seiring berjalannya waktu. Menurut Amstrong Muhammad bin Abdul Wahhab telah melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi dalam menggapai ajaran-ajaran yang didakwahkan oleh mereka dengan tema mengembalikan Arab Saudi pada ajaran yang sebenarnya. Mulanya, mereka menggencarkan gerakan pemurnian di daerah Diriyah dan Riyadh, kemudian seiring berjalannya waktu dakwah mereka meluas ke Nejd. Mereka melakukan penghancuran pada berhala yang ada serta melarang orang-orang untuk merokok maupun meminum khamr. Dalam gerakan ini yang berlangsung dalam kurunwaktu 60 tahun, mereka berhasil dalam memberlakukan hukum

¹⁵ Andriani, Hasaruddin, dan Susmihara.

¹⁶ Ahmad Abdul Kadir, "Resistensi Warga Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabi Takfiri," *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 3.1 (2020).

rajm di wilayah kekuasaannya. Wahabi juga berhasil dalam menguasai seluruh wilayah Arab Saudi. Dengan bantuan pemimpin Saud, Wahabi dapat meluas hingga ke luar Nejd, bahkan sampai Teluk Parsi hingga dua kota suci yakni Makkah dan Madinah. Kemudian Wahabi juga menguasai Lautan di India hingga sampai pegunungan Libanon di Suriah. Amstrong menyatakan bahwa pada saat itu, Wahabi telah menjadi penguasa padang pasir dan berani menolak kekuasaan Rurki Utsmani yang terletak di Istanbul. Mereka melakukan peperangan ke Mesopotamia dan Karbala pu ikut dihancurkannya sehingga memicu konflik pada pihak Turki Utsmani¹⁷

Perang dengan Turki Usmani

H.A.R. Gibb menyatakan bahwa pada tahun 1818 kekuasaan Wahhabi runtuh, Darji'ah diluluhlantahkan serta Keluarga Saudi yang memegang pemerintahan dikirim ke Istanbul untuk dihukum. Pada saat yang sama Muhammad Ali berupaya dalam mengembangkan kekuasaannya yaitu dengan melakukan beberapa upaya menggunakan kekuatan militernya untuk mengirim pasukan guna menaklukkan wilayah di luar Mesir. Muhammad Ali Pasha mengirim pasukannya ke Jazirah Arab pada tahun 1811 M untuk melawan gerakan Wahabi yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Ottoman. Pada masa pemerintahannya, Muhammad Ali beberapa kali mengirimkan pasukan untuk menaklukkan wilayah di luar Mesir. Pada tahun 1811 M, Muhammad Ali pertama kali mengirimkan pasukan ke Arab Saudi untuk melawan gerakan Wahhabi. Penyerangan tersebut

¹⁷ Miswar.

dilakukan karena adanya kekhawatiran atas tindakan tersebut yang dinilai dapat mengancam kedaulatan Turki Utsmaniyah sebagai penjaga kota suci Mekkah dan Madinah. Pada tahun 1820 M, pasukan Muhammad Ali yang dipimpin oleh putranya Tusun mampu berkembang pesat dan menguasai wilayah barat dan Sudan.¹⁸

Kebangkitan gerakan Wahabi yang beraliansi dengan keluarga Arab Saudi, Jazirah Arab, khususnya kawasan Hijaz, menjadi ajang perebutan pengaruh melibatkan berbagai macam pihak. Menanggapi hal itu, penguasa Turki Usmani bereaksi. Sultan memerintahkan gubernur Mesir yakni Muhammad Ali Pasha, untuk menghadapi kaum Wahabi. Pada tahun 1818, putra Muhammad Ali Pasha, Muhammad Ibrahim Pasha, menaklukkan Dariyah, yang saat itu menjadi pusat gerakan Wahhabi dan juga berhasil menduduki Hijaz. Bangsa Turki kemudian dibawa ke Hijaz untuk mengamankan kepentingan politik kerajaan Turki Usmani. Sementara itu, Turki Usmani di Najd mendukung penguasa lokal yaitu Rashidiya yang merupakan musuh Saudi. Namun kemudian gubernur Mesir, Muhammad Ali Pasha, merasa lebih baik dan siap menghadapi Sultan Turki Usmani di Istanbul. Ketika Perang Dunia I mulai berkecamuk, banyak pemimpin Arab mulai mempertanyakan masa depan negara mereka di bawah kekuasaan Turki.¹⁹

¹⁸ Samsul Ahmad, "Peranan Muhammad Ali Pasha dalam Pengembangan Islam di Mesir," *UIN Alauddin Makassar*, 2018.

¹⁹ Rabi'atul Adawiyah Abdullah, Abu Hanifah Haris, dan Zulkanain Abdul Rahman, "Perkembangan Gerakan Pembebasan Hijaz dan Anti Ibn Saud, 1920-an Hingga 1930-an (Development of the Hijaz

Pada tahun 1916 M, Mesir membujuk Syarif Mekah, kepala keluarga Arab yang memerintah Tanah Suci sebagai wakil Sultan, untuk bergabung dengan Inggris . Perang melawan Turki Usmani di Hijaz menjanjikan kemerdekaan Arab. Syarif Mekah, yang kemudian dikenal sebagai Raja Hussein, menyambut baik undangan tersebut dan memutuskan untuk mendirikan negara Arab bersatu di Asia dengan Mekah sebagai pusatnya. Raja Hussein bin Ali (1853–1931) adalah Syarif Mekah dan keturunan dari keluarga Bani Hasyim, yang memerintah Mekah, Madinah, dan Hijaz dari tahun 1908 hingga 1916. Raja Hussein adalah pionir pemberontakan Arab tahun 1916 melawan pemerintah Turki Ottoman. Selama Perang Dunia I, pemerintah Ottoman memihak Blok Sentral melawan Sekutu, sehingga Raja Hussein dapat mengambil kesempatan untuk membebaskan wilayah Arab dari pemerintah Ottoman.²⁰

Pada tahun 1918 Faisal diurtus oleh ayahnya untuk memimpin Suriah. Ia berhasil mendirikan sebuah pemerintahan di Damaskus. Disamping itu, Abdullah yang juga merupakan saudara Faisal juga diurtus untuk ke Irak. Namun, pada tahun 1920 M cita-cita dari negara Arab memulai memudar, yakni setelah Arab membagi wilayahnya di Asia kepada Inggris dan Perancis. Jika sebelumnya Hussein dianggap sebagai raja di Arab, setelahnya ia hanya diakui sebagai penguasa daerah Hijaz. Pada saat yang bersamaan terjadi pemberontakan dari Arab pada Turki yang menyebabkan kemunduran dari dukungan raja yang ada di Melayu. Pemberontakan yang

Liberation Movement and Anti Ibn Saud, 1920s to 1930s),” *Journal of Al-Tamaddun*, 13.1 (2023), 104–16.

²⁰ Abdullah, Haris, dan Rahman.

dilakukan itu berakhir dengan mundurnya raja Hussein dan pada akhirnya ia menyelamatkan dirinya menuju Amman, Yordania, ‘Abd al-Aziz.²¹

Saud kemudian mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai raja Hijaz dan Najd, menjadikannya raja yang sebenarnya menguasai sebagian besar Jazirah Arab. Ini merupakan tonggak pertama terciptanya negara Saudi modern yang masih eksis hingga saat ini. Faktanya, terdapat banyak kesamaan antara perkembangan wilayah Arab yang satu dengan wilayah Arab lainnya pada tahun 1800 hingga 1925 M, dan hampir semua pemberontakan yang mereka lancarkan terhadap pemerintahan

“Utsmani” Turki berhasil ditumpas. Akhirnya, mereka berada di bawah kendali Barat. Namun perkembangan Jazirah Arab, khususnya Hijaz, bisa dikatakan unik. Pergolakan politik yang paling penting di sini, pergerakan Dinasti Saudi, erat kaitannya dengan adanya gerakan reformasi yang mendahuluinya, yang disebut gerakan Wahhabi. Bahkan setelahnya, keduanya tidak dapat dipisahkan.²²

²¹ Muhammad Aslah Akmal Azmi dan Ashraf Ahmad Hadi, “Pan-Islamisme di Negeri-Negeri Melayu dan Reaksi British (1912-1918),” *Akademika*, 91.3 (2022), 3–14
<<https://doi.org/10.17576/akad-2021-9103-01>>.

²² Ihwan Agustono, “Dinamika Politik Islam Semenanjung Arab 1800-1930 M dan Pengaruh Berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern Terhadap Praktik Keagamaan,” *Marâji’: Jurnal Studi Keislaman*, 3.September 2016 (2016), 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rabiatul Adawiyah, Abu Hanifah Haris, dan Zulkanain Abdul Rahman, “Perkembangan Gerakan Pembebasan Hijaz dan Anti Ibn Saud, 1920-an Hingga 1930-an (Development of the Hijaz Liberation Movement and Anti Ibn Saud, 1920s to 1930s),” *Journal of Al-Tamaddun*, 13.1 (2023), 104–16
- Ahmad Abdul Kadir, “Resistensi Warga Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabi Takfiri,” *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 3.1 (2020)
- Ahmad, Samsul, “Peranan Muhammad Ali Pasha dalam Pengembangan Islam di Mesir,” *UIN Alauddin Makassar*, 2018
- Andriani, Hesti, Hasaruddin, dan Susmihara, “Wahabisme: Al-Harakah Al-Tandhifiyah Al- Islamiyyah,” *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3.2 (2021), 116–25
- Azmi, Muhammad Aslah Akmal, dan Ashraf Ahmad Hadi, “Pan-Islamisme di Negeri-Negeri Melayu dan Reaksi British (1912-1918),” *Akademika*, 91.3 (2022), 3–14 <<https://doi.org/10.17576/akad-2021-9103-01>> Basri, Muhammad Ridha, “The Dilemma of Muhammadiyah in Aceh Amidst the Religious Contestation between Wahhabi and Aswaja: A Historical Parallelism,” *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 7.1 (2024), 17–42
- <<https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>> Faizin, Faizin, dan Afridawati Afridawati, “The Salafi Da’wah Movement and its Implications on Religious Rituals in Kota Sungai Penuh,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 5.1 (2023), 133–44
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i1.246>
- Ihwan Agustono, “Dinamika Politik Islam Semenanjung Arab 1800-1930 M dan Pengaruh Berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern Terhadap Praktik Keagamaan,” *Marâji’: Jurnal Studi Keislaman*, 3.September 2016 (2016), 6

- Leccese, Francesco Alfonso, “Three cases of critical engagement of Sufis with modern Islamic trends,” *Kervan*, 28.1 (2024), 243–56
<<https://doi.org/10.13135/1825-263X/9944>> Majid, Abdul,
- Mahdalena Nasrun, Novizal Wendry, Ruslan Sangaji, dan Abdul Hakim, “Salafi, Hadith, and Islamic Law: Identity Politics and Wahabi Movement in East Kalimantan,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23.1 (2023), 147–70 <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32139>
- Miswar, Khairil, “Wahhābi dalam Perspektif HUDA dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2.1 (2020), 1–27
<<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.57>> Riyadi, Hendar, Cecep Taufikurrohman, dan Imas Masturoh, “A Comparative Analysis of the Muhammadiyah and Salafi-Wahhabi Da’wah Movement,” *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9.1 (2024) <https://doi.org/10.18326/mlt.v9i1.1945>
- Rohmad, Rudik Noor, A Husein Ritonga, dan S Sagap Al-munawwar, “Bid‘ah and Its Implementaton on Wahhabi’s Concept,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 3.1 (2024), 1–9
- Sweis, Sami Jiryis, “Hashimite depictions of Wahhabi Islam as a rhetorical front in the late Ottoman period,” *Cogent Arts and Humanities*, 11.1 (2024)
<https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2391642>
- Unggul Purnomo Aji, dan Kerwanto, “Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangannya,” *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2023), 45–61 <<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>>

Asal Usul Dinasti Saud

Oleh : Ade Ayu Sulistiani

Arab Saudi berdiri secara resmi pada tahun 1932, akan tetapi di Arab Dinasti saud sudah mulai berkuasa pada abad ke-18. Pendirinya yang bernama Muhammad bin Saud dan pada saat itulah dimulainya kekuasaan Dinasti Saud.²³ Ketika berbicara tentang asal usul dinasti Saud, maka gerakan Wahhabi yang didirikan oleh Abdul Wahhab juga akan ikut dikaitkan, karena kedua hal itu sulit dipisahkan dan keduanya adalah akar dari awal mula berdirinya Dinasti Saud.

Asal Usul Berdirinya Dinasti Saud

Berawal dari menurunnya kekuasaan kesultanan Turki Ustmani pada dua abad terakhir sejak wafatnya Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 M. Kemudian terjadi pemberontakan yang mengakibatkan satu persatu wilayah Turki Usmani melepaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Terdapat beberapa wilayah yang ada di Eropa dan terdapat juga daerah di wilayah Timur Tengah yang mencoba dengan keras untuk bisa melepaskan wilayahnya dari kekuasaan Turki Usmani. Dari sekian banyak wilayah yang membeberontak dari kekuasaan Turki Usmani, salah satunya yaitu pemberontakan yang dilaksanakan oleh keluarga Ibnu Saud yang pada saat itu pemberontakannya didukung oleh seorang cendikiawan

²³ Dina Yulianti, 'Pergeseran Identitas Arab Saudi Dan Proliferasi Terorisme', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 9.1 (2019), 173–99
<<https://doi.org/10.15642/jrp.2019.9.1.173-199>>.

muslim bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan gerakan Wahhabiyah.²⁴

Didalam buku Muhammad bin Saud dijelaskan bahwa Muhammad bin Saud adalah seorang keturunan Yahudi yang mengaku sebagai orang Arab. Nenek moyangnya bernama Markhan yang merupakan seorang pendatang di kota Diriyah dan daerah tersebut Markhan memiliki keturunan dan salah satu keturunannya dalam beberapa generasi kemudian yaitu Muhammad bin Saud.²⁵

Ada juga yang menyebutkan bahwa garis keturunan Muhammad bin Sa'ud yaitu Muhammad bin Sa'ud bin Muhammad bin Umar bin Faisal bin Ahmad bin Sa'dan bin Abdullah bin Utsman bin Yasar bin Jibr bin Abdul Aziz bin Umar bin Sulaiman bin Zaid bin Abdirrahman bin Sulaim bin Adwan bin Shalih bin Fadhl bin Humaid bin Uwaimir bin Dahas bin Hilal bin Zahir bin Sam'an bin Masajla bin Zaid bin Darim ibn Dhubaiyah bin Bakar bin Mudhlaj bin Wahab bin Zam'ah bin Bakar bin Wa'il bin Dahis ibn 'Amr bin Qadha'ah bin Mash'ab bin Math'am bin Jubair bin Rabi'ah bin Mudhar.²⁶

Pada tahun 1745, terdapat seorang pembaharu muslim yang bernama Abdul Wahhab, ia ingin memurnikan negerinya dari pengaruh TBC (Takhayul

²⁴ Ridwan and others, 'Gerakan Wahhabiyah Dan Abdul Aziz Al-Saud Dalam Pembentukan Dinasti Saudi Periode Ketiga (Emirat Riyadh 1901-1932 M)', 7.1 (2024), 521–32
<<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.827.The>>.

²⁵ Nur Khalik Ridwan, *Sejarah Lengkap Wahhabi*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020) hal. 51

²⁶ Nur Khalik Ridwan.

Bid'ah, dan Khurofat), dengan semangatnya, Abdul Wahhab menginginkan agama islam ini bebas dari kerusakan yang ia yakini sudah mencemari agama Islam. Saat itu, modernitas sudah merevolusi konsepsi manusia tentang realitas di dunia dengan memperkenalkan konsep-konsep yang mengejutkan kesadaran dan memperkuat kompleksitas tatanan sosial dan ekonomi. Masyarakat tradisional yang berjuang untuk berkembang dan menjadi modern merasa semakin tersingkir.²⁷

Namun Abdul Wahhab dalam menjalankan misinya ditentang oleh negerinya sendiri, yaitu al-'Uyainah. Sebab Abdul Wahhab dalam menjalankan misinya menggunakan hukum rajam. Abdul Wahhab ini memiliki pemikiran yang sangat berlebihan, sebab siapapun orang yang dianggap bertentangan dan tidak menerapkan tauhid yang murni, yang sesuai keinginannya, maka orang tersebut akan dianggap kafir atau musyrik yang halal untuk dibunuh. Pandangan yang berlebihan ini mendapatkan perlawanan dari banyak golongan dan mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat.²⁸ Karena hal itulah Abdul Wahhab diusir dari

²⁷ Dede Ika Murofikoh, Dini Inasyah Alfaridah, and Novita Novita, 'Perbandingan Ideologi Negara Indonesia Dengan Arab Saudi', *JHHWS: Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1.2 (2022), 188–96 <<https://jurnal.umat.ac.id/index.php/jgs/issue/view/109>>.

²⁸ Agus Moh Najib dkk, *Gerakan Wahabi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2009) hal. 8-9.

negerinya sendiri.²⁹ Kemudian Abdul Wahab pindah dan menetap di kota Diriyah.³⁰

Muhammad bin Sa'ud, seorang penguasa Dinasti Saudi yang telah menerima ajaran Wahhabi,³¹ mengetahui keadaan yang dialami oleh Abdul Wahhab. Ketika Abdul Wahhab pindah ke wilayah Dir'iyah (wilayah kekuasaan Muhammad bin Sa'ud), yang berada di sebelah utara Riyadh, Muhammad bin Sa'ud menerima Abdul Wahhab dengan baik, bahkan menjadikannya sebagai *qadi* dan juga keluarga Saud menerima ajaran yang diajarkan oleh Abdul Wahhab. Kemudian terjadi pembicaraan dan akhirnya merekapun sepakat untuk melanjutkan dakwah Abdul Wahhab, yang dimana ajaran Wahhabi ini dijadikan sebagai ideologi pemersatu suku-suku yang bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Abdul Wahhab.³²

Kepindahan Muhammad bin Abdul Wahhab ke Diriyah terjadi sekitar pada tahun 1157/1158H. Kedatangan Abdul Wahhab di Diriyah ini disebutkan karena diundang oleh penguasa Diriyah, yaitu Muhammad bin Sa'ud. Kemudian di Diriyah inilah, dimulai konsolidasi yang lebih intensif antara penganut Wahhabi dan penguasa Diriyah. Dinasti Saud yang pertama akhirnya terbentuk melalui kolaborasi antara Abdul Wahhab dan Muhammad bin Sa'ud dan

²⁹ A. Abdullah, 'Dinamika Islam Di Arab Saudi', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 4.1 (2019), 152–171 <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i1.828>>.

³⁰ Unggul Purnomo Aji and Kerwanto, 'Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangannya', *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2023), 45–61 <<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>>.

³¹ Unggul Purnomo Aji and Kerwanto.

³² Abdullah.

menjadikan Wahhabi sebagai bagian resmi dan alat kekuasaan Muhammad bin Saud.³³

Abdul Wahab dan Muhammad bin Sa'ud membentuk hubungan yang kuat karena mereka telah melakukan perjanjian ketika akan mendirikan kerajaan Saudi, bahwa Abdul Wahab beserta keturunan laki-lakinya akan menguasai pada bagian keagamaan, sedangkan Muhammad bin Saud beserta keturunan laki-lakinya akan menguasai pada bidang politik, serta agar kerja sama ini secara terus menerus berjalan, maka diantara kedua belah pihak akan menikahi generasi perempuannya.³⁴ Kemudian Muhammad bin Sa'ud yang seorang penguasa Diriyah pada akhirnya menikah dengan seorang putri dari Abdul Wahhab pada tahun 1744.³⁵

Kerja sama antara hal keagamaan yang dilakukan oleh Abdul Wahhab dan ambisi kekuasaan yang di gerakan oleh Muhammad bin Sa'ud dapat disebutkan sebagai perpaduan yang saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya, untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya tersebut.³⁶ Kemudian didirikanlah kerajaan Saudi bersama gerakan Wahhabi (*the Saudi-Wahabi*

³³ Nur Khalik Ridwan. hal. 50

³⁴ Zaenal Abidin, 'Wahabisme, Transnasionalisme Dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam Di Indonesia', *Jurnal Tasamuh*, 12.2 (2015), 130–48.

³⁵ Anna Zakiah Derajat and Toni Kurniawan, 'Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi', *Global and Policy Journal of International Relations*, 9.1 (2021), 39–50 <<https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>>.

³⁶ Ali Yazid Hamdani, 'Debut Politik Muhammad Ibn Abdul Wahhab & Muhammad Ibn Saud', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1.2 (2019), 176–84 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.38>>.

State),³⁷ dan menggabungkan dua tujuan yaitu memperluas kekuasaan politik kerajaan Saudi dan menyebarkan ajaran reformasi yang dibawa oleh Abdul Wahhab agar mensucikan ajaran Islam dari kebatilan.³⁸ Awal mula dibentuknya Dinasti Saud, Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahhab menetapkan untuk bekerja sama di tahun 1744. Dalam menaklukkan serta memurnikan kembali negara Arab dari hal bid'ah, mereka mempunyai rencana untuk melaksanakan sebuah jihad. Keyakinan dari keduanya ini adalah apabila ada orang lain yang tidak menerima bahkan menentang dengan keras ajaran-ajaran dari Wahhabi, maka harus di musnahkan atau di asingkan dari negara Arab.³⁹

Abdul Wahhab dalam memperkuat posisinya, ia mengusulkan sebuah ketundukan yang mutlak masyarakat kepada penguasa, menolak mengadakan permusyawaratan, dan juga mereka dilarang untuk meninggalkan negara tersebut. Usulan Abdul Wahhab membuat negara Arab Saudi mengadopsi sistem kekuasaan yang monarki absolut dengan corak keberagamaan yang ultra-konservatif. Dalam sistem pemerintahan ini, proses pemilihan langsung dalam pergantian penguasa kerajaan Saudi ditiadakan. Dan digantikan dengan kekuasaan raja yang di wariskan kepada generasi ke generasi berdasarkan kepada silsilah Dinasti Saud.⁴⁰

Aliran Wahabi dalam penyiarannya menggunakan kekerasan dan menganggap mereka yang tidak menganut

³⁷ Agus Moh Najib dkk.

³⁸ Abdullah.

³⁹ Derajat and Kurniawan.

⁴⁰ Ali Yazid Hamdani.

ajarannya adalah seorang bid'ah yang harus diperangi sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam melaksanakan misi ini, Abdul Wahhab sendiri berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud.⁴¹ Muhammad bin Saud memberikan sokongan kepada Abdul Wahhab dan membuat ajaran Wahhabi semakin meluas dan kuat. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, yang dimana Abdul Wahab sangat didukung dengan adanya perlindungan politik dari keluarga Saud dalam menyebarkan ajarannya dan sebaliknya keluarga Saud sangat didukung oleh Abdul wahab dan para pengikut wahhabi yang memiliki jiwa dan semangat pembaharuan tersebut dan kemudian keluarga saud memanfaatkan itu untuk upayanya dalam menaklukkan Tanah Arab.⁴²

Konsolidasi dari ajaran Abdul Wahhab ini menjadi kuat dan berkembang, karena para pengikut dan juga pasukan Muhammad bin Sa'ud yang telah di doktrin dan di cekoki dengan ideologi Wahhabi. Kemudian, dinasti pertama Arab Saudi dan keturunan Wahhabi terus menjalin kerja sama sehingga berhasil dalam mendirikan Kerajaan Arab Saudi, meskipun berturut-turut terjadi pertempuran dan juga penghinaan terhadap kelompok muslim lain yang menganggap menjalankan sebuah bid'ah.⁴³

Kolaborasi ini berhasil menguasai beberapa wilayah di Jazirah Arab dan di wilayah sekitarnya pada

⁴¹ Abu Haif, 'Perkembangan Islam Arab Saudi', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018), 423–41
<<https://doi.org/10.32489/tasamuh.45>>.

⁴² Unggul Purnomo Aji and Kerwanto.

⁴³ Nur Khalik Ridwan. hal. 55

akhir abad ke-18. Terdapat dua hal yang memunculkan Gerakan Wahhabi yaitu pertama diantaranya itu munculnya kesadaran di golongan para ulama bahwa banyak ajaran yang tidak diketahui masuk dan diakui sebagai ajaran islam, ajaran tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, contohnya bid'ah, khurafat, dan takhayul. Oleh sebab itu Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab bekerjasama untuk kembali memurnikan ajaran islam sebagaimana mestinya sehingga harus ditegakkannya Tauhid. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab at-Tauhid, tauhid adalah pensucian ibadah kepada Allah. Mengabdikan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dengan penuh rasa khushyuk, cinta, pengharapan dan rasa takut kepada-Nya, sehingga pemahaman ini di dukung oleh Muhammad bin Saud dan bersama-sama bertujuan untuk membangun Dinasti Saud.⁴⁴

Konsepsi tauhid pendiri Wahhabi sendiri ditujukan kepada kaum muslim yang dianggap telah muryik, yang tidak sepaham dengan konsepsinya. Padahal, kaum muslim yang tidak sesuai dengan konsepsinya saat itu mayoritas berbeda paham dengan Wahhabi. Demikian, maka sumpah jihad dari Muhammad bin Saud dengan Abdul Wahhab secara terang-terangan ditujukan untuk berjihad terhadap kaum muslim.⁴⁵

Abdul Wahhab di Diriyah memulai gerakan Wahhabi dan mengembangkan kader di bawah perlindungan Muhammad bin Sa'ud. Kerja sama ini

⁴⁴ Ridwan and others.

⁴⁵ Nur Khalik Ridwan. hal. 53-54

kemudian dilanjutkan dengan berbagai penyerangan ke wilayah sekitar, yaitu wilayah yang dihuni oleh umat islam, dengan tentara dan pendukungnya yang telah di doktrin dengan ajaran Wahhabi.⁴⁶

Perkembangan Wahabi di Arab Saudi mencapai puncaknya pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Namun ideologi ini hampir hilang, namun Ibnu Sa'ud mampu menghidupkan kembali semangatnya dengan mendirikan organisasi Ikhwan. Disisi lain, Wahhabi berkembang secara turun menurun di Arab Saudi, karena ulama di Arab Saudi mayoritas adalah keturunan Abdul Wahab yang menikah dengan keluarga penguasa. Artinya, selain berkembangnya melalui jalur dakwah, juga karena adanya jalur pernikahan. Dengan hadirnya Ibnu Sa'ud dan keluarganya dalam paham Wahhabi menjadikannya sebagai ideologi agama, dan juga para pengikutnya terus mengembangkan paham tersebut, dan memasukkan Islam versi rasional dan reformatif.⁴⁷

Di Nejd, sekitar Riyadh, Abdul Wahhab sebagai seorang pemurni, menggerakan suku Badui yang hanya sekedar Islam saja, menuju semangat agama baru. Gerakan reformasi ini mendapatkan sokongan dari para pemimpin suku kecil di desa Diriyah dan melahirkan sebuah gerakan yang mempunyai kekuatan serta dorongan yang kuat untuk menyebarkan ajarannya. Dinasti Saudi memperluas pengaruh dan kekuasaan hanya dalam beberapa tahun.⁴⁸

Kolaborasi Wahhabisme dengan Kerajaan Arab Saudi pertama ini mendapatkan perlawanan dari berbagai

⁴⁶ Nur Khalik Ridwan. hal. 54

⁴⁷ Haif.

⁴⁸ Abdullah.

kalangan masyarakat Islam, baik dari golongan ulama, hakim, ataupun para tokoh yang lainnya. Ada juga yang melalui buku dan risalah dan ada pula yang menghadapinya di medan pertempuran seperti yang terjadi di Irak, Yaman, Hijaz, Syam, dan sebagainya.⁴⁹

Diakhir tahun 1807M, seluruh wilayah di Hijaz menjadi bagian wilayah Dinasti Sa'ud. Kekuasaan Dinasti Saud di Hijaz tidak bertahan lama, karena Muhammad Ali Pasya dari Mesir berhasil menguasai Mekkah dan Madinah serta mengalahkan Saudi pada tahun 1813, dan juga Dinasti Saud di Riyadh dihancurkan pada tahun 1818M.⁵⁰ Demikianlah Dinasti Saudi yang pertama ini berakhir setelah digulingkan oleh Kesultanan Ustmani Mesir pada tahun 1818M.⁵¹

Kemudian setelah lima tahun lamanya, Wahhabi dan keluarga Sa'ud kembali mendirikan dinasti Saudi kedua di Najd pada tahun 1823 M yang dipimpin oleh Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud. Pada masa dinasti Saud kedua banyak terjadi permasalahan internal, karena perebutan kekuasaan antara keturunan Saud yang dimanfaatkan suku Rasyid yang berhasil mengalahkan Dinasti Saud kedua dan berhasil menguasai Najd. Hal ini membuat keturunan Saud mengungsi kepada klas as-Shabah di Kuwait dan berujung pada berakhirnya Dinasti Saudi kedua pada tahun 1891 M.⁵²

⁴⁹ Nur Khalik Ridwan, *Sejarah Lengkap Wahhabi*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020) hal. 56

⁵⁰ Abdullah.

⁵¹ Ridwan and others.

⁵² Ridwan and others.

Kepemimpinan Dinasti Saud (Tiga Periode)

1. Periode Pertama

Abad ke-12 H atau kd 18 merupakan waktu dalam periode pertama terbentuknya kerajaan arab saudi. Muhammad bin Saud di Diriyah merupakan tokoh dalam periode pertama yang menginisiasi terbentuknya Kerajaan Arab Saudi. Bertempat di Najd yang dalam sejarah dikenal sebagai jantung dari Jazirah Arab, lahir sebuah Negara Saudi yang terletak disebelah Riyadh di tahun 1774 . Dalam periode pembentukannya, wilayah tersebut meliputi hampir seluruh kawasan Arab. Pada periode pertama ini Kerajaan Arab Saudi bertanggung jawab untuk menyebarkan dakwah menuju kemurnian tauhid kepada Allah SWT. Amanat tersebut tidak lain untuk mencegah segala perilaku bid'ah dan khufarat, dan sebagai upaya untuk menuntun kembali kepada ajaran yang benar dan menganut ajaran-ajaran agama Islam pada jalan yang semestinya.⁵³

2. Periode Kedua

Berdirinya Kerajaan Saudi Arabia dalam periode kedua berada di bawah kepemimpinan Faisal bin Turki di tahun 1240H atau 1824 M, masa ini terjadi sampai tahun 1309H atau 1892M.⁵⁴ Di tahun 1840, secara menyeluruh pasukan Mesir (dibawah otoritas Turki Utsmani) meninggalkan Arab. Pada 1843 M, Faisal bin Turki melarikan diri dari Mesir dan kembali ke Riyadh dan berhasil menjadi pemimpin Riyadh sampai wafat pada tahun 1865 M. Kepemimpinan Arab Saudi di Riyadh ini

⁵³ Fakhri Fadilah Muttaqin, 'Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 6.1 (2022), 469.

⁵⁴ Haif.

bertahan sampai terjadi perpecahan internal di antara keturunan Saud, dan mereka dikalahkan oleh klan yang lebih kuat, yaitu Ibnu Rasyid.⁵⁵

3. Periode Ketiga

Tahun 1319 H merupakan awal mula dari periode ketiga Kerajaan Arab Saudi, pada periode ini raja Abdul Aziz berhasil memulihkan masa keemasan Kerajaan saat masa para nenek moyangnya. Keberhasilan itu terjadi saat Abdul Aziz merenggut kembali ibu kota bersejarah Kerajaan Arab Saudi yaitu Riyadh. Dimulai dari keberhasilannya tersebut, Raja Abdul Aziz memulai dengan membangun dan mewujudkan kesatuan wilayah yang besar yang dijadikan sebagai histori Kerajaan Arab Modern. Periode ketiga yang bisa disebut sebagai Arab modern ini terhitung ketika beliau berhasil memulihkan kembali suasana yang aman serta ketentraman ke seluruh bagian di Jazirah Arab. Selain itu, keberhasilan di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz yaitu menyatukan seluruh wilayah Jazirah Arab yang luas ke dalam sebuah negara modern yang mempunyai kekuatan, kemudian disebut dengan Kerajaan Saudi Arabia.⁵⁶

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara yang memiliki sistem monarki bertempat di tanah Arabia. Ibnu Sa'ud atau Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Sa'ud mengumumkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (*Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah*) dan menggabungkan kota Riyadh, Najd (Najed), Hail, Asir, dan Hijaz. Kemudian Abdul Aziz menaiki tahta dan menjadi raja yang pertama di Kerajaan Saudi.⁵⁷ Dibawah

⁵⁵ Haif.

⁵⁶ Muttaqin.

⁵⁷ Haif.

kepeimpinan Abdul Aziz dan dengan bantuan Inggris kemudian merestorasi kembali Kerajaan Arab Saudi Ketiga. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1932, negara lain mengakui supremasi kerajaan pengungsur Wahhabisme ini dengan diadakannya proklamasi berdirinya Kerajaan Arab Saudi (Arab Saudi Ketiga).⁵⁸

⁵⁸ Nur Khalik Ridwan, *Sejarah Lengkap Wahhabi*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020) hal. 58

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., ‘Dinamika Islam Di Arab Saudi’, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 4.1 (2019), 152–171 <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i1.828>>
- Abidin, Zaenal, ‘Wahabisme, Transnasionalisme Dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam Di Indonesia’, *Jurnal Tasamuh*, 12.2 (2015), 130–48
- Ali Yazid Hamdani, ‘Debut Politik Muhammad Ibn Abdul Wahhab & Muhammad Ibn Saud’, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1.2 (2019), 176–84 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.38>>
- Derajat, Anna Zakiah, and Toni Kurniawan, ‘SaudiVision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi’, *Global and Policy Journal of International Relations*, 9.1 (2021), 39–50 <<https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>>
- Haif, Abu, ‘Perkembangan Islam Arab Saudi’, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018), 423–41 <<https://doi.org/10.32489/tasamuh.45>>
- Murofikoh, Dede Ika, Dini Inasyah Alfaridah, and Novita Novita, ‘Perbandingan Ideologi Negara Indonesia Dengan Arab Saudi’, *JHHWS: Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1.2 (2022), 188–96 <<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/issue/view/109>>
- Muttaqin, Fakhri Fadilah, ‘Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018’, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 6.1 (2022), 469
- Najib, A . M. dkk (2009) Gerakan Wahabi di Indonesia.

Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press

Ridwan, N . K. (2020) Sejarah Lengkap Wahhabi.
Yogyakarta : IRCiSoD

Ridwan, Samsul Bahri Hasibuan, Usman Supendi, and Ajid Thohir, 'Gerakan Wahhabiyah Dan Abdul Aziz Al-Saud Dalam Pembentukan Dinasti Saudi Periode Ketiga (Emirat Riyadh 1901-1932 M)', 7.1 (2024), 521–32 <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.827.The>>

Unggul Purnomo Aji, and Kerwanto, 'Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangannya', *El- Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2023), 45–61 <<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>>

Yulianti, Dina, 'Pergeseran Identitas Arab Saudi Dan Proliferasi Terorisme', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 9.1 (2019), 173–99 <<https://doi.org/10.15642/jrp.2019.9.1.173-199>>

Abdul Aziz bin Saud : Penyatuan Jazirah Arab

Oleh : Muhammad Fu'ad Muhtadi

Mengenal Abdul Aziz bin Saud

Ibnu Saud atau yang memiliki nama kecil Abdul Aziz al-Saud memiliki nama lengkap Abdul Aziz bin Abdul rahman bin Faishal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud. Beliau lahir pada tahun 1297 H/1880 M pada bulan Dzulhijjah di kota Riyadh. Beliau adalah putra dari pasangan Abdurrahman bin Faishal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud dan Sarah binti Ahmad Sudairi yang mana ayahnya adalah kepala suku Dawaris di selatan.

Abdurrahman membesarkan putra-putranya sebagai penganut Wahabi yang taat. Abdul Aziz adalah salah satu yang diprioritaskan, ia belajar membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an melalui bimbingan Muhammad Mushaibih, selain itu ia juga belajar ilmu tauhid dan ushul fiqh kepada Abdullah bin Abdul Latif Al-Syaikh, semasa hidupnya Abdul Aziz terus menambah wawasannya dengan belajar kepada para politikus, sastrawan, pemikir, ulama, dan lain sebagainya. Ibnu Saud atau Abdul Aziz dididik oleh ayahnya di kota Riyadh. Abdul Aziz juga diajari oleh ayahnya cara menggunakan senapan dan pedang, berkuda tanpa menggunakan pelana atau sanggurdi, dan cara melompat di atas kuda. Pada pertengahan abad 19, ketika mereka berpindah ke kota pelabuhan Kuwait, keluarga al-Saud mengalami kesulitan yang pada akhirnya membuat Abdul Aziz memetik pelajaran berharga dari peristiwa tersebut. Selama perjalanannya, ia sering menyaksikan dan mengalami langsung konflik-konflik internasional.

Penampilan Abdul Aziz yang memiliki tinggi badan yang besar dengan tinggi badan sekitar 6 kaki 4 inci membuatnya terlihat gagah. Pada usia 21 tahun, Abdul Aziz berhasil mengambil alih kekuasaan di Riyadh. Pada usia 78 tahun, tepatnya pada 9 November 1953, Abdul Aziz wafat di kota Ta'if.⁵⁹

Berbicara soal Ibn Saud sebagai pendiri Arab Saudi, perjalanannya memang dimulai dari penyatuan wilayah-wilayah seperti Nejd dan Hijaz yang dulunya dikuasai oleh berbagai suku dan klan dengan status sosial yang sejajar. Pada awal 1900-an, Ibn Saud berhasil menyatukan suku-suku di kawasan ini, yang akhirnya membentuk Kerajaan Arab Saudi pada 1932. Peristiwa penting seperti penaklukan Hail di 1921 hingga Hijaz pada 1925 jadi momen krusial yang membuat klan Al Saud memegang dominasi di wilayah tersebut.⁶⁰

Ibn Saud juga dikenal lihai dalam memainkan propaganda politik, terutama saat Revolusi Arab yang dimulai di awal abad 20. Dia memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan suku-suku di Arab yang pada masa itu belum punya jiwa persatuan yang kuat. Dengan menggunakan ide-ide agama dan dukungan kelompok Wahabi, Ibn Saud berhasil membangun legitimasi sebagai pemimpin Arab Saudi, bahkan hingga dianggap sebagai *Al Imam* di kalangan Wahabi. Aliansi ini juga membuat

⁵⁹ Ridwan and others, 'Gerakan Wahhabiyah Dan Abdul Aziz Al-Saud Dalam Pembentukan Dinasti Saudi Periode Ketiga (Emirat Riyadh 1901-1932 M)', *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7.1 (2024), 521–32
<<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.827.The>>.

⁶⁰ The University of Calgary. "Saudi Arabia: Ibn Saud and the Third Saudi State." Diakses 7 November 2024.

Arab Saudi semakin tak terpisahkan dengan pandangan dan doktrin Wahabi, yang kemudian menjadi ciri khas negara itu.⁶¹

Pengaruh ini terus dipertahankan, salah satunya dengan sistem monarki absolut di mana jabatan-jabatan kunci di pemerintahan diisi oleh anggota keluarga Saud. Dalam sistem ini, pewarisan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun dalam keluarga, sehingga menjamin kontrol atas negara tetap berada dalam klan Al Saud.⁶²

Hubungan Abdul Aziz Dengan Ulama Wahhabi dan Peran Wahhabisme dalam Pembentukan Negara.

Arab Saudi merupakan negara dimana Wahhabisme muncul dan tumbuh menjadi sebuah ideologi yang mempunyai pengaruh dan juga membayangi kebijakan-kebijakan kerajaan. Wahhabisme juga menempatkan Arab Saudi sebagai motor penggerak penyebaran doktrinnya dan kendaraan utama dakwahnya. Setelah al-Wahab bersekutu dengan Muhammad bin Saud yang merupakan seorang kepala suku di wilayah Arab. Wahhabisme semakin mendapat tempat untuk menyebarkan doktrinnya, khususnya di Timur Tengah. Dalam upaya menguasai suku-suku di kawasan Arab, Ibnu Saud memanfaatkan Wahhabisme untuk melegitimasi gerakan politik.⁶³

⁶¹ The University of Calgary. "Saudi Arabia: Ibn Saud and the Third Saudi State." Diakses 7 November 2024.

⁶² Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab. "Demokrasi Dalam Pemikiran Politik: Negara Arab Saudi." Diakses 7 November 2024.

⁶³ Dede Ika Murofikoh, Dini Inasyah Alfariadah, and Novita Novita, 'Perbandingan Ideologi Negara Indonesia Dengan Arab Saudi',

Pada tahun 1912 gerakan Wahabi juga mempunyai peranan yang sangat mendominasi ketika Abdul Aziz mendirikan “Ikhwan” yang merupakan sebuah organisasi militer, dalam organisasi ini beranggotakan orang-orang dari suku Arab termasuk suku Badui dan didominasi oleh orang-orang yang menganut kepercayaan Wahabi. Mereka diberikan desa pertanian sebagai tempat tinggal. Pada tahun yang sama, Abdul Aziz berhasil mengumpulkan setidaknya 75.000 pengikut dari berbagai suku, contohnya suku Harb, Utayba, Ajman, dan Mutayr. Saat berperang melawan Kekhalifahan Utsmaniyah dan al-Rayid, Abdul Aziz menjadikan “Ikhwan” sebagai garda depan. Ikhwanul Muslimin juga menunjukkan secara historis bahwa keaslian agama yang dipadukan dengan unsur politik dalam suatu negara bisa melahirkan perubahan. Hal ini menunjukkan perpaduan politik dan agama dapat menjadi kekuatan politik yang kokoh. Tetapi dalam sejarahnya, Ikhwanul Muslimin mengalami konflik dengan kebijakan politik yang dibuat oleh Abdul Aziz dengan prinsip ideologi Wahhabinya. Wahhabisme dan Kerajaan Saudi tidak selalu sependapat dalam menjalankan gerakan dakwah dan mengambil kebijakan politik.

Dalam upaya mendirikan kerajaan Saudi ketiga, Abdul Aziz menjalin hubungan dengan Inggris, hal ini merupakan salah satu penolakan Ikhwanul Muslimin yang merupakan organisasi bentukan Abdul Aziz terhadap kebijakan Abdul Aziz sendiri. Hal ini terjadi karena prinsip yang berbeda dengan prinsip Wahhabi. Ketika Abdul Aziz bekerjasama dengan Inggris, Ikhwanul

JHHWS: Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 1.2 (2022), 188–96
<<https://jurnal.umat.ac.id/index.php/jgs/issue/view/109>>.

Muslimin yang awalnya bersatu mendirikan Kerajaan Arab Saudi, akhirnya menjadi kelompok yang menolak keputusan politik Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata agama dan politik mempunyai peranan yang berbeda bahkan terkadang bertentangan. Peran yang dimainkan keluarga Saud memiliki sifat politis. Dalam upaya mendirikan Kerajaan Arab Saudi, kebijakan politik yang diambil keluarga Saud berperan penting dalam menentukan keberhasilannya. Kebijakan politik tersebut antara lain membentuk komando perang yang disebut “Ikhwan” yang berasal dari berbagai suku arb dan kaum fanatik Wahhabi pada abad 19 M, memutuskan bekerjasama dengan Inggris pada tahun 1915 M, menjalin kerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1915. 1744 M, dan Mubarak al. -Shabah Kuwait tahun 1902 M, dan kebijakan politik lainnya. Peran pemimpin yang cerdas dalam berpolitik, mempunyai wibawa, dan pantang menyerah juga memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan politik. Bergabungnya politik Keluarga Saud dan semangat keagamaan gerakan Wahhabi menjadi fakta yang menjadi penyebab terjadinya pemberontakan yang berdampak besar pada masyarakat Arab hingga akhirnya Kerajaan Arab Saudi terbentuk.⁶⁴

Gerakan Wahabi juga mempunyai peranan dalam bidang politik, antara lain dengan mengubah gelar Amir (satu-satunya pemimpin politik) menjadi Imam (pemimpin politik dan agama) setelah itu mengubahnya lagi menjadi gelar Raja Imam (pemimpin politik dan agama) yang mana gelar tersebut adalah diberikan kepada

⁶⁴ Izmi Syahidah, *Gerakan Wahhabi Dan Keluarga Saud Dalam Upaya Mendirikan Kerajaan Saudi Arabia*, 2017.

pemimpin tertinggi dinasti Saud. Sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi, gerakan Wahhabi telah tiga kali memberikan wajah baru pemerintahan hingga awal abad ke-20, yaitu Kesultanan Hijaz, Najd, lalu kemudian Kerajaan Arab Saudi. Ajaran yang disumbangkan kelompok Wahabi terhadap sistem pemerintahan monarki Saudi Arabia didasarkan kepada ajaran Muhammad bin 'Abdul Wahhab.

Beberapa peranan Gerakan Wahhabi terhadap Kerajaan Saudi diantaranya:

- Gerakan Wahhabi menyebarkan doktrin dengan menyebarkan selebaran berisi tauhid dan larangan bid'ah. Selebaran tersebut kemudian diberikan kepada pihak berwajib dan dilanjutkan dengan musyawarah antara ulama Hijaz dan kelompok Wahhabi.
- Gerakan Wahhabi menggunakan peperangan untuk menyebarkan doktrin Wahhabi.
- Memberikan dukungan politik kepada sekutu dan membuat perjanjian kerja sama.

Kedekatan antara Ibnu Saud dan al-Wahhab saling menguntungkan satu sama lain. Ibnu Saud memperoleh keuntungan dalam bidang politik karena ajaran regilopolitik yang ditawarkan Al-Wahhab, sedangkan Al Wahab mampu menanamkan doktrin Wahhabi tentang pemerintahan Tuhan yang dianutnya. Al-Wahab beberapa kali melontarkan tawaran terkait konsep ketaatan mutlak rakyat kepada penguasa, larangan meninggalkan suatu negara, dan menolak musyawarah untuk memperkuat kedudukannya melawan penguasa Arab.

Tawaran yang dilontarkan Al-Wahhab membuat Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut menggunakan gaya keagamaan ultra-konservatif.

Sebab dalam model pemerintahan seperti ini proses pemilihan langsung tidak berlaku ketika penguasa Kerajaan Saudi berganti penguasa. Ras keluarga Saud merupakan pewaris kekuasaan raja dan dijalankan secara turun temurun, sehingga sistem ini membawa keberkahan tersendiri bagi keluarga kerajaan. Dampak yang muncul dari hubungan Wahhabisme dengan pemerintah dapat kita lihat ketika Raja Abd Aziz secara resmi menyatakan bahwa ajaran Wahhabisme adalah ajaran yang dianut oleh masyarakat Saudi. Saudi termasuk negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara Islam saat itu. Pemeliharaan dua kota suci yakni Mekkah dan Madinah juga berada di bawah kendali Wahhabi. Pada saat yang sama, para ulama Wahhabi juga mendapat tambahan dana yang digunakan untuk penyebaran dan peningkatan agama Islam dalam jumlah besar, sehingga keseharian warga Saudi lebih teratur dan tertib, terutama dalam hal ibadah dan pendidikan karena ajaran Wahhabi.

- Gerakan Wahhabi menggunakan perang untuk menyebarkan doktrin Wahhabi.
- Memberikan dukungan politik kepada sekutu dan membuat perjanjian kerja sama..⁶⁵

Penaklukan Kota-Kota di Jazirah Arab Oleh Abdul Aziz

1. Menaklukkan Kota Riyadh

Pada tahun 1318 H/1901 M, Abdul Aziz al-Saud mulai mengupayakan untuk merebut kembali wilayahnya yang dikuasai klan al-Rasyid. Langkah

⁶⁵ Murofikoh, Alfaridah, and Novita.

awalnya diawali ketika Abdul Aziz bin Mut'ab al-Rasyid, pemimpin al-Rasyid, melancarkan serangan terhadap Kuwait. Serangan ini membuat pemimpin Kuwait, Mubarak Al-Shabah, meminta bantuan Abdurrahman al-Faishal dan putranya, Abdul Aziz, untuk membentuk aliansi guna menghadapi al-Rasyid. Kesempatan untuk kembali berkuasa ini tidak disia-siakan oleh Abdurrahman dan Abdul Aziz. Bagi mereka, aliansi ini merupakan peluang yang sudah lama dinantikan untuk merebut kembali kekuasaan keluarga Saud dari tangan klan al-Rasyid.⁶⁶

Pada permulaan pertempuran, Abdul Aziz memimpin pasukannya sendiri menyerang Riyadh, sementara Mubarak dan Abdurrahman memimpin pasukan tambahan berjumlah sekitar 10.000 orang. Strategi perang ini diprakarsai oleh Abdul Aziz, yang memperhitungkan bahwa al-Rasyid akan kesulitan menghadapi serangan dari dua arah sekaligus. Strategi ini terbukti efektif ketika Abdul Aziz berhasil memasuki Riyadh dan mengepung benteng al-Mashmak, tempat dua pasukan al-Rasyid bertahan. Situasi semakin menguntungkan ketika pasukan Turki Utsmani, yang sebelumnya mendukung al-Rasyid, ditarik dari kawasan Arab akibat pecahnya Perang

⁶⁶ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim, dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 57.

Dunia I. Penarikan pasukan Turki ini melemahkan posisi al-Rasyid.⁶⁷

Namun, tidak semua aliansi berjalan mulus. Dalam pertempuran di Ash-Sharif pada 7 Maret 1901, Abdurrahman al-Faishal dan Mubarak Al-Shabah mengalami kekalahan yang berat. Kekalahan ini sangat mengecewakan Abdul Aziz, yang kemudian memilih kembali ke Kuwait. Kegagalan tersebut juga membuat posisi Mubarak melemah secara drastis; pasukannya habis, kotanya kehilangan perlindungan, dan sekutunya pun terpecah. Melihat kelemahan ini, Inggris yang menganggap Kuwait sebagai sekutunya, turun tangan untuk membantu Mubarak dengan mengirim kapal perang sebagai peringatan bagi pasukan al-Rasyid untuk mundur. Tekanan ini akhirnya memaksa pasukan al-Rasyid menarik diri.⁶⁸

Pada tanggal 15 Januari 1902 M, Abdul Aziz akhirnya berhasil merebut Riyadh dan mengembalikan kota tersebut ke dalam kekuasaan dinasti al-Saud. Dalam penyerbuan benteng al-Mashmak, ia berhasil membunuh Ajlan, penguasa dari klan al-Rasyid, beserta sebagian penjaganya. Setelah Riyadh berhasil direbut dan dinyatakan sebagai ibu kota Kerajaan Saud, Abdul Aziz mulai mengarahkan ekspansi wilayahnya menuju Najd, sebagai bagian dari

⁶⁷ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014), hlm. 951.

⁶⁸ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim., dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 59-60.

upayanya mengembalikan kejayaan keluarga Saud di kawasan tersebut.

2. Menaklukkan Wilayah Najd dan Sekitarnya

Setelah menguasai Riyadh, Abdul Aziz bergerak ke wilayah selatan dan menghadapi beberapa peperangan di daerah itu. Pada sekitar tahun 1320 H atau 1903 M, ia berhasil menguasai sejumlah daerah, termasuk Huthah, Aflaj, Hariq, dan Wadi Dawasir. Kemudian, pada 1 Maret 1903 M, Abdul Aziz membantu sekutunya, Mubarak Al-Shabah, dalam menghadapi Abdul Aziz bin Rasyid. Saat kembali ke Najd, Abdul Aziz juga berhasil memperluas kekuasaannya dengan merebut wilayah Sadir, Wasym, dan Mahmal. Ia terus maju dan menaklukkan Unaizah pada 22 Maret 1904, serta Buraidah, ibu kota Qashim, pada 30 Mei 1904.⁶⁹

Semakin luasnya kekuasaan Abdul Aziz mulai membuat kekhawatiran di kalangan pemimpin Daulah Turki Utsmani. Merasa terancam, Turki Utsmani mengirimkan bantuan dalam bentuk material dan persenjataan kepada al-Rasyid untuk melawan Abdul Aziz. Dengan dukungan ini, pasukan al-Rasyid berhasil mengalahkan Abdul Aziz pada tahun 1904. Namun, Abdul Aziz tidak menyerah. Ia segera menyusun ulang strategi dengan bantuan penduduk Qashim, yang membuat pasukannya semakin kuat. Peperangan kembali terjadi, dan pada 28 September 1904, mereka bertempur dalam peristiwa yang dikenal

⁶⁹ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim., dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 61.

sebagai Perang Syananah. Abdul Aziz berhasil memukul mundur pasukan Turki Utsmani dan al-Rasyid ke wilayah Khubara, Ras, dan Al-Bukhariyah.

Melihat situasi semakin rumit, Turki Utsmani mencoba menawarkan negosiasi untuk menghentikan peperangan. Dalam negosiasi tersebut, Turki Utsmani mengusulkan agar Qashim menjadi wilayah netral dengan syarat pasukan Turki Utsmani akan menjaga

Buraidah dan Unaizah, sementara Abdul Aziz akan memerintah atas nama Daulah Turki Utsmani. Namun, tawaran ini dengan tegas ditolak oleh Abdul Aziz al-Saud.⁷⁰

Negosiasi yang buntu membuat konflik semakin memanas, dan peperangan kembali terjadi untuk memperebutkan wilayah Qashim. Pada 14 April 1906, Abdul Aziz berhasil mengepung Abdul Aziz bin Rasyid di Raudhatul Muhanna dan membunuhnya. Setelah kematian Abdul Aziz bin Rasyid, kepemimpinan klan al-Rasyid berpindah ke putranya, Mu'tab bin Abdul Aziz bin Rasyid. Peperangan ini akhirnya diakhiri dengan perjanjian damai yang menyatakan bahwa Mu'tab bersedia mundur dan menyerahkan wilayah Qashim serta sekitarnya kepada Abdul Aziz, sedangkan wilayah Ha'il dan beberapa bagian Jabal Syammar akan menjadi wilayah kekuasaan Mu'tab.

Pada tahun 1915, Abdul Aziz menandatangani perjanjian dengan Inggris, yang berjanji akan

⁷⁰ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim., dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 62.

membantu Abdul Aziz mempertahankan kemerdekaannya jika kerajaannya diserang. Di tahun yang sama, pemimpin Hijaz, Syarif Husein bin Ali, juga membuat perjanjian dengan Inggris untuk melakukan pemberontakan terhadap Turki Utsmani.⁷¹

3. Menaklukkan Wilayah 'Asir

Abdul Aziz kemudian melanjutkan misinya untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah 'Asir, yang saat itu dipimpin oleh Hasan bin Ali al-Aidh. Untuk merebut 'Asir, Abdul Aziz mengirimkan ekspedisi militer pertamanya di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Musa'id bin Jalwi al-Saud. Pada bulan Ramadhan tahun 1338 H atau 1920 M, pasukan ini tiba di 'Asir dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Namun, Hasan bin Ali tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Untuk menghadapi ini, Abdul Aziz mengirim ekspedisi militer kedua yang dipimpin oleh Faishal bin Abdul Aziz pada tahun 1340 H atau 1922 M. Faishal berhasil menumpas perlawanan Hasan bin Ali dan menghancurkan pos-pos militernya, yang akhirnya membuat pasukan Hasan bin Ali menyerah. Keberhasilan Faishal ini menambah wilayah kekuasaan Kerajaan Saudi, dan 'Asir resmi digabungkan ke dalam wilayah negara Saudi.⁷²

Di sisi lain, Kesultanan Turki Utsmani secara resmi berakhir pada 3 Maret 1924 M, ketika Mustafa

⁷¹ Bernard Lewis, *Krisis Islam antara Jihad dan Teror yang Keji*, Terj. Ahmad Lukman, (Jakarta: Ina Publikatama, 2004), hlm. 117.

⁷² Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim, dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 64.

Kemal dan organisasinya membubarkan kekhalifahan Islam di Turki dan mendirikan negara Turki Sekuler Nasionalis. Dengan runtuhnya kekhalifahan di Turki, Syarif Husein kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah umat Islam. Ia bahkan meminta Abdul Aziz untuk mengakuinya sebagai khalifah dan tunduk pada pemerintahannya.⁷³

4. Perlawanan Penguasa Hijaz

Abdul Aziz menolak untuk tunduk kepada Syarif Husein, terutama ketika Syarif Husein melarang orang-orang dari Najd untuk menjalankan ibadah haji di Makkah. Merasa perlu bertindak, Abdul Aziz memerintahkan bala tentaranya untuk bergerak ke Hijaz. Dalam konflik ini, pasukan Abdul Aziz berhasil meraih kemenangan, sementara Syarif Husein terpaksa melarikan diri ke Yordania. Di Yordania, putra Syarif Husein, Raja Abdullah, kemudian menjadi raja pertama.

Kekalahan Syarif Husein memberi peluang bagi Abdul Aziz dan pasukannya untuk memasuki kota Thaif pada 4 Desember 1924 M. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah, memasuki kota tersebut dalam keadaan ihram. Setelah menguasai Makkah, Abdul Aziz dan pasukannya bergerak menuju Jeddah, di mana mereka melakukan pengepungan dan akhirnya berhasil memasuki kota tersebut pada tahun 1925 M. Dengan demikian, Hijaz resmi berada di bawah kekuasaan Abdul Aziz, yang

⁷³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Ustmaniyah*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 586-587.

kini menjadi pemimpin di dua wilayah penting, yaitu Hijaz dan Najd beserta sekitarnya.⁷⁴

5. Pemberontakan Al-Idrisi

Abdul Aziz kemudian mengarahkan pasukannya ke wilayah Shabiyah untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Hasan bin Ali al-Idrisi, yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Abdul Aziz al-Saud. Pasukan Abdul Aziz bergerak melalui jalur darat dan laut, yang membuat Hasan al-Idrisi tidak mampu melawan kekuatan tersebut. Akhirnya, Hasan dan keluarganya terpaksa melarikan diri ke Shan'a. Dengan demikian, kekuasaan al-Idrisi di wilayah tersebut pun berakhir, dan Abdul Aziz al-Saud mengumumkan bahwa Emirat Idris telah bersatu dengan kerajaannya.

Peristiwa ini menandai langkah akhir dalam pembentukan Kerajaan Saudi Arabia. Pada 22 September 1348 H atau 1932 M, Abdul Aziz secara resmi mengumumkan penyatuan berbagai wilayah yang ada, menjadikannya sebagai Kerajaan Saudi Arabia (Kingdom of Saudi Arabia). Dengan pengumuman ini, berakhirlah pula Dinasti Saudi yang ketiga.⁷⁵

⁷⁴ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim., dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 64.

⁷⁵ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim., dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999), hlm. 65.

Latar Belakang Sejarah Jazirah Arab Sebelum Penyatuan

Arab Saudi merupakan negara yang dominan penduduknya beragama Islam. Negara Arab Saudi merupakan hasil perjuangan yang dilakukan oleh Abdul Azis bin Abdurrahman bin Faisala Al-Saud atau Ibnu Saud dan resmi menjadi negara pada tanggal 23 September 1932. Ibnu Saud sebagai raja pertama Arab Saudi berhasil membangun pemerintahan berdasarkan monarki absolut. . Dengan berkumpulnya wilayah Najd, Asir, Riyadh, Hail dan Jiaz, Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Sa'ud secara resmi memproklamirkan berdirinya kerajaan Arab Saudi atau Arab Saudi (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah) pada tanggal 23 September 1932. Setelah itu Abdul Aziz menjadi raja pertama kerajaan ini. Dari sejarah dapat kita simpulkan bahwa nama keluarga Abdul Aziz Al-Sa'ud merupakan asal muasal nama kerajaan Arab Saudi. Namun ada yang perlu kita ketahui dalam sejarah Arab modern, bahwa kebangkitan Muwahiddun merupakan awal berdirinya kerajaan Arab Saudi. Gerakan Muwahiddun merupakan gerakan yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Muhawahiddun pada prinsipnya bukanlah kelompok yang berasal dari bangsa Arab, melainkan gerakan yang terinspirasi dari mazhab Hambali yang melahirkan sosok bernama Ibnu Taymiyah. Sekte ini masih ada di Irak, Hijaz, dan Palestina, meski jumlahnya sudah sangat berkurang di wilayah lain. Dari aliran inilah Muhammad bin Abd Al-Wahab juga

terinspirasi dan akhirnya mendirikan ideologi Wahhabi. Muhammad bin Sa'ud, seorang syekh asal Timur Tengah, memberikan dukungannya terhadap gerakan Wahhabi. Selain itu, Muhammad bin Sa'ud selaku penguasa Kerajaan Sa'ud juga memberikan dukungan agar Wahhabisme berhasil menjadikan ideologinya sebagai mazhab konservatif yang diterapkan di Kerajaan Arab Saudi.⁷⁶

Letak Geografis Jazirah Arab

Jazirah Arab memiliki bentuk empat persegi panjang, namun sisinya tidak sejajar. Pada bagian barat dibatasi oleh Laut Merah, di bagian selatan terdapat Laut Arab, di bagian timur terdapat Teluk Arab (Persia) serta di bagian utara terdapat gurun pasir Irak dan Syiria. Selain itu, Jazirah Arab juga terbagi menjadi bagian tengah yang terdiri dari gurun-gurun dan padang pasir yang penduduknya sangat jarang dan pada bagian tepinya adalah suatu pita kecil yang melingkari bagian tengah serta merupakan daerah yang subur dan terdapat banyak kota seperti Oman, dan Bahrain. Pada Bagian Tengah, di bagi menjadi bagian Utara yang memiliki sebutan nejd dan pada bagian Selatan memiliki sebutan al ahkaf yang penduduknya jarang karena itu juga memiliki sebutan al-Rub al-Khalli. Jazirah Arab didiami oleh Bangsa Arab yang merupakan salah satu golongan Bangsa Samiyah (Semit), yang sejatinya adalah keturunan Sam bin Nuh, salah satu rasul Allah. Pada rumpun ini juga terdapat

⁷⁶ Imam Wahyuddin, 'Perkembangan Islam Arab Saudi', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018), 423-41 <<https://doi.org/10.32489/tasamuh.45>>.

bangsa lain selain bangsa Arab, seperti Babilonia, Ibrani, Assyuria, dan Phunissia.⁷⁷

Karena letak geografisnya, Jazirah Arab mempunyai peranan yang cukup penting. Walaupun hanya dilingkari gurun pasir, jika dilihat dari kondisi internalnya. Di bagian barat terdapat Gurun Sinai dan Laut Merah, di bagian timur terdapat Teluk Arab, dan di bagian selatan terdapat sebagian besar negara Irak, di bagian selatan terdapat Laut Arab yang menghubungkan dengan Samudera Hindia, di bagian utara terdapat negara Syria dan sebagian kecil Irak. Kondisi inilah yang menjadikan Jazirah Arab mempunyai pertahanan layaknya tembok yang kuat, bahkan negara lain kesulitan untuk mencaplok, menjajah dan menguasai wilayah Arab. Selain itu, Arabia juga adalah kawasan yang strategis di peta dunia pada zaman dahulu, pada saat benua Amerika dan benua Australia belum banyak diketahui orang, disebabkan posisinya yang menjadi titik perjumpaan tiga benua: Eropa, Asia dan Afrika. Arab di utara, berbatasan langsung dengan lembah Gurun Suriah, dataran tinggi Persia di timur, dan Laut Merah di barat. Wilayah ini dikenal dengan sebutan “Semenanjung Arab” (Kepulauan Arab) karena di semua sisinya dikelilingi oleh laut.⁷⁸

Jazirah Arab atau Semenanjung Arab adalah wilayah yang memiliki letak geografis dan iklim yang unik. Wilayah ini didominasi oleh gurun pasir yang

⁷⁷ M. Nasihudin Ali, ‘Diktat Sejarah Sosial Islam’, 2022.

⁷⁸ Arif Pamungkas, ‘Kerajaan Saudi Arabia Deskripsi Historis Tentang Pergulatan Sosial-Politik (1902-1932M)’, *UIN Sunan Kalijaga*, 2009.

luas dan perbukitan berbatu, seperti di Rub' al-Khali yang merupakan salah satu gurun terbesar dan paling tandus di dunia. Keadaan ini menjadikan Jazirah Arab sulit ditaklukkan oleh bangsa luar karena lingkungan alaminya yang keras dan kering. Namun, letaknya yang strategis antara tiga benua—Afrika, Asia, dan Eropa—membuatnya menjadi jalur penting bagi perdagangan internasional pada masa lampau. Jalur ini mempertemukan berbagai bangsa dan mempermudah pertukaran budaya, agama, dan teknologi di seluruh wilayahnya.

Selain itu, Jazirah Arab dihuni oleh beragam suku yang hidup dalam struktur masyarakat yang berbasis pada kabilah atau klan. Setiap suku biasanya memiliki sistem sosial dan hukum adat sendiri. Mereka membentuk komunitas yang disebut *hayy*, yang berkembang menjadi *qawm* dan selanjutnya menjadi kabilah besar. Hubungan di antara suku-suku ini awalnya didominasi oleh persaingan, namun pada masa awal Islam, suku-suku di wilayah tersebut mulai bersatu di bawah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengubah struktur sosial Arab menuju sistem yang lebih terorganisir dan berorientasi pada keadilan.⁷⁹

⁷⁹ Badawi, Mustafa. *Arab Society and Civilization: Pre-Islamic and Islamic Social Structure*. Journal of Arabian Studies, Vol. 4, 2021, pp. 35-48.

Konstitusi Awal serta Sistem Pemerintahan yang Ditetapkan oleh Abdul Aziz.

Tujuan nasional negara Arab menurut penguasa kerajaan Arab Saudi didefinisikan dalam sketsa urusan dinasti Al Saud. Walaupun Arab Saudi mengikuti institusionalisasi politik yang ada di birokrasi kekuasaannya, namun gayanya masih bersifat kesukuan dan personal. Syura yang dikenal sebagai terobosan demokrasi Barat atau Demokrasi Badui tak lain hanyalah persatuan pangeran dari Dinasti Al Saud dan juga para ulama Wahhabi. Menurut Fred Haliday, wajah institusi politik seperti itu tidak memberikan penjelasan mengenai karakter negara modern. Penyelidikan antropologi memberi petunjuk bahwa struktur sosial yang ada di Jazirah Arab selama ratusan tahun dilandaskan pada pemusatan suku pada aktivitas warga Arab.

Kumpulan orang dari berbagai wilayah kekuasaan yang mereka kuasai, dan keperluan ekonomi mereka disupport oleh hubungan kekeluargaan. Loyalitas politik anggota kepada ketua akan mendapat keamanan fisik dan ekonomi serta status sosial. Namun suatu suku tidak membentuk suatu tatanan yang monolitik melainkan dibagi menjadi unit-unit kecil seperti: keluarga, marga, dan faksi yang lebih luas. Kekompakan kolektif (ashabiyah) diwujudkan dengan kohesi militer dan ekonomi. Pola ini masih berjalan sampai saat ini dalam rangka yang lebih terstuktur dan lebih besar dengan

mayoritas suku Al Saud terhadap suku-suku lain di Arab Saudi.⁸⁰

Peran penting Arab Saudi dalam pengembangan agama Islam

Arab Saudi, sebagai tempat lahirnya Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan agama ini. Beberapa peran utama Arab Saudi dalam perkembangan Islam adalah sebagai berikut⁸¹ :

- a. **Sebagai tempat lahirnya Islam:** Mekah dan Madinah tidak hanya menjadi tempat kelahiran Islam, tetapi juga menjadi pusat perkembangan agama ini. Kedua kota ini berhasil menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, menjadi titik awal penyebaran dakwah Nabi Muhammad SAW.
- b. **Pusat ilmu pengetahuan Islam:** Arab Saudi, khususnya Mekah, telah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam sejak zaman klasik hingga zaman modern. Banyak ulama besar dari berbagai mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal, Imam Nawawi, Ibn Qayyim, Ibnu Hajar Al-Haitami, dan lainnya, belajar dan mengajarkan ilmu agama di Mekah. Mekah menjadi tempat pendidikan penting bagi umat Islam yang ingin mendalami ilmu agama.

⁸⁰ Purkon Hidayat, 'Watak Politik Dan Diplomasi API Arab Saudi Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES)', *Jurnal Review Politik*, 05.2 (2015), 279–92.

⁸¹ Abdullah. "Dinamika Islam di Arab Saudi". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* vol.4 no 1, Juni 2019. Hal. 166-167

- c. **Tempat lahirnya konstitusi negara:** Madinah adalah tempat lahirnya Piagam Madinah (Mitsaq Madinah), yang dikenal sebagai konstitusi pertama di dunia. Piagam ini mencatat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antarwarga negara, hak-hak individu, dan tata pemerintahan yang adil. Hal ini menunjukkan peran Madinah dalam pembentukan sistem pemerintahan yang berbasis pada ajaran Islam.
- d. **Gerakan Wahhabi:** Lahirnya tokoh Muhammad Ibn ‘Abdul Wahhab di Arab Saudi memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam. Melalui gerakan Wahhabi, yang berfokus pada pemurnian akidah Islam dari berbagai praktik bid'ah dan penyimpangan, Arab Saudi berjasa dalam mengembalikan ajaran Islam kepada sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta mengajak umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip Salafi.
- e. **Bantuan ekonomi bagi dunia Islam:** Arab Saudi memberikan bantuan ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara Muslim di seluruh dunia. Sebagai negara dengan sumber daya minyak yang melimpah, Arab Saudi telah banyak berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam melalui sumbangan dan investasi di berbagai sektor.
- f. **Tempat ibadah haji:** Mekah menjadi tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia saat melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Setiap tahun, jutaan Muslim datang ke Mekah untuk menunaikan haji,

menjadikan kota ini sebagai pusat spiritual bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia.

Dengan semua peran penting ini, Arab Saudi tidak hanya menjadi tempat lahirnya Islam, tetapi juga menjadi pusat pengembangan agama ini di seluruh dunia.⁸²

⁸² Sholawati Sholawati, 'Sejarah Pendidikan Dan Dakwah Islam Pada Masa Arab Modern', *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah* (*JASIKA*), 1.1 (2021), 54–63
<<https://doi.org/10.18196/jasika.v1i1.5>>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Dinamika Islam di Arab Saudi”. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari vol.4 no 1, Juni 2019. Hal. 166-167
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Ustmaniyah*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)
- Badawi, Mustafa. *Arab Society and Civilization: Pre- Islamic and Islamic Social Structure*. Journal of Arabian Studies, Vol. 4, 2021, pp. 35-48.
- Bernard Lewis, *Krisis Islam antara Jihad dan Teror yang Keji*, Terj. Ahmad Lukman, (Jakarta: Ina Publikatama, 2004)
- Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Makalah Sejarah Raja Abdul Aziz*, Terj. Muslih Karim., dkk, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh KSA, 1999)
- Hidayat, Purkon, ‘Watak Politik Dan Diplomasi API Arab Saudi Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES)’, *Jurnal Review Politik*, 05.2 (2015), 279–92
- M. Nasihudin Ali, ‘Diktat Sejarah Sosial Islam’, 2022 Murofikoh, Dede Ika, Dini Inasyah Alfaridah, and Novita
- Novita, ‘Perbandingan Ideologi Negara Indonesia Dengan Arab Saudi’, *JHHWS: Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1.2 (2022), 188–96
<<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/issue/view/109>>
- Pamungkas, Arif, ‘Kerajaan Saudi Arabia Deskripsi Historis Tentang Pergulatan Sosial-Politik (1902- 1932M)’, *UIN Sunan*

Kalijaga, 2009

Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014)

Ridwan, Samsul Bahri Hasibuan, Usman Supendi, and Ajid Thohir, 'Gerakan Wahhabiyah Dan Abdul Aziz Al-Saud Dalam Pembentukan Dinasti Saudi Periode Ketiga (Emirato Riyadh 1901-1932 M)', *AL- AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7.1 (2024), 521–32
<<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.827.The>>

Sholawati, Sholawati, 'Sejarah Pendidikan Dan Dakwah Islam Pada Masa Arab Modern', *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhmadiyah (JASIKA)*, 1.1 (2021), 54–

63 <<https://doi.org/10.18196/jasika.v1i1.5>> Syahidah, Izmi, *Gerakan Wahhabi Dan Keluarga Saud*

Dalam Upaya Mendirikan Kerajaan Saudi Arabia, 2017

The University of Calgary. "Saudi Arabia: Ibn Saud and the Third Saudi State." Diakses 7 November 2024.

Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab. "Demokrasi Dalam Pemikiran Politik: Negara Arab Saudi." Diakses 7 November 2024.

Wahyuddin, Imam, 'Perkembangan Islam Arab Saudi',

Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 10.2 (2018), 423–41
<<https://doi.org/10.32489/tasamuh.45>>

Proklamasi Kerajaan Arab Saudi (1932)

Oleh : Farij Ardani

Awal Berdiri Kerajaan Arab Saudi

Sejarah berdirinya Kerajaan Arab Saudi bermula dari latar belakang wilayah Semenanjung Arab yang sudah lama menjadi persimpangan berbagai peradaban. Wilayah ini terkenal sebagai tempat lahirnya agama Islam pada abad ke-7, yang memberikan nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam di seluruh dunia.⁸³ Dua kota suci, Mekkah dan Madinah, terletak di sini, menjadikannya pusat perhatian bagi jutaan peziarah Muslim setiap tahunnya. Namun, terlepas dari status spiritualnya, Semenanjung Arab juga memiliki sejarah panjang konflik dan perpecahan.

Sebelum terbentuknya Kerajaan Arab Saudi, wilayah ini terdiri dari berbagai kesultanan, kerajaan kecil, dan suku-suku yang sering kali bersaing dan terlibat dalam peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Suku-suku di Semenanjung Arab umumnya hidup nomaden, memiliki identitas dan tradisi yang kuat, serta menjunjung tinggi kehormatan dan kekuatan suku. Perebutan kekuasaan di antara suku-suku ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berlangsung selama berabad-abad. Setiap suku atau kelompok pemimpin sering berusaha menguasai daerah tertentu, namun sulit bagi satu suku untuk mempersatukan seluruh wilayah Semenanjung Arab.

⁸³ Nor Habibah, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Masa Kenabian', *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 6.3 (2022) <<https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13231>>.

Tokoh yang akhirnya berhasil menyatukan Semenanjung Arab adalah Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud, atau lebih dikenal sebagai Ibn Saud.⁸⁴ Lahir pada tahun 1876 di Riyadh, Ibn Saud berasal dari keluarga Al Saud yang merupakan salah satu keluarga berpengaruh di kawasan tersebut. Pada awal abad ke-20, setelah hidup dalam pengasingan akibat kalah dari musuh-musuhnya, Ibn Saud kembali merebut kota Riyadh pada tahun 1902. Momen ini menjadi awal kebangkitan kekuatan Al Saud.

Ibn Saud menjalankan strategi militer dan diplomasi yang sangat hati-hati dalam misinya menyatukan wilayah-wilayah di Semenanjung Arab. Selain menggunakan kekuatan militer untuk merebut wilayah strategis, ia juga menjalin persekutuan dengan suku-suku Bedouin yang kuat. Bedouin adalah suku pengembara yang memiliki pengetahuan mendalam tentang medan dan taktik bertahan hidup di padang pasir, sehingga menjadi kekuatan penting dalam pasukan Ibn Saud. Ia juga berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok agama yang mendukung misi penyebaran Islam dan stabilitas di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan yang sistematis dan dukungan dari suku-suku utama, Ibn Saud berhasil menguasai berbagai wilayah penting, termasuk Riyadh, Mekkah, dan Madinah. Penguasaan terhadap Mekkah dan Madinah memperkuat legitimasi Ibn Saud sebagai pemimpin Islam di wilayah tersebut. Akhirnya, pada tahun 1932, Ibn Saud

⁸⁴ Daffa Agussandy Ikhsan, Ida Putri, and Zakiya Darojat, 'Reformasi Arab Saudi Di Masa Kepemimpinan Faisal Bin Abdul Aziz (1964-1975)', *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/10.15408/sh.v2i1.29703>>.

memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi, yang mencakup sebagian besar wilayah Semenanjung Arab.

Pada 23 September 1932, Ibn Saud mengumumkan berdirinya negara baru bernama Kerajaan Arab Saudi. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah karena berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah dan sering berkonflik. Kini, Kerajaan Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara berpengaruh di kawasan Timur Tengah.⁸⁵

Awal Perjuangan Dinasti Saud

Awal perjuangan Dinasti Saud bermula pada tahun 1902 ketika Abdulaziz bin Saud, yang juga dikenal sebagai Ibn Saud, berhasil merebut kembali kota Riyadh dari dinasti Rashid. Peristiwa ini tidak hanya menandai kembalinya kekuasaan Dinasti Saud, tetapi juga menjadi titik balik yang penting dalam sejarah politik di Semenanjung Arab. Dengan menguasai Riyadh, Ibn Saud membangun kembali pusat kekuatan dan memulai upaya konsolidasi untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah strategis lainnya di seluruh kawasan.⁸⁶

Keberhasilan merebut Riyadh memberi Ibn Saud pijakan yang kuat untuk melancarkan ekspansi. Selama lebih dari dua dekade berikutnya, tepatnya dalam kurun

⁸⁵ Ridwan and others, 'Gerakan Wahhabiyah Dan Abdul Aziz Al-Saud Dalam Pembentukan Dinasti Saudi Periode Ketiga (Emirat Riyadh 1901-1932 M)', 7.1 (2024), 521–32 <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.827.The>>.

⁸⁶ NUR MUH. WILDAN FU, *Krisis Hubungan Bilateral Qatar – Arab Saudi Pada 2017*, 2018.

waktu 23 tahun, ia menggunakan kombinasi kekuatan militer dan strategi diplomasi untuk memperluas kendalanya. Salah satu kunci kesuksesan ekspansinya adalah kemampuannya membangun aliansi yang solid dengan berbagai suku setempat. Ibn Saud sangat memahami pentingnya dukungan dari pemimpin-pemimpin suku yang memiliki otoritas dan pengaruh kuat di kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian, aliansi yang dibangunnya tidak hanya menambah kekuatan militer secara langsung, tetapi juga memperkuat legitimasi politiknya di mata para penduduk setempat.

Dalam perjuangan ini, Ibn Saud mengadopsi pendekatan yang cerdas dan bijaksana. Ia tidak selalu mengandalkan peperangan, tetapi sering kali mengutamakan pendekatan damai dan negosiasi untuk mendapatkan dukungan. Selain menawarkan aliansi, Ibn Saud juga menggunakan ikatan perkawinan politik untuk memperkuat hubungan dengan keluarga-keluarga penguasa dari berbagai suku. Strategi ini memungkinkannya tidak hanya meraih dukungan, tetapi juga mengurangi potensi ancaman dari suku-suku yang sebelumnya mungkin menjadi lawannya.

Pada akhirnya, melalui perpaduan antara kekuatan militer, diplomasi, dan hubungan kekeluargaan, Ibn Saud berhasil membangun fondasi negara yang kelak akan dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi. Prestasinya dalam mempersatukan wilayah-wilayah yang awalnya terpecah-pecah di Semenanjung Arab menjadi satu kesatuan di bawah kekuasaan Dinasti Saud, telah menciptakan sejarah besar yang mengubah peta politik di Timur Tengah.

Pada tahun 1925, Ibn Saud berhasil menguasai wilayah Hijaz, termasuk kota-kota suci Mekkah dan Madinah. Keberhasilan ini memberikan kekuatan besar bagi Ibn Saud, karena Mekkah dan Madinah adalah pusat agama Islam.⁸⁷ Dengan menguasai kedua kota ini, Ibn Saud tidak hanya diakui sebagai penguasa wilayah, tetapi juga mendapat legitimasi sebagai pemimpin dalam dunia Islam. Hal ini membuatnya dihormati, tidak hanya sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam keagamaan. Dukungan dari para pemimpin agama dan suku-suku setempat semakin memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang sah dan dihormati.

Pendirian Kerajaan Hijaz dan Nejd (1926–1932)

Pada Januari 1926, setelah berhasil merebut kota-kota suci Mekkah dan Madinah, Ibn Saud mengumumkan dirinya sebagai penguasa wilayah Hijaz. Dengan ini, ia mendirikan Kerajaan Hijaz dan Nejd, yang dipimpinnya sebagai dua wilayah yang digabungkan namun masih memiliki pengelolaan terpisah. Untuk menguatkan posisinya, Ibn Saud melakukan upaya diplomasi yang berhasil mendapatkan pengakuan internasional, termasuk dari Inggris yang memiliki pengaruh kuat di wilayah sekitarnya. Perjanjian dengan Inggris ini menjadi sangat penting karena memberi pengakuan resmi kepada Ibn Saud sebagai penguasa yang sah di Semenanjung Arab.⁸⁸

⁸⁷ A Hasyim, *Kritik Terhadap Teologi Wahabiyyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Said Aqil Siradj*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49955>>.

⁸⁸ Nina Wonsela, 'Kontribusi Kaum Paderi Dalam Modernisasi Pendidikan Di Minangkabau Abad XVII – Awal Program Magister

Namun, kebijakan Ibn Saud tidak disetujui oleh semua pihak dalam lingkarannya. Salah satu kelompok yang tidak setuju adalah Ikhwan, kelompok militan yang awalnya menjadi sekutu kuat Ibn Saud dalam proses ekspansi dan penaklukan wilayah. Ikhwan merupakan kelompok yang sangat setia pada ajaran Wahhabisme dan bercita-cita untuk menyebarkan pemahaman ini ke berbagai wilayah di Semenanjung Arab, serta ke daerah-daerah sekitarnya seperti Transyordania, Irak, dan Kuwait yang berada di bawah pengaruh dan perlindungan Inggris. Para pemimpin Ikhwan, termasuk Faisal al-Duwaish, menentang perjanjian Ibn Saud dengan Inggris, yang mereka anggap bertentangan dengan visi mereka untuk memperluas pengaruh ajaran Wahhabisme ke wilayah-wilayah tersebut.

Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam sebuah konflik besar yang dikenal sebagai Pemberontakan Ikhwan. Konflik ini terjadi ketika kelompok Ikhwan berusaha menentang kebijakan Ibn Saud dan melanjutkan ekspansi sesuai dengan pandangan ideologis mereka. Pemberontakan ini menimbulkan ketidakstabilan internal yang serius, karena Ikhwan tidak hanya sekadar berperang untuk memperluas wilayah, tetapi juga berusaha menggeser kebijakan politik Ibn Saud yang dianggap terlalu kompromistis dengan kekuatan asing, terutama Inggris.

Konflik yang berlangsung ini mencapai puncaknya pada Pertempuran Sabilla pada tahun 1929.

Dalam pertempuran ini, Ibn Saud mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadapi Ikhwan dan memastikan kendali atas wilayahnya tanpa ada ancaman internal dari kelompok tersebut. Pertempuran Sabilla berakhir dengan kemenangan bagi Ibn Saud, dan kekalahan Ikhwan mengakhiri pemberontakan mereka serta mengukuhkan otoritas Ibn Saud secara penuh. Kemenangan ini menjadi simbol keberhasilan Ibn Saud dalam memadukan kekuatan militer dengan strategi diplomasi yang matang, yang tidak hanya memantapkan posisinya di Semenanjung Arab, tetapi juga memastikan bahwa ia memiliki kendali penuh atas pemerintahan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang menentang kebijakannya.

Dengan berakhirnya pemberontakan ini, Ibn Saud mampu menyatukan berbagai wilayah dan kelompok yang sebelumnya terpecah, menyiapkan jalan bagi pembentukan Kerajaan Arab Saudi secara resmi pada tahun 1932. Pemberontakan Ikhwan menjadi pelajaran penting bagi Ibn Saud mengenai perlunya keseimbangan antara menjaga otoritas negara dan mengelola keberagaman ideologi di kalangan pendukungnya, sehingga kelak ia dapat membangun negara yang lebih stabil di tengah tantangan regional dan internasional.

Proklamasi Kerajaan Arab Saudi (23 September 1932)

Pada awal abad ke-20, Semenanjung Arab terdiri dari berbagai wilayah dan suku yang sering kali memiliki pemimpin dan pemerintahan sendiri. Salah satu pemimpin

yang paling berpengaruh pada masa itu adalah Ibn Saud, seorang pemimpin dari suku Saud yang bercita-cita menyatukan wilayah-wilayah di Semenanjung Arab menjadi satu negara yang kuat dan berdaulat.⁸⁹ Perjalanan menuju penyatuan ini bukanlah hal yang mudah; banyak tantangan yang harus dihadapinya, mulai dari konflik antar suku, persaingan politik, hingga pemberontakan besar oleh kelompok Ikhwan.

Ikhwan adalah kelompok yang awalnya mendukung Ibn Saud dalam upaya menyebarkan pengaruhnya di Semenanjung Arab, namun mereka kemudian menentangnya karena perbedaan pandangan dan keyakinan.⁹⁰ Ibn Saud menyadari bahwa untuk mencapai mimpinya membentuk sebuah negara yang kuat dan bersatu, ia harus menghadapi pemberontakan Ikhwan. Dengan strategi yang matang dan keahlian dalam bernegosiasi, Ibn Saud berhasil mengatasi perlawanan kelompok ini dan mengamankan posisinya sebagai penguasa yang kuat di Semenanjung Arab. Setelah berhasil mengatasi Ikhwan, Ibn Saud fokus memperkuat kendalinya atas wilayah yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Langkah ini penting untuk mempersiapkan langkah selanjutnya, yaitu menyatukan semua wilayah tersebut dalam satu negara.

Pada saat itu, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Ibn Saud disebut “Kerajaan Hijaz dan Nejd,”

⁸⁹ Imam Wahyuddin, ‘Perkembangan Islam Arab Saudi’, *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018), 423–41 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.81>>.

⁹⁰ Izmi Syahidah, *Gerakan Wahhabi Dan Keluarga Saud Dalam Upaya Mendirikan Kerajaan Saudi Arabia*, 2017.

yang mencakup beberapa kota besar seperti Mekkah, Madinah, Riyadh, dan Jeddah.⁹¹ Ibn Saud merasa bahwa sudah saatnya wilayah-wilayah ini diintegrasikan dalam satu negara yang memiliki identitas dan nama yang baru. Keinginan Ibn Saud untuk menyatukan wilayah-wilayah tersebut bukan hanya didasari oleh ambisi pribadi, tetapi juga keinginannya untuk membentuk negara yang kokoh dengan landasan Islam. Dengan menyatukan seluruh wilayah di bawah satu nama, ia berharap dapat menciptakan persatuan yang lebih kuat di antara penduduknya, yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan daerah.

Pada tanggal 23 September 1932, Ibn Saud secara resmi memproklamasikan berdirinya negara baru bernama “Kerajaan Arab Saudi”.⁹² Ini adalah langkah besar yang menandai awal terbentuknya sebuah negara yang bersatu. Pengumuman penting ini disampaikan oleh Pangeran Faisal, putra Ibn Saud, dari Istana al-Hamidiyah yang terletak di kota suci Mekkah. Dalam pengumuman tersebut, Pangeran Faisal menyampaikan pesan penting bahwa wilayah Hijaz dan Nejd, yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, kini digabungkan menjadi satu negara bernama Kerajaan Arab Saudi. Penggantian nama ini memiliki makna mendalam karena mencerminkan visi

⁹¹ Bujang Ruslan and others, ‘Sejarah Dan Perbandingan Pendidikan Negara Brazil Dan Saudi Arabia’, *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5.1 (2022), 112–27 <<https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.4012>>.

⁹² Zakiyah salsabila, ‘Hukum Keluarga Di Arab Saudi’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.November (2017), 5–24.

besar Ibn Saud dalam menyatukan wilayah-wilayah tersebut dan membentuk satu identitas nasional yang kuat.

Pengumuman proklamasi ini tidak terjadi begitu saja. Beberapa hari sebelumnya, Raja Abdulaziz (Ibn Saud) telah mengeluarkan keputusan resmi untuk menyatukan wilayah-wilayah tersebut menjadi satu negara.⁹³ Keputusan tersebut dituangkan dalam Dekrit Kerajaan No. 2716, yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 1932. Dekrit ini menyatakan bahwa wilayah Hijaz dan Nejd serta wilayah-wilayah lain di bawah kekuasaan Ibn Saud kini secara resmi bersatu dalam satu negara bernama Kerajaan Arab Saudi. Keputusan ini merupakan titik puncak dari usaha panjang yang dilakukan oleh Ibn Saud untuk menyatukan seluruh wilayah di Semenanjung Arab di bawah satu pemerintahan.

Upacara proklamasi dilangsungkan di Istana al-Hamidiyah di Mekkah. Dalam upacara tersebut, hadir beberapa tokoh penting yang turut serta dalam proses pembentukan negara baru ini, termasuk Pangeran Faisal yang mewakili Raja Abdulaziz. Selain Pangeran Faisal, tokoh lain yang hadir adalah Fuad Hamza dan Abdullah al-Fadl, yang merupakan penasihat-penasihat terpercaya Raja Abdulaziz. Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa hormat terhadap sejarah yang sedang tercipta.

Sebagai bagian dari perayaan yang menggambarkan pentingnya momen tersebut, upacara

⁹³ Guru Besar and others, 'Sejarah Politik Islam Modern Prof. Dr. Amany Lubis, Ma', 2018.

proklamasi diakhiri dengan 101 tembakan meriam yang menghiasi langit Mekkah. Tembakan meriam ini bukan hanya sekadar tanda perayaan, tetapi juga simbol dari kekuatan dan semangat persatuan yang baru terbentuk. Ini adalah saat di mana seluruh wilayah Semenanjung Arab secara resmi menjadi satu negara yang bersatu, dengan Ibn Saud sebagai rajanya.

Hari proklamasi, yaitu 23 September, kemudian menjadi hari yang sangat penting dalam sejarah Arab Saudi. Tanggal ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Nasional Arab Saudi, hari di mana rakyat Saudi mengenang perjuangan panjang yang dilakukan oleh pendiri negara mereka, Ibn Saud, dalam menyatukan wilayah-wilayah yang terpisah menjadi satu negara yang berdaulat.⁹⁴ Penyatuan ini juga membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Ibn Saud, Arab Saudi mulai berkembang menjadi negara yang lebih modern dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam sebagai dasar pemerintahan dan kehidupan masyarakat.⁹⁵

Keputusan untuk membentuk Kerajaan Arab Saudi bukan hanya sebuah langkah politik, tetapi juga menjadi simbol dari penyatuan dan identitas bersama bagi seluruh rakyat Saudi. Bagi banyak orang, hal ini memberikan rasa kebanggaan dan rasa memiliki terhadap

⁹⁴ Abdurrahmansyah, *Perbandingan Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan Dan Implementasi)*, 2021.

⁹⁵ M Syaifuddin, 'Pemikiran Manajemen Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaurasyidin', *Hikamatzu/ Journal of Multidisciplinary*, 3.1 (2024), 1–10

<<https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/49%0Ahttps://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/download/49/42>>.

negara mereka. Visi besar Ibn Saud yang diwujudkan melalui penyatuan wilayah ini menjadi cikal bakal bagi Arab Saudi sebagai negara yang kita kenal sekarang, sebuah negara yang kuat dan berpengaruh di Timur Tengah dan dunia Islam.

Dengan demikian, proklamasi berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada 23 September 1932 bukan hanya menandai berdirinya sebuah negara baru, tetapi juga menandakan terwujudnya sebuah impian besar untuk menyatukan seluruh wilayah di Semenanjung Arab dalam satu kesatuan yang kuat.

Dekrit Kerajaan No. 2716 yang dikeluarkan oleh Raja Abdulaziz pada 18 September 1932 adalah langkah penting yang menjadi dasar pembentukan Kerajaan Arab Saudi. Dekrit ini berisi aturan dan keputusan penting untuk menyatukan dan mengatur wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah. Berikut adalah poin-poin utama dalam dekrit tersebut:

1. Nama Baru Negara: Dalam dekrit ini, Raja Abdulaziz mengganti nama negara dari Kerajaan Hijaz dan Nejd beserta wilayah-wilayah kekuasaannya menjadi Kerajaan Arab Saudi. Nama baru ini menandakan penyatuan seluruh wilayah di bawah satu bendera.

2. Sistem Pemerintahan Baru: Meskipun ada perubahan besar dalam nama negara, Raja Abdulaziz menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Hijaz dan Nejd akan tetap berlaku untuk sementara waktu. Sistem pemerintahan baru akan diperkenalkan setelah konstitusi baru selesai disusun, yang akan menjadi dasar hukum bagi negara baru ini.

3. Perjanjian Internasional: Raja Abdulaziz juga menjamin bahwa perubahan nama negara ini tidak akan mempengaruhi perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya. Semua perjanjian yang sudah ada akan tetap dihormati, menunjukkan bahwa Arab Saudi tetap ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain.

4. Penyusunan Konstitusi Baru: Dekrit ini meminta Dewan Menteri untuk segera mulai menyusun konstitusi yang akan menjadi dasar hukum pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Konstitusi ini akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang teratur dan terpusat.

Dekrit ini sangat penting karena menjadi dasar bagi terbentuknya negara modern Arab Saudi dengan pemerintahan yang lebih teratur dan terpusat. Selain itu, dekrit ini juga menunjukkan niat Raja Abdulaziz untuk membangun negara yang kuat dan siap menjalankan perannya di kancah internasional.

a. Dampak Proklamasi bagi Timur Tengah dan Dunia Islam

Proklamasi berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 merupakan titik awal perubahan besar bagi kawasan Timur Tengah dan dunia Islam. Sebagai negara yang lahir dari penyatuan wilayah-wilayah utama di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Abdulaziz bin Saud atau Ibn Saud, Arab Saudi segera menempati posisi yang sangat penting dalam politik dan keagamaan. Dengan posisi strategis sebagai penjaga dua kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah, Arab Saudi

mendapatkan tempat istimewa dan dihormati dalam berbagai isu keagamaan dan sosial di kalangan umat Islam. Kedudukan ini menjadikan Arab Saudi pusat perhatian dunia Islam dan memberikan negara ini tanggung jawab besar sebagai pelindung situs-situs keagamaan yang suci.

Tak lama setelah proklamasi, Arab Saudi menemukan cadangan minyak yang melimpah di wilayahnya, suatu penemuan yang menjadi titik balik besar dalam sejarah negara tersebut. Penemuan minyak yang pertama kali dieksplorasi pada tahun 1938 oleh perusahaan minyak asing, yang kemudian diambil alih oleh Saudi Aramco, membuka jalan bagi transformasi ekonomi besar-besaran. Minyak dengan cepat menjadi sumber pendapatan utama Arab Saudi, yang tidak hanya mengangkat perekonomian negara tetapi juga menjadikan Arab Saudi salah satu negara terkaya di Timur Tengah.⁹⁶ Penghasilan besar dari minyak memungkinkan pemerintah Saudi untuk membangun infrastruktur modern, meningkatkan standar hidup rakyatnya, dan mengembangkan sektor-sektor penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kekayaan minyak ini memberi Arab Saudi pengaruh yang semakin besar di kawasan Timur Tengah dan di dunia internasional, menjadikannya salah satu pemain utama dalam politik global.

⁹⁶ Andi Ismira and others, 'Kerjasama Perdagangan Minyak China Arab Saudi Di Tengah Politik Pemotongan Produksi Minyak Opec', *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2.2 (2022), 1–11 <<https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.52>>.

Di bidang politik, Arab Saudi memperkuat posisinya sebagai negara yang berpengaruh melalui partisipasinya dalam berbagai organisasi internasional. Sebagai anggota pendiri Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Arab Saudi memainkan peran aktif dalam diplomasi regional dan internasional, khususnya di kalangan negara-negara Islam. Liga Arab memberi Arab Saudi platform untuk memperjuangkan isu-isu penting yang memengaruhi kawasan Arab, sementara OKI memungkinkan negara ini untuk berperan dalam menyatukan suara dunia Islam, memperjuangkan kepentingan umat Muslim di berbagai belahan dunia, dan menjadi juru bicara untuk isu-isu keagamaan di tingkat global.⁹⁷

Kepemimpinan Raja Abdulaziz kemudian dilanjutkan oleh penerus-penerusnya yang mengambil langkah-langkah reformasi untuk memperkuat posisi Arab Saudi sebagai kekuatan politik dan ekonomi yang berpengaruh. Setelah Raja Abdulaziz wafat, para penerusnya berupaya untuk melanjutkan visi dan misi yang telah dicanangkannya. Di bawah kepemimpinan Raja Saud, Raja Faisal, dan raja-raja berikutnya, Arab Saudi mengalami perkembangan signifikan dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Masing-masing pemimpin ini melakukan reformasi yang berfokus pada modernisasi negara, meski tetap berupaya menjaga nilai-nilai Islam yang menjadi dasar negara.

⁹⁷ Assyiffah Aulia and Ali Noer Zaman, 'Kepentingan Arab Saudi Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023', *HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1.2 (2024), 276–98 <<https://doi.org/10.62180/699ehk90>>.

Selain transformasi ekonomi yang didukung oleh kekayaan minyak, pemerintah Arab Saudi juga mengalokasikan sumber daya untuk membangun infrastruktur fisik dan sosial. Berbagai proyek pembangunan, seperti bandara internasional, jalan raya, dan pelabuhan, dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Sementara itu, dalam bidang sosial, Arab Saudi melakukan modernisasi pendidikan dan layanan kesehatan serta memperluas akses terhadap pendidikan bagi rakyatnya, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Seiring waktu, negara ini juga memperkenalkan perubahan sosial yang bertujuan untuk merespons tuntutan era modern.

Di sisi lain, sebagai penjaga dua kota suci, Mekkah dan Madinah, Arab Saudi terus memperkuat identitasnya sebagai pemimpin spiritual di dunia Islam. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, yang menjadikan Arab Saudi pusat perhatian dan penghormatan bagi umat Islam. Pemerintah Arab Saudi menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun dan memperluas infrastruktur di Mekkah dan Madinah, termasuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang modern untuk menampung semakin banyak jemaah.⁹⁸ Ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah

⁹⁸ A Anwar, *Kerjasama Ekonomi Arab Saudi-Indonesia Dalam Bidang Investasi Dan Perdagangan*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2022 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA ANWAR.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA%20ANWAR.FISIP.pdf)>.

umat Islam, yang semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang dihormati di dunia Islam.

Dengan berdirinya sebagai negara yang bersatu dan berdaulat, Arab Saudi di bawah pimpinan Ibn Saud telah membangun fondasi yang kuat bagi bangsa dan pemerintahannya. Meski dihadapkan pada tantangan-tantangan besar seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan perubahan sosial, transformasi yang terjadi di Arab Saudi sejak proklamasi pada 1932 telah membawa negara ini menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Timur Tengah. Perubahan-perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial, terutama setelah ditemukan cadangan minyak, menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara paling berpengaruh di kawasan ini dan di dunia Islam.

Kini, Arab Saudi tetap menjadi kekuatan besar yang memainkan peran penting tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga dalam hubungan internasional yang lebih luas. Negara ini terus berupaya memperkuat posisinya di panggung internasional, menjaga stabilitas politik di kawasan, dan melanjutkan komitmennya sebagai penjaga dua kota suci umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, *Perbandingan Pendidikan Islam (Isu- Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan Dan Implementasi)*, 2021
- Andi Ismira, Yulia Gitra, Riady Ibnu Khaldun, and Sriwiyata Ismail, 'Kerjasama Perdagangan Minyak China Arab Saudi Di Tengah Politik Pemotongan Produksi Minyak Opec', *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2.2 (2022), 1–11
<<https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.52>>
- Anwar, A, *Kerjasama Ekonomi Arab Saudi-Indonesia Dalam Bidang Investasi Dan Perdagangan*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA ANWAR.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA%20ANWAR.FISIP.pdf)
- Aulia, Assyiffah, and Ali Noer Zaman, 'Kepentingan Arab Saudi Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023', *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1.2 (2024), 276–98
<<https://doi.org/10.62180/699ehk90>>
- Besar, Guru, Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Pusat Penelitian, and Dan Penerbitan, 'Sejarah Politik Islam Modern Prof. Dr. Amany Lubis, Ma', 2018
- FU, NUR MUH. WILDAN, *Krisis Hubungan Bilateral Qatar – Arab Saudi Pada 2017*, 2018
- Habibah, Nor, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Masa Kenabian', *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 6.3 (2022)
<<https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13231>>
- Hasyim, A, *Kritik Terhadap Teologi Wahabiyyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Said Aqil Siradj*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*,

2019

<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49955>>

Ikhsan, Daffa Agussandy, Ida Putri, and Zakiya Darajat, 'Reformasi Arab Saudi Di Masa Kepemimpinan Faisal Bin Abdul Aziz (1964-1975)', *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/10.15408/sh.v2i1.29703>>

Ridwan, Samsul Bahri Hasibuan, Usman Supendi, and Ajid Thohir, 'Gerakan Wahhabiyah Dan Abdul Aziz Al-Saud Dalam Pembentukan Dinasti Saudi Periode Ketiga (Emirat Riyadh 1901-1932 M)', 7.1 (2024), 521–32<<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.827.The>>

Ruslan, Bujang, Fadli Afriansyah, Hery Noer Aly, Zulkarnain Zulkarnain, and Ismail Ismail, 'Sejarah Dan Perbandingan Pendidikan Negara Brazil Dan Saudi Arabia', *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5.1 (2022), 112–27<<https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.4012>>

Syahidah, Izmi, *Gerakan Wahhabi Dan Keluarga Saud Dalam Upaya Mendirikan Kerajaan Saudi Arabia*, 2017

Syaifuddin, M, 'Pemikiran Manajemen Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaurasyidin', *Hikamatzu/ Journal of Multidisciplinary*, 3.1 (2024), 1–10<<https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/49%0Ahttps://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/download/49/42>>

Wahyuddin, Imam, 'Perkembangan Islam Arab Saudi', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018), 423–41 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.81>>

Wonsela, Nina, 'Kontribusi Kaum Paderi Dalam Modernisasi Pendidikan Di Minangkabau Abad XVII – Awal Program

Magister Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017', 2017, 1–182

Zakiyah salsabila, 'Hukum Keluarga Di Arab Saudi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.November (2017), 5–24

BAB II

ARAB SAUDI DAN ISU-ISU DUNIA ISLAM

Penyusun :

ISyofi Latifah

Nolla Alifa Ramadhani

Chimayah Abadiyah

Maryam Agusti

Peran Arab Saudi dalam OKI

Oleh : Syofi Latifah

Menurut Aristoteles dalam buku karyanya berjudul *La Politika*, dijelaskan bahwa negara merupakan perkumpulan masyarakat dalam jumlah banyak dan tiap-tiap masyarakat dilahirkan mempunyai tujuan untuk hal-hal baik, karena manusia selalu berusaha bersikap untuk mencapai hal-hal yang dianggap baik oleh mereka. Tetapi, apabila seluruh masyarakat mempunyai tujuan hal-hal baik, maka negara atau masyarakat politik mempunyai posisi paling tinggi daripada yang lain dan terdiri dari unsur-unsur penunjang lainnya, serta bertujuan pada hal-hal baik yang paling tinggi⁹⁹. Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa sebuah negara melalui pemerintahannya harus berupaya agar terhindar dari konsekuensi yang dapat merugikan dalam pencapaian tujuan.

Selain itu, negara juga melakukan hubungan dengan negara lain dalam berbagai aspek kerjasama misalnya hubungan politik internasional. Hubungan tersebut dapat terjadi antara negara satu dengan negara lain dengan cara individu ataupun hubungan negara dalam organisasi internasional. Melalui hubungan negara dengan organisasi internasional dapat memunculkan sebuah upaya untuk menyebarluaskan pengaruhnya karena keberadaan dari organisasi internasional tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu negara anggota OKI yaitu Arab Saudi. Terdapat beberapa

⁹⁹ Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles."

peran Arab Saudi yang sangat berpengaruh dalam OKI, diantaranya :

a. Arab Saudi sebagai pemrakarsa utama terbentuknya OKI

Awal mula OKI dibentuk yaitu adanya peristiwa resolusi yang terjadi pada 25 September 1969. Peristiwa tersebut dilaksanakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rabat, Maroko, dan berdasarkan tindakan negara-negara Islam terhadap peristiwa Masjid Al-Aqsa di Palestina dimana peristiwa tersebut adalah pembakaran Masjid. Resolusi tersebut diprakarsai oleh Raja Hassan II dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi¹⁰⁰. Selain itu, OKI juga menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama pada tahun 1970 yang berlokasi di Jeddah dan sekaligus membentuk kesekretariat tetap yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Atas prakarsa dan penggunaan tempat yang merujuk pada negara Arab Saudi, maka Arab Saudi menjadi salah satu negara yang berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan OKI. Hal tersebut membuat kebijakan OKI mengarah pada urusan Arab Saudi dan Arab Saudi juga menghubungkan kebijakan luar negerinya di OKI. Kebijakan luar negeri Arab Saudi bertujuan untuk meluaskan kepentingan nasional, yakni menguatkan aliansi dan menambah kekuatan regional. Diantara Arab Saudi dan Iran, perbedaan paham ideologi Sunni dan paham Syiah secara keterkaitan berperan dalam

¹⁰⁰ Puri and Yumitro, "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penguatan Diplomasi Islam."

pembuatan kebijakan ini yang berkaitan dengan Kawasan Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI)¹⁰¹.

b. Arab Saudi sebagai pendonor finansial terbesar

Sejak tahun 1970, Arab Saudi telah memberikan ideologinya dalam bantuan yang berbentuk materi untuk negara anggota OKI. Bantuan materi itu digunakan untuk kemajuan infrastruktur bagi negara anggota OKI. Selain itu, Arab Saudi juga mendonorkan beasiswa kepada pelajar negara anggota OKI yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi Islam di kawasan Arab Saudi. Selanjutnya dalam perkembangannya, Arab Saudi juga mencoba memberitakan pengaruh ideologinya yaitu gagasan wahabisme¹⁰².

Kantor Sekretaris OKI di Arab Saudi dan *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah juga mendukung program bantuan dana yang diberikan Arab Saudi kepada negara anggota OKI. Dengan adanya pihak pendukung membuat Arab Saudi memiliki peran penting dalam mengontrol lembaga tersebut. Dengan adanya bantuan ini memberikan keuntungan besar bagi Arab Saudi dalam mewujudkan penglihatan dunia di negara anggota OKI yang belum berkembang melalui promosi Islam versi Sunni.

Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tahun 2006, dimana Arab Saudi mendukung visi IDB dalam program

¹⁰¹ Akbarzadeh and Ahmed., "Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)."

¹⁰² Hikmawan and Putri, "Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerja Sama Islam Dalam Menyelesaikan Konflik Iran Dan Arab Saudi Tahun 2013-2018."

pengentasan kemiskinan sebesar US\$1 miliar. Arab Saudi juga telah memberikan dana hingga mencapai US\$ 22,7 Miliar. Dana tersebut diberikan kepada negara Yaman, Mesir, Palestina, Yordania, Oman dan Bahrain. Di samping itu, bersama negara Uni Emirat Arab, Kuwait dan Oman, Arab Saudi juga telah mendonorkan bantuan materi sebesar US\$ 12,5 Miliar kepada Mesir. Dalam kurun waktu terbentuknya OKI hingga tahun 2015 diprediksi bahwa Arab Saudi telah membelanjakan dana sebesar US\$ 130 Miliar untuk kebijakan-kebijakan luar negerinya.

c. Adanya dominasi Struktural dalam kelembagaan OKI

Dominasi Arab Saudi dalam struktural kelembagaan OKI ditunjukkan dengan Arab Saudi khususnya kota Jeddah yang dijadikan tempat sebagai Sekretariat Akademi Fiqh Islam Internasional yang dibentuk pada tahun 1981 berdasarkan kesepakatan dari negara anggota OKI. Lembaga Akademi Fiqh Islam Internasional ini dibentuk mempunyai tujuan untuk memajukan cara berjihad dengan berkelompok yang mempunyai kaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh umat Islam¹⁰³. Dengan dibentuknya Akademi Fiqh Islam Internasional di Arab Saudi, mampu menguatkan legitimasi Arab Saudi dalam cakupan pengetahuan dan yurisprudensi Islam yaitu pengebarluasan Islam versi Arab Saudi.

Letak markas besar Sekretariat Jenderal OKI yang bertempat di Jeddah, mempunyai fungsi untuk mengarahkan berbagai pertemuan dan kegiatan OKI.

¹⁰³ Samuel, *The Oic , The Un , and Counter-Terrorism Law-Making*.

Dalam struktur Sekretariat Jenderal OKI terdapat beberapa staff Sekretaris Jenderal dimana Arab Saudi menduduki Sekretaris Jenderal OKI selama dua periode sejak tahun 2014. Secara implisit, hal tersebut bisa menjadi hak istimewa bagi Arab Saudi untuk memusatkan banyak urusan dan pertemuan dengan negara-negara anggota OKI secara bilateral maupun multilateral¹⁰⁴.

Selain itu, Arab Saudi juga membangun aliansi militer pada tahun 2015 yakni membentuk *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* (IMAFT) atas prakarsa dari Arab Saudi dan memiliki 34 anggota yang termasuk negara anggota OKI¹⁰⁵. Dibentuknya lembaga tersebut mempunyai tujuan untuk memusatkan operasi militer dalam kepentingan membersihkan aksi terorisme di Timur Tengah. Dengan dibentuknya IMAFT, membuat peningkatan eksistensi Arab Saudi untuk mengambil anggota-anggota OKI agar terhubung dalam organisasi anti teroris tersebut. Upaya tersebut membuat Arab Saudi berhasil mengklaim Iran sebagai negara yang mendukung aksi terorisme di Timur Tengah khususnya yang ditujukan kepada Hizbullah¹⁰⁶. Terdapat aliansi lain yang dibuat oleh Arab Saudi yakni membentuk *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* (IMCTC) dengan negara-

¹⁰⁴ Paradisiaca, Yuniasih, and Fadlillah, "Diplomasi Arab Saudi Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Studi Kasus Kontestasi Hegemoni Ideologi Vis-à-Vis Iran Pasca KTT OKI 2016)."

¹⁰⁵ Alghafli, "The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission, and Politics."

¹⁰⁶ Fabian, "The Iran-Saudi Confrontation: Who Will Win in the End?"

negara Muslim di dunia¹⁰⁷. Tujuan dibentuknya aliansi ini yaitu Arab Saudi menginginkan adanya kegiatan utama dalam kebijakan regional dan kebijakan lain untuk menghambat pengaruh Syiah Iran.

d. Adanya diplomasi politik dan ideologi melalui OKI

Arab Saudi melakukan diplomasi politik melalui OKI untuk melawan posisi Iran dan menerima dukungan diplomatik dari negara-negara muslim. Diplomati yang dilakukan Arab Saudi kepada Iran merujuk pada konsep diplomatik dengan *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*. *Soft diplomacy* adalah proses penyelesaian konflik yang dilakukan dengan tenang atau mendatangkan pihak ketiga, misalnya Mahkamah Internasional¹⁰⁸. Penggunaan *soft diplomacy* ini ditujukan untuk mendapatkan keinginan tanpa adanya paksaan. Sedangkan, *Hard Diplomacy* adalah proses penyelesaian konflik dilakukan dengan cara menambah kekuatan militer untuk memberikan dampak jera. Beberapa contoh penggunaan *hard diplomacy* yaitu agresi militer, agresi politik, sanksi ekonomi, dan diplomasi koersif. Penggunaan *hard diplomacy* ini ditujukan untuk memaksa negara lawan agar mematuhi keinginan negara yang melakukan diplomasi ini. Arab Saudi menggunakan konsep *hard diplomacy* kepada Iran dikarenakan perilaku Iran yang dianggap telah merusak persatuan dan rasa solid Islam dengan mendukung terorisme secara terus-menerus serta

¹⁰⁷ Alghafli, "The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission, and Politics."

¹⁰⁸ Prayuda and Sundari, "Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis."

Iran dianggap telah membantu kelompok militan Syiah Houthi yang terus menerus menembakkan rudal ke wilayah Arab Saudi. Di samping itu, bukti lain *hard diplomacy* yang dilakukan Arab Saudi kepada Iran yakni Arab Saudi menolak memberikan visa kepada Iran sehingga perwakilan negara Iran tidak dapat menghadiri pertemuan anggota tetap OKI¹⁰⁹.

Penggunaan *soft diplomacy* yang dilakukan Arab Saudi yaitu dengan memberikan dana dalam jumlah besar untuk OKI dan pernyataan Arab Saudi yang bertujuan untuk membangun opini negara anggota OKI. Secara Implisit berakibat pada pembuatan beberapa kebijakan OKI yang mempunyai tujuan menyudutkan Iran. Disamping itu, penggunaan *hard diplomacy* yang dilakukan Arab Saudi yaitu dengan melakukan pemblokiran Iran dari beberapa KTT OKI yang dilakukan dengan sengaja oleh Arab Saudi. Kedua diplomasi tersebut tidak lepas dari tujuan Arab Saudi yang berusaha mempertahankan ideologi Sunni di kawasan Timur Tengah.

Dengan adanya kebijakan luar negeri Arab Saudi melalui OKI membuat Arab Saudi begitu mudah dalam mencapai kepentingan nasionalnya seperti mengkonsolidasikan aliansi dan memperkuat kekuatan regional. Kebijakan tersebut diantaranya mengenai masalah haji, dimana para ulama Arab Saudi mengklaim bahwa Iran berusaha untuk mempolitisasi haji dan mengalihkannya menjadi kesempatan untuk tidak mematuhi ajaran umat Islam, dengan cara meneriakkan slogan-slogan dan mengganggu keamanan peziarah.

¹⁰⁹ Reuters, "Saudi Arabia Blocks Iran from Islamic Grouping's Meeting: Tehran."

e. Arab Saudi berkomitmen menyelesaikan konflik Israel-Palestina

Arab Saudi menjadi salah satu negara yang sangat membela Palestina dan mengecam serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Selain itu, terdapat negara kawasan Asia Tenggara yang juga terus berkomitmen untuk membela Palestina yaitu Indonesia. Hal ini tercermin ketika Raja Arab Saudi bertemu dengan Wapres Indonesia bersama-sama saling mendukung agar terus membela Palestina dan pemberian bantuan agar dipastikan sampai ke penduduk Palestina. Disamping itu, Arab Saudi juga telah mengadakan KTT Islam Luar Biasa pada November 2023¹¹⁰. KTT ini diadakan karena pemimpin dunia dan regional dianggap gagal dalam mencapai solusi bagaimana menangani penyerangan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1967.

Di samping peran Arab Saudi yang banyak membantu negara anggota OKI, kepentingannya sendiri dalam Timur Tengah tetap yang paling utama untuk dicapai. Kepentingan tersebut yaitu Arab Saudi ingin menjadi negara yang hegemoni di Timur Tengah dan dapat dilihat dari usaha Arab Saudi yang menjadikan OKI sebagai landasan politik dalam mengurangi ideologi-ideologi Iran di Timur Tengah. Arab Saudi telah mengusahakan perbaikan hubungan dengan Iran dengan pendekatan damai. Selain itu, Arab Saudi juga telah memperbaiki hubungan dengan Iran melalui pihak ketiga atau mediator.

¹¹⁰ Harbani, "Saudi Undang Negara OKI Gelar KTT Islam Luar Biasa."

Dengan mendatangkan pihak ketiga, hal tersebut merupakan solusi *soft power* mengenai konflik yang terjadi dengan Iran. Cara mediator tersebut diterima dengan baik oleh pemerintah Iran karena berdasar solidaritas Islam sehingga mengurangi ketegangan antara Arab Saudi dan Iran.

Adanya diplomasi yang dilakukan Arab Saudi dengan Iran melalui OKI menimbulkan beberapa dampak terhadap kontestasi hegemoni ideologi Arab Saudi dan Iran. Dampak kontestasi tersebut diantaranya Iran mengusahakan banyak cara untuk mengalahkan OKI yang menjadi pusat bagi Arab Saudi dalam menyebarkan ideologi dominasinya. Usaha Iran tersebut yakni melalui Muslim Summit atau Kuala Lumpur Summit 2019, The amman Messages, dan Internasionalisasi haji. Selain itu, usaha Iran dalam mengatasi masalah-masalah dunia Muslim yakni isu Palestina, campur tangan negara-negara besar dalam domestik Muslim, dan kebutuhan mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai isu-isu penting negara Muslim¹¹¹. Dampak lain yakni melalui risalah amman dimana dapat memberikan peluang kepada negara-negara lain yang berpaham Syiah, khususnya Iran yang berusaha melemahkan usaha-usaha yang dilakukan Arab Saudi di Timur Tengah. Risalah Amman adalah salah satu *bargaining power* dari Iran yang membuktikan bahwa kelembagaan OKI tidak sepenuhnya didominasi oleh ulama Sunni.

¹¹¹ Republika, "Iran Usung Masalah Palestina Dalam KL Summit."

Penjelasan yang mengarah pada peran Arab Saudi dalam OKI tidak terlepas juga dari permasalahan Arab Saudi dengan Iran. Dimana kedua negara tersebut ingin menjadi negara hegemoni yang menguasai kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, terdapat 2 syarat utama untuk mencapai *balance of power* di suatu kawasan yakni pertama, dari sistem internasional yang tetap anarki. Hal tersebut dapat dilihat dengan terjadinya kontestasi Arab Saudi dan Iran yang bersaing menginginkan hegemoni ideologi. Kemudian dari pola interaksi di kawasan Timur Tengah yang bipolar yang artinya ada dua negara kekuatan besar yang bertindak untuk memelihara sistem. Kedua, meningkatkan sistem internal dan eskternal dengan sistem aliansi. Hal ini terlihat dari kedua negara tersebut memiliki sekutu yang ditujukan untuk penggabungan kekuatan. Oleh karena itu, jika dilihat kembali bahwa *balance of power* telah tercapai dan negara Arab Saudi yang telah memenangkan kontestasi tersebut.

Oleh karena itu, peran-peran yang dilakukan Arab Saudi dalam OKI cenderung memiliki tujuan sendiri. Dimana konflik kedua negara tersebut secara implisit melibatkan OKI yang membuat keputusan lebih berpihak pada Arab Saudi. Selain itu, tujuan Arab Saudi melakukan banyak hal di Kawasan Timur Tengah yaitu ingin mengubah posisi di OKI yang pada mulanya sebagai pemimpin berubah menjadi hegemoni di kawasan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarzadeh, Shahram, and Zahid Shahab Ahmed. "Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)." *Australia: Springer Science+Bussiness Media. LCC.*, n.d.
- Alghafli, Ali Ahmed Saif Ali. "The Islamic Military Alliance to Fight Terrorism: Structure, Mission, and Politics." *Journal of Regional Security* 12 (2017): 157–86.<https://doi.org/https://doi.org/10.11643/issn.2217-995X172SPA70>.
- Fabian, K. P. "The Iran-Saudi Confrontation: Who Will Win in the End?" www.eurasiareview.com, 2016.
<https://www.eurasiareview.com/07012016-the-iran-saudi-confrontation-who-will-win-in-the-end-analysis/>.
- Harbani, Rahma. "Saudi Undang Negara OKI Gelar KTTIslam Luar Biasa." <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7025032/saudi-undang-negara-oki-gelar-ktt-islam-luar-biasa-bahas-kondisi-gaza/amp>, 2023.
- Hikmawan, Emil, and Gustri Eni Putri. "Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerja Sama Islam Dalam Menyelesaikan Konflik Iran Dan Arab Saudi Tahun 2013-2018." *Dauliyah Journal of Islamic andInternational Affairs* 3, no. 2 (2018): 249.
<https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i2.2504>.
- Namang, Raimundus. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 13 (2020): 247–66.

- Paradisiaca, L F, T Yuniasih, and S Fadlillah. "Diplomasi Arab Saudi Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Studi Kasus Kontestasi Hegemoni Ideologi Vis-à-Vis Iran Pasca KTT OKI 2016)." *Balcony* 1, no. 1 (2022): 42–60.
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/256%0Ahttps://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/256/154>.
- Prayuda, Rendi, and Rio Sundari. "Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis." *Journal of Diplomacy and International Studies* 2, no. 1 (2019): 80–93.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.
- Puri, Cantika Niscala, and Gonda Yumitro. "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penguatan Diplomasi Islam." *Jurnal Sosial Politik* 8, no. 1 (2022): 96–108.
<https://doi.org/10.22219/jurnalsopol.v8i1.19717>.
- Republika. "Iran Usung Masalah Palestina Dalam KL Summit," 2019. <https://www.republika.co.id/berita/q2r6ws382/iran-usung-masalah-palestina%0Adalam-kl-summit>.
- Reuters. "Saudi Arabia Blocks Iran from Islamic Grouping's Meeting: Tehran." <https://www.reuters.com/article/us-iran-saudi-oicmeeting-idUSKBN1ZW0OP>, n.d.
- Samuel, Katja LH. *The Oic , The Un , and Counter- Terrorism Law-Making*. Vol. 48. Hart Publishing, 2013.

Arab Saudi dan Gerakan Salafi Global

Oleh : Nolla Alifa Ramadhani

Definisi Salaf, Salafi dan wahabi

Secara etimologi salaf memiliki pengertian سلف – سلفا memiliki makna yang telah lalu. Dengan arti orang yang telah mendahului. Dalam generasi awal Islam dikenal dengan Alsalaf al shalih. Secara terminologi atau secara istilah salaf adalah para sahabat, tabiin. Jika menurut Al-Ghazali yaitu kebenaran yang nyata dalam hal ini disebut madzhab salafi. Jika menurut aqidah . manhaj atau metode salafi disebut juga dengan ahlu sunnah wal jamaah. Al Firqoh an najiyah (golongan yang selamat). Ahl Alhadist banyak juga yang menyebutnya dengan tajdid pembaharuan dan reformasi. Menurut Oleve Roy kaum salafi adalah kaum yang menekankan pada sunnah nabi tidak hanya pada ibadah nabi tapi juga pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam berperenampilan, berpakaian diatas mata kaki. Memelihara jenggot , makan dan minum dengan tangan kanan dengan tiga jari.¹¹²

Munculnya istilah “salafi” adalah setelah Rasulullah wafat dan risalah Islam telah tersempurnakan seperti dalam quran surah al-Mā'idah (5) ayat 3, yang artinya, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu” (QS. al-Mā'idah [5]: 3). Dari

¹¹² Fadlan Fahamsyah, “Dinamika Dan Sejarah Pemikiran Salafi,” *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 10, no. 2 (2021): 32–60, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol10.iss2.143>.

ayat tersebut dapat dipahami, bahwa Islam telah kaffah telah sempurna, baik dari sisi baik buruk,halal haram maupun seluruh hukum Islam. Juga, telah Allah menyempurnakan ajaran Islam tanpa ada kesamaran dan keraguan sedikitpun. Di samping, Islam telah Allah ridai hingga akhir zaman nanti, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman-Nya, yang artinya, “Siapa saja yang memilih agama selain Islam, Allah tidak akan menerima amalnya.

Salah satu ciri daripada pengikut manhaj salafi adalah dengan semangat dalam menggaungkan dan menyebarkan dakwah islam untuk kembali kepada kebenaran Al-Qur'an dan hadist.juga sebagai mengingatkan dan mengajak pada umat Islam untuk membebaskan diri dari segala bentuk takhayul, bid'ah dan khurafat. Salah satu point yang menarik dari salafisme sebagai sebuah ideologi adalah doktrinnya yang jelas dan ketat serta kerangka diagnostiknya yang kuat yang menjelaskan krisis yang dirasakan banyak muslim. Meskipun muslim liberal atau modernis memiliki diagnosis yang sama, kerangka prognostik untuk sebuah solusi berbeda. Sementara kaum modernis berpendapat bahwa muslim harus kembali ke islam awal, solusi mereka adalah bahwa masa keemasan islam hanya dapat dipulihkan jika muslim benar benar mematuhi model Nabi Muhammad dan meniru aturan serta praktiknya (sunah) dan aturan dari tiga generasi muslim pertama yang disebut (Al-Salih Al-Salih) yang menjadi asal muasal nama Salafisme. Untuk menemukan kebenaran kaum salafi tidak hanya diharuskan mempelajari Al Qur'an tapi juga perkataan Nabi (Hadits). Pokok pokok

akidah salafi adalah bahwa umat islam harus berpegang teguh pada tauhid, membenci penyembahan berhala dan menolak bid'ah. Sementara mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari "Al- Firqa An Najiya".¹¹³

Pengertian wahabi gerakan pembaharuan yang muncul setelah menjelang Islam mengalami masa kemunduran, tersebar luas. Gerakan ini menyerukan pada Aqidah Islamiyah, menolak bid'ah dan syirik. Gerakan ini dinamakan dakwah salafiyah. Pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab. Menurutny Islam telah jauh dan melakukan penyimpangan dari aqidah yang lurus. Abdul wahhab hendak menyelamatkan Islam dari hal yang rusak dengan melakukan pemurnian Aqidah. Menolak ajaran tasawuf, rasionalisme, ajaran syiah, serta praktik bid'ah.¹¹⁴ Gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritan (Salafiyah). Gerakan ini merupakan sarana menjembatani kesenjangan pembaruan Islam abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual.¹¹⁵

Sejarah Gerakan Salafi

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, semakin jauhnya islam setelah kenabian. Tersebarnya Islam

¹¹³ Reza Adeputra Tohis, "Global Salafism," *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023): 85–104, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4892>.

¹¹⁴ Ayu Juniarti, H Abubakar, and Suryanti, "Menelisis Isu Wahabi Di Muhammadiyah Tahun 2012 - 2018," *Syams : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 2, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams/article/view/3028>.

¹¹⁵ Moch Choirul Rizal, Fenolia Intan Saputri, and Siti Annisa Rahmi Imanda, "Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–62, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.212>.

diseluruh dunia dengan sejarah dan perjuangan yang panjang baik dengan penaklukan, peperangan, perdagangan atau dakwah islamiyah yang berhubungan langsung dengan kebudayaan dan pemikiran yang berbeda. Masyarakat Islam dihadapkan dengan tantangan kondisi intelektual pada saat itu. Dan harus segera dihadapi dengan respon yang cepat dan tepat. Semakin menyebar luasnya Islam diberbagai belahan dunia semakin pudar pula kemurnian ajaran agama Islam. Banyak bermunculan takhayul, bidah, khurafat. Banyak muncul pemikiran dan aliran yang menyimpang dari aqidah Islam. Gerakan salafi awal mulanya dicetuskan oleh Abdul Wahhab di abad ke- 18. Namun, sebenarnya gagasan dan prinsip daripada salafi ini sudah ada sejak lama. Banyak tokoh dan kelompok yang memiliki gagasan yang sama. Pada perkembangannya gerakan salafi di era modern dan pengaruhnya dari tokoh kelompok salafi ini belum sepenuhnya mencerminkan visi salafi itu sendiri. Yang sebagaimana harusnya gerakan salafi mementingkan nilai-nilai untuk kembali pada aqidah Islam yang asli sesuai dengan sumber asli Islam. Ada juga pemahaman ulama salafi itu sendiri untuk menyeimbangkan dalam pendekatan dan menafsirkan nash Al-Quran dengan perkembangan dan realitas zaman sekarang.¹¹⁶

Ada yang menyebutkan bahwa pemikiran salafi muncul sejak abad ke -4 hijriah yaitu pada saat ulama-ulama yang bermazhab Hambali yang dipelopori

¹¹⁶ Ade Syahfitri and Muhammad Jailani, “Perilaku Dan Gaya Hidup Komunitas Salafi Pada Masyarakat Sekitar Pesantren Al Guroba,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 884, <https://doi.org/10.29210/1202323275>.

oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ulama yang berhazhab hambali melanjutkannya pada abad ke-7 Hijriah, yang tokoh utamanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjadi penggerak pemikiran salaf, menjadi orang yang sangat disegani pada masanya yang menggaungkan dan menyerukan kepada umat Islam untuk kembali pada Al- Quran dan Assunnah. Serta mengajak umat Islam untuk kembali memahami Islam sebagaimana pemahaman sahabat dan tabi'in.¹¹⁷

Secara Historis ajaran wahabi atau yang dikenal dengan salafi dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhad dan didukung oleh Muhammad bin Saud yang menjadi penguasa di Saudi. Bdul Wahhab memandang Islam pada masa itu yang dikuasai oleh Usmani sebagai penguasa Islam di seluruh dunia mengalami banyak perubahan dan melenceng dari agama Islam. Bersama dengan Muhammad bin Saud Abdul Wahhab menyebarkan ajarannya ke wilayah jazirah Arab. Ekspansifnya arajaran itu sampai di Saudi dan harus berhadapan dengan penguasa Arab dan Islam dunia yaitu Turki Usmani. Turki Usmani memvonis gerakan Wahabi sebagai gerakan menyimpang yang banyak melakukan pemberontakan dan penyelewengan. Menganggapnya sebagai kawarij dan kelompok syiah. Banyak peperangan yang terjadi antara Usmani dan kekuasaan Ibnu Saud, namun Usmani harus takhluk dan Saud berhasil mendeklarasikan negara Arab Saudi tahun 1932. Kelompok wahabi mendeklarasikan

¹¹⁷ Wahyudin Hafid, "MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

dirinya sebagai Islam yang murni, namun tokohnya belum memiliki pandangan yang sama, anggota internalnya saling bertentangan dan saling menyesatkan sendiri. Contohnya, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ikhwan karena memiliki perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah Saudi mengenai modernisasi teknologi dan ekspansi kerajaan. Kemudian adanya peristiwa pengepungan Masjid al-Haram tahun 1979 dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi dan Muhammad bin Abdullah al-Qahtani dilatarbelakangi oleh pandangan terkait dengan pemerintahan Saudi yang tidak menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh dan terbawa budaya Barat, serta kritik yang dilakukan oleh banyak ulama Saudi pada tahun 90an terhadap kerajaan yang telah dianggap melenceng dari ajaran Islam. Beberapa tokoh ulama oposisi yang terkenal adalah Safar Hawali, Salman al-Awdah, dan `Aidh al-Qarni. Dan beberapa peristiwa yang menggambarkan perbedaan yang terjadi di internal sesama tokoh dari aliran Wahabi ini. Walaupun banyak perbedaan pendapat namun wahabi tetap kokoh menjadi ajaran resmi oleh Pemerintahan Arab Saudi.¹¹⁸

Gerakan Wahabi dimulai sebagai gerakan revivalis disuatu tempat terpencil dan gersang bernama Najd. Keruntuhan kesultanan Utsmaniyah pada perang dunia ke-1 turut menjadi faktor pendorong penyebaran wahabisme.

¹¹⁸ Universitas Islam and Indonesia Yogyakarta, "POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DAN AJARAN SALAFI-WAHABI DI INDONESIA Hasbi Aswar Pengantar Seiring Dengan Berkembangnya Ancaman Gerakan Terorisme Dan Pengaruh Wahabi Di Asia Selatan . Menurutny , Karakter Wilayah Ini Yang Cenderung Islam Sufistik Dan Ter," n.d.

Dinasti Al Saud menjadi pendukung yang sangat progresif dalam penyebaran wahabisme ke beberapa kota di Mekah dan Madinah. Penemuan minyak pada tahun 1939 M., di teluk Persia, kerajaan Saudi menjadi banyak memiliki akses terhadap ekspor minyak, dan banyak pemasukan kerajaan hingga milyaran dollar yang digunakan untuk penyebaran dakwah wahabi. Melalui banyak media mulai dari masuk ke pendidikan dari buku, sekolah, universitas, masjid, beasiswa, sampai pekerjaan bagi Jurnalis, akedimis, dan ilmuwan Islam. Dalam hal ini memberikan Wahhabisme sebuah posisi kekuatan yang unggul dalam Dunia Islam global.¹¹⁹

Arab Saudi sejak berdirinya telah menjadikan Islam Konservatif atau dengan kata lain paham salafisme. Perpaduan politik dan agama ini sebagai ideologi Arab Saudi dan menjadikannya hal yang fundamental. Paham salafisme menjadi legitimasi Arab Saudi dalam menjalankan pemerintahannya.¹²⁰ Anggapan lain juga dilontarkan dengan menyebutnya gerakan salafi menjadi gerakan yang disebut dengan radiakal, komponen ideologi salafi berubah seiring dengan perkembangan zaman dalam menghadapi tantangan umat karena dedikasinya bagi reformasi umat dan kebangkitannya terus ada. Bahkan sering dianggap konservatif, dan menganggap dirinya sebagai pembaharu. Salafisme digunakan untuk menggambarkan sebuah gerakan organisasi yang sangat luas mukai dari kelompok-

¹¹⁹ N U R Fadila, "Dampak Negatif Wahabi Pada Masyarakat," *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 2, no. 1 (2023): 45–56, <https://ejournal.tmiial-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/71/72>.

¹²⁰ Fajar Imam Zarkasyi and Irmawan Effendi, "Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi Di Indonesia," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2023): 19–32, <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.10>.

kelompok yang teguh dalam berdakwah dan berpartisipasi dalam politik, pemilihan umum sampai dengan kelompok yang meyakini bahwasannya jihat dengan menggunakan kekerasan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Islam sesuai dengan zaman nabi. Salafisme juga sering dilabelkan dengan keinginan untuk kembali kepada Islam awal pada zaman nabi. Karena Islam telah banyak berubah dan semakin jauh dengan kemurniaannya seiring dengan perkembangan zaman.¹²¹

Doktrin Gerakan salafi

Di Indonesia, nama “salafi secara khusus mulai populer pada tahun 1995 bersamaan dengan terbitnya Majalah Salafi yang dibidani oleh Ja‘far ‘Umar Tālib dan kawan-kawannya. Nama Salafi ini dinisbatkan kepada golongan Wahabi yang sudah ada sejak sekitar 287 tahun lalu di Dir‘īyah, Saudi Arabia, yang ditandai dengan adanya upacara sumpah penetapan Ibn Sa‘ūd sebagai amīrdan Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb sebagai imām urusan agama pada tahun 1744 M oleh mereka berdua, sebagai tonggak awal perjuangan dakwah Wahabi. Kendati demikian, sejak awal tahun 1980-an, terjadi perkembangan dakwah yang lebih berbeda di Indonesia daripada sebelumnya. Karena saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia. Terlebih, pada tahun 1970-an merupakan tahun “internasionalisasi” bagi jamaah-jamaah dakwah tertentu, sehingga di tahun 1980-an mulai muncul ke permukaan kelompok-kelompok dakwah, seperti Tarbīyah (Ikhwān al-

¹²¹ Aden Rosadi, “Gerakan Salaf” 7, no. 2 (2015): 194–205.

Muslimīn), Jamā'ah Tablīgh (JT), Hizbut Tahrīr (HT), Jamā'ah Islāmīyah (JI), dan lain-lain. Di Indonesia pula, gejala semakin tumbuhnya komitmen umat Islam untuk menjalankan agamanya secara baik merupakan bagian dari potret global kebangkitan agama. Salah satu kebangkitan agama di Indonesia dapat dilihat lewat krisis modernitas. Proses materialisasi kehidupan, terpinggirnya spiritualitas dan menonjolnya nilai-nilai rasionalitas yang diakibatkan dari perkembangan sains dan teknologi yang merupakan bagian dari kebangkitan agama dalam merespon berbagai problematika kontemporer. Pendapat lain menyebutkan maraknya salafi muncul sekitar tahun 1980-an yang dibawa generasi muda Indonesia yang menuntut ilmu dan belajar di Timur Tengah, terutama putra-putri Indonesia yang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah dan ketika pulang membawa pikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan aliran Wahabinya.¹²²

Roel meijer mengungkapkan ada beberapa misi gerakan mereka antara lain :

1. Berpegang teguh pada hadist.

Gerakan Salafi berpegang teguh pada hadits dan mengkonsentrasikan untuk mengkaji hadits pada masa Bani Abbasiyah sebagai sarana untuk pemurnian Islam. Dengan perpedoman dengan prinsip pentingnya Al-Qur'an dan Hadist, menolak taqlid. Salafi sangat literalis, wahabisme menggunakan doktrin tauhid sebagai isu politik

¹²² Hafid, "MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)."

dengan menolak syariah dan taklid. Selanjutnya kontras terhadap Ibn Hambal, tetapi lebih condong kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Abd Wahab bermaksud menyeru kepada semua orang yang tidak mengikuti doktrin tauhid sebagai kafir/kuffar atau murtad yang boleh diperangi dengan cara jihad kepada mereka.¹²³ Walaupun antara Ahl Hadis dan Wahabi mempunyai kemiripan, sebenarnya ada sebuah perbedaan yang fundamental. Jika Wahabi lebih mengkonsentrasikan gerakannya pada pemurnian aqidah, maka Ahl Hadis lebih terfokus pada wilayah *Fiqh*. Namun ada hal lain yang juga mereka sepakati bahwa mereka menolak praktik *taqlid*.

2. Penyebaran paham al hadits

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan perkembangan paham Ahl hadis, *pertama*, karena faktor Nasiruddin Albani, ia dikenal sosok yang gigih menyebarkan keyakinannya ini di manapun ia berada, dan *kedua*, keberadaan Universitas Islam Madinah yang digawangi oleh Muhammad Aman al-Jami, yang kemudian dikenal Jami, and Rabi' al-Madkhali keduanya adalah professor di Universitas tersebut. Di universitas ini mahasiswanya tersebar dari berbagai penjuru dunia yang diharapkan setelah menimba ilmu dapat membawa paham wahabi ke negaranya masing-masing. Penyebaran Ahl Hadits ini juga merambah sampai ke Pakistan walaupun dengan jumlah massa yang relatif sedikit. Di mana mereka telah aktif sejak abad

¹²³ Ahmad Ma'ruf, "Global Salafism Sebagai Gerakan Revivalisme Islam," *Al-Murabbi* 1, no. 2 (2016): 243–72.

kesembilan belas. Arab Saudi dan Pakistan telah mempertahankan hubungan dekat dengan pembentukan agama Saudi sejak 1960-an, ditambah lagi ketika ribuan orang Arab datang ke Pakistan setelah invasi Soviet di Afghanistan. Organisasi lain yang eksis di Pakistan adalah *Markaz Da`wah wal Irshad* (MDI) didirikan pada tahun 1986 oleh tiga profesor universitas Pakistan. Semua terkait dengan Ulama Universitas Islam Saudi, dan Sheikh Abdullah Azzam. MDI berkonsentrasi dalam dua hal yaitu: dakwah dan jihad. Baginya hukum jihad adalah *fardh* „*ain* .di samping itu organisasi ini juga didirikan untuk menghilangkan pengaruh Hindu bagi warga Pakistan karena hal ini bertentangan dengan Islam. Di sekolah anak-anak menerima pendidikan Islam dan modern, dengan penekanan pada bahasa Arab, bahasa Inggris dan ilmu komputer. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan pesan jihad dan mempersiapkan anak-anak sejak dini untuk menjadi mujahidin. Di samping itu ada organisasi sempalan lain yang cukup besar yaitu Laskhar-e Taiba, yang merupakan sayap militer dari Markaz Da `wa wal Irshad, adalah ekspresi dari gerakan jihad Ahl Hadis dan tentara jihad swasta terbesar di Asia Selatan. Organisasi ini didirikan pada awal tahun 1990 untuk melatih pemuda Pakistan bersedia untuk melawan pendudukan Soviet di Afghanistan. Mereka mendidik pemuda karena merasa tidak puas dengan Islam tradisional akan tetapi mereka juga menolak ide Barat. Pada perkembangannya organisasi ini dilarang pemerintah kemudian bermetamorfosis menjadi Jamaat ul Da`wa Pakistan (JVD), di mana ia mengklaim dirinya sebagai organisasi kesejahteraan dan bekerja pada berbagai proyek di bidang

kesehatan, pendidikan, penyediaan air minum yang bersih, memajukan usaha memberikan bantuan keuangan kepada anak yatim dan keluarga. Dengan demikian Ahl Hadis dapat dipandang sebagai dua entitas yang berbeda, satu sisi adalah sebuah doktrin yang diimplantasikan oleh Albani dalam rangka melanjutkan dan mereformasi gerakan Wahabisme, serta sekaligus upaya menjaga jarak terhadap keterlibatan politik, sementara di sisi lain Ahl Hadis adalah gerakan Salafi itu sendiri sebagai sebuah bentuk metamorfosis. Konsep *wala'' wal bara''* dalam implementasinya terjadi perbedaan pendapat antara para ulama sendiri. Ada yang secara ketat menerapkan *bara''* dalam masyarakat tetapi toleran terhadap penguasa. Namun yang perlu dicatat adalah apa yang dilakukan oleh Juhaيمان al-'Utaybi, seorang pemikir radikal yang begitu "berani" mengkritisi pemerintahan Saudi Arabia, bahkan mencoba untuk menggulingkannya pada tahun 1979. Hal ini karena pengaruh tokoh ulama Jihadi Salafi Abu Muhammad al-Maqdisi. Kontribusi utama dari Al-Maqdisi adalah kemampuannya menjadikan konsep *al-wala' wa-l-bara'* sebagai sebuah keterpautan antara ia sebagai propaganda politik dan di sisi lain sebagai media *takfir*. Dan pada gilirannya ia ubah haluannya menjadi sebuah teori untuk melawan dan mengkritisi secara teliti. Lebih lanjut, dia mampu memformulasikan ide *takfir* dengan menggunakan argument yang lebih dekat dengan konsep yang dianut Salafi dibanding para pemikir sebelumnya. Bahkan lebih jauh, ia mengadopsi keterkaitan antara *tawhid* ia terjemahkan sebagai konsep anti pemerintah dan memaksakan konsep *al-wala' wa-l-bara'* sebagai sebuah keimanan dasar seseorang. Artinya ia tidak segan-segan mencap "kafir" bagi orang Islam

yang tidak komitmen dengan konsep *al-wala' wa-l-bara'* ini.¹²⁴

3. Anti Syiah.

Kebencian salafi terhadap syi'ah karena keyakinan bahwa syi'ah merupakan aliran yang menyesatkan.. Menurut Ibnu Taimiyah, kaum Syi'ah telah melakukan persekongkolan dan kerjasama dengan Mongol untuk membantu dalam menggulingkan kekuasaan Abbasiyah. Sikap Salafi-Wahhabi yang anti terhadap Syi'ah awalnya merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703- 1792), yang mengembangkan sikap kebencian mendalam kepada kaum Syi'ah. Ibn Abd al-Wahhab adalah seorang penganut madzhab Ahmad bin Hambal (780-855). Ibn Hanbal adalah seorang Muhaddits dan teolog dan diduga ia sama sekali tidak bermaksud untuk menemukan dan mendirikan sebuah madzhab hukum. Karena sebagai muhaddits apa yang ia hasilkan utamanya adalah mengumpulkan, mengkritik dan mengkategorikan materi hadits, yaitu laporan tentang kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad, atas dasar Alquran dan hadis koleksi tersebut dipercaya, lalu kemudian Ibnu Hanbal menganggapnya sebagai doktrin Islam yang benar. Celaknya dari hasil pembacaan yang sedemikian negative terhadap kaum Syi'ah Muhammad ibn Abd al-Wahhab menganggap mereka sebagai *kafir*.¹²⁵

¹²⁴ Ma'ruf.

¹²⁵ Tasman Tasman, "Al-Radīkālīyah Al-Islāmīyah: Afkārūhā Wa Ḥarakātūhā Fī Indūnīsiyā Al-Ma'āṣir," *Studia Islamika* 16, no. 1 (1970), <https://doi.org/10.15408/sdi.v16i1.492>.

Gerakan salafi cukup subur di berbagai negara pergerakannya dilakukan oleh para tokoh salafi tanpa terkecuali di Yaman, yang dipelopori Muhammad ibn Ali al Shawkani (w.1834) beliau adalah seorang reformis yang radikal yang berorientasi kepada pemurnian ajaran agama yang bersumber kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum yang haq, dan untuk mewujudkan gerakan tersebut, maka Muhammad Ibn Ali al-Shawkani menggunakan metode yang *fleksible* dalam melakukan reformasi tersebut. Adapun di India, gerakan salafism dipelopori seorang yang hidup sezaman dengan Ibn Abd al-Wahhab, yaitu Shah Waliyullah yang hidup pada masa 1703-1762, Shah Waliyullah ini kemudian mencanangkan dan melakukan gerakan reformasi dengan konsep yang sama yakni melakukan pemurnian hukum Islam, yaitu menolak taqlid dan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan mengembalikan terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai penoman yang paling benar dan murni.¹²⁶

Salafisme dan radikalisme global.

Radikalisme dalam sebuah ideologi agama berlaku karena kesilapan dalam memahami makna dalil yang terdapat dalam firman Allah serta kesilapan dalam menterjemah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui jalur faham ASWJ. Faham ini menterjemahkan Al-Quran dan hadis melalui akal dan mengabaikan pada kesucian dan kemurnian hati serta mengabaikan ajaran-ajaran tasawuf dalam

¹²⁶ Ma'ruf, "Global Salafism Sebagai Gerakan Revivalisme Islam."

kehidupan sehari-hari.¹²⁷ radikalisme bukanlah ajaran Islam dan bukan cara Islam dalam menyebarkan dakwahnya hampir di semua gama terjadi adanya radikalisme. Radikalisme kaum Sikh haluan keras terhadap kaum muslim di India Selatan, kekerasan demi kekerasan Yahudi terhadap kaum muslim di Palestina. Demikian juga kekerasan kristen radikal yang terjadi di belahan Eropa dan Amerika, dan yang paling mutakhir tragedi pembantaian dan pembersihan etnis muslim Rohingnya di Burma Myanmar membuka mata kepala kita bahwa radikalisme bukanlah monopoli satu agama. Islam dilabeli sebagai agama yang radikal dan pro kekerasan setelah adanya tragedi Black September dengan runtuhnya simbol arogansi ekonomi Amerika, World Trade Center (WTC), pada 11 September 2001. Amerika pun tenggelam dalam duka derita mendalam akibat peristiwa tersebut. Rangkaian teror susul-menyusul setelah 9/11, termasuk teror yang terjadi beberapa kali melanda Indonesia. Rentetan kejadianitu membuka dunia bahwa sedang ada gerakan yang direncanakan oleh kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam. Membuat stigma dunia yang disusul dengan adanya kelompok-kelompok radikal seperti Negara Islam Irak-Suriah (NIIS) Setelah Al Qaedaatau ISIS dengan reputasi kekerasan melampaui gerakan- gerakan radikal yang pernah ada sebelumnya. ISIS mampu menanamkan prinsip transnasionalisme tidak

¹²⁷ H B Hasan and H Towpek, "Tasawuf Kontemporari Dalam Menangani Pemikiran Radikalisme Beragama: Analisis Literatur Utama," *Labuan E-Journal of Muamalat and ...*, 2024, <https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/4965>

hanya teror belaka hal tersebut membuat ISIS berkembang cepat dengan memasuki organisasi-organisasi Islam lain. Dari banyaknya fenomena tersebut islam dilebeli menjadi pemicu gerakan radikal.

Fenomena radikalisme bukanlah fenomena yang khas Islam sebagai agama. Karena sesungguhnya radikalisme adalah sebuah keniscayaan dalam setiap agama. Radikalisme muncul sebagai salah satu akibat modernisasi, sehingga semua agama yang bersinggungan dengan modernisasi akan memunculkan gerakan radikal. Oleh karena itu muncullah Yudaisme radikal Kristen radikal, Hindu radikal, Sikh radikal dan bahkan Konfusianisme radikal.¹²⁸ Namun karena rentetan dari banyaknya kejadian yang menggemparkan dunia pelaku di baliknya beragama Islam dengan gerakannya. Maka Islam menjadi label dari radikalisme.

Menurut pendapat Khamami Zada dalam kajiannya mengenai kelompok Islam radikal menurutnya kelompok tersebut memiliki kemiripan dalam memahami Islam dan ideologi seperti memperjuangkan Islam di era modern ini menjadi Islam yang kaffah, merujuk praktik keagamaan berdasarkan paham salaf assalihin pada generasi awal, anti barat yang dianggap sebagai setan, memusuhi kelompok Islam liberal karena banyak menafsirkan agama Islam dengan rasional dan kontekstual. Menurut pandangan salafi umat Islam dalam keadaan kemunduran. Adapun kemunduran tersebut disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor

¹²⁸ Achmad Bahrur Rozi, "Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi," *Empirisma* 26, no. 1 (2017): 107–16, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.685>.

internal disebabkan oleh kegagalan ulama dan lembaga-lembaganya yang membawa umat Islam menjadi mundur, lemah, terbelakang. Faktor eksternal adalah pengaruh barat dari invansi dan serangan kultural, politik, dan ekonomi. Solusi dari kemunduran umat Islam tidak lain dengan kembali kepada Islam itu sendiri. Selogan yang selalu digaungkan oleh salafi adalah ” kembali kepada Al-Qur’an dan As-sunnah”. Dengan selogan ini artinya meloncati masa dari abad pertengahan dengan mazha-mazhab fiqh, firqo- firqoh teologi, dan tarikat sufi, tasawuf. Hal tersebut menjadi salafi berbeda dengan ulama pada umumnya berkaitan dengan khazanah ilmu pengetahuan fiqh.¹²⁹

Karakter-karakter yang dimiliki oleh gerakan radikal antara lain: pertama, penafsiran yang literal terhadap Al- Qu’an dan Hadist. Menolak pemahaman konseptual terhadap teks agama karena merusak kesucian dari Islam. Kedua, menolak pluralisme dan relativisme karena dengan adanya hal tersebut telah mendistorsi pemahaman terhadap ajaran agama. Ketiga, kerap memonopoli tafsir agama, menganggap dirinya dengan yang paling benar dalam menafsirkan dan paling absah, sehingga menganggap kelompok yang tidak sepemahaman sebagai kelompok yang sesat. Keempat, kelompok radikalisme kerap berkorelasi dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleransi dan melitanisme. Kecenderungan ini melahirkan konflik internal yang terjadi dan membuat perpecahan satu sama lain. Sebagai contoh kaum salafi menolak pemikiran dari Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afgani, dan Rasyid Rida yang

¹²⁹ Rozi.

menerima pemikiran rasionalisasi dan mengajak umat Islam untuk menerima modernisasi. Pada akhirnya mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab dan pendahulunya Ibnu Taimiyah di abad ke tujuh dan delapan hijriyah. Kaum salafi banyak mengambil rujukan dari keduanya. Radikalisme tubuh di Islam dan berkembang menjadi ide Wahabi, Neo- Wahabi, dan Hassan Al-Banna.¹³⁰

Tragedi setelah WTC, yang sangat populer menggemparkan dunia dan menyebabkan munculnya terorisme dunia bertanya- tanya apakah agama Islam mengajarkan penganutnya untuk berbuat kekerasan. Di belahan negara sekelompok orang mengatasnamakan Jihad- Islam. Salafi sebagai paham resmi sejak berdirinya kerajaan Arab Saudi, pada tahun 1960-an pemerintah Arab Saudi terbuka untuk menerima aktivis Ikhwanul Muslimin yang diburu oleh pemerintah Mesir karena intimidasi rezim Nasir. Arab Saudi yang menjadi negara modern produksi minyak diperlukan infrastruktur teknis dan birokrasi yang maju, sedangkan Ikhwanul Muslimin mewakili sumber pendidik yang berkualitas, birokrat dan insinyur, dan banyak dari mereka yang ingin meninggalkan Mesir. Pada mulanya IM satu pemikiran dengan wahabi. Namun aktivis IM memiliki sikap yang kritis terhadap politik dan penguasa Arab Saudi. Dominasi wahabi kemudian mulai dipertanyakan dengan munculnya gerakan Al- Sahwa Al Islamiyyah. Yang mulai berkembang di Saudi. Hal tersebut membuat ketegangan, gerakan As Sahwa yang mengkritik politik Saudi yang p

¹³⁰ Rozi.

ro terhadap Amerika Serikat menimbulkan simpati dari mahasiswa Universitas Madinah.¹³¹

Dalam konterks inilah Nashiruddin Al- Bani memberikan perlawanan terhadap gerakan as sahwah. Dan mendeklarasikan gerakan Islam yang lebih radikal dan menolak segala hukum fiqh. Dengan demikian salafi menjadi gerakan yang konserfatif. Baginya aliran fiqh adalah bentuk pemikiran manusia. Jika ingin eribadah dengan benar harus kembali pada alquran dan hadist. Perhatian salafi fokus pada individual, moral dan praktik ritual. Pada tahun 1980-an kelompok ini menyebar ke Kuwait, Yaman, dan utara Saudi.¹³²

¹³¹ Lihat Michael Cook, "Tiba-Tiba Begitu Mengelitik Untuk Dikaji Dan Diamati. Sebagaimana Disebutkan Oleh Roel Meijer," 2009, 1–17.

¹³² Cook.

DAFTAR PUSTAKA

- Cook, Lihat Michael. “Tiba-Tiba Begitu Mengelitik Untuk Dikaji Dan Diamati. Sebagaimana Disebutkan Oleh Roel Meijer,” 2009, 1–17.
- Fadila, N U R. “Dampak Negatif Wahabi Pada Masyarakat.” *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 2, no. 1 (2023): 45–56. <https://ejournal.tmi-al-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/71/72>
- Fahamsyah, Fadlan. “Dinamika Dan Sejarah Pemikiran Salafi.” *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 10, no. 2 (2021): 32–60. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol10.iss2.143>.
- Hafid, Wahyudin. “MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi).” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.
- Hasan, H B, and H Towpek. “Tasawuf Kontemporari Dalam Menangani Pemikiran Radikalisme Beragama: Analisis Literatur Utama.” *Labuan E- Journal of Muamalat and ...*, 2024. <https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/4965>.
- Islam, Universitas, and Indonesia Yogyakarta. “POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DAN AJARAN SALAFI-WAHABI DI INDONESIA Hasbi Aswar Pengantar Seiring Dengan Berkembangnya Ancaman Gerakan Terorisme Dan Pengaruh Wahabi Di Asia Selatan . Menurutny , Karakter Wilayah Ini Yang Cenderung Islam Sufistik Dan Ter,” n.d. Juniarti, Ayu, H Abubakar, and Suryanti. “Menelisik Isu Wahabi Di Muhammadiyah Tahun 2012 - 2018.” *Syams : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 2. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams/article/view/3028>.
- Ma'ruf, Ahmad. “Global Salafism Sebagai Gerakan Revivalisme Islam.” *Al-Murabbi* 1, no. 2 (2016): 243–72.

- Rizal, Moch Choirul, Fenolia Intan Saputri, and Siti Annisa Rahmi Imanda. “Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–62. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.212>.
- Rosadi, Aden. “Gerakan Salaf” 7, no. 2 (2015): 194–205.
- Rozi, Achmad Bahrur. “Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi.” *Empirisma* 26, no. 1 (2017): 107–16. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.685>.
- Syahfitri, Ade, and Muhammad Jailani. “Perilaku Dan Gaya Hidup Komunitas Salafi Pada Masyarakat Sekitar Pesantren Al Guroba.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 884. <https://doi.org/10.29210/1202323275>.
- Tasman, Tasman. “Al-Radīkālīyah Al-Islāmīyah: Afkārūhā Wa Ḥarakātuhā Fī Indūnīsīyā Al-Ma’āshir.” *Studia Islamika* 16, no. 1 (1970). <https://doi.org/10.15408/sdi.v16i1.492>.
- Tohis, Reza Adeputra. “Global Salafism.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023): 85–104. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4892>.
- Zarkasyi, Fajar Imam, and Irmawan Effendi. “Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi Di Indonesia.” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2023): 19–32. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.10>.

Peran Ulama Dan Lembaga Fatwa di Saudi

Oleh : Chimayah Abadiyah

Peran Ulama di Saudi

Ulama di Arab Saudi memiliki peran yang sangat sentral dan kompleks dalam membentuk, menjaga, serta mengarahkan arah negara. Sejak berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, ulama telah menjadi pilar utama dalam sistem politik dan sosial negara. Akar historis hubungan erat antara agama dan negara ini dapat ditelusuri hingga masa pembentukan Kerajaan Saudi Pertama dan Kedua, di mana ulama berperan aktif dalam mempersatukan suku-suku dan menyebarkan ajaran Islam.

1. Peran Ulama dalam Politik

Ulama tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Saudi. Mereka seringkali menjadi penasihat bagi pemerintah dalam berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan agama dan moral. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dapat menjadi dasar hukum bagi pembuatan kebijakan negara. Selain itu, ulama juga memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menjaga stabilitas politik. Dengan demikian, ulama tidak hanya sekedar memberikan nasihat, tetapi juga turut menentukan arah perkembangan negara.

Saat ini, ulama (ahli agama) dan politik di Arab Saudi menghadapi tantangan besar terkait dengan reformasi sosial dan politik yang diprakarsai oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman. Reformasi ini bertujuan untuk membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk di bidang

ekonomi, sosial, dan politik. Pangeran Mohammed bin Salman, yang dikenal dengan inisiatif "Vision 2030", ingin mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak bumi, yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan negara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perekonomian yang lebih beragam dan mandiri, yang tidak hanya bergantung pada sektor energi, tetapi juga mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, teknologi, dan industri lainnya.

Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki citra Arab Saudi di dunia internasional, dengan menciptakan negara yang lebih modern, progresif, dan terbuka. Pangeran Mohammed bin Salman ingin Saudi menjadi lebih diterima di komunitas global, tidak hanya sebagai negara kaya minyak, tetapi juga sebagai negara yang memiliki inovasi dan kemajuan sosial.

Namun, reformasi ini tidak berjalan mulus. Ada perlawanan yang kuat dari kelompok konservatif di dalam masyarakat Saudi, termasuk sebagian ulama dan kalangan tradisional. Kelompok ini merasa bahwa reformasi yang dijalankan oleh pemerintah Saudi dapat mengancam nilai-nilai tradisional yang selama ini dijunjung tinggi, seperti interpretasi konservatif terhadap hukum Islam dan adat budaya yang sudah lama ada. Misalnya, beberapa perubahan yang diusulkan, seperti pelonggaran pembatasan terhadap peran perempuan, pengembangan sektor hiburan, dan penerimaan terhadap gaya hidup yang lebih modern, dianggap oleh sebagian kelompok konservatif sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial dan ketertiban masyarakat yang sudah ada.

Karena itu, ulama dan pemerintah di Arab Saudi harus menghadapi dilema besar antara dua pilihan besar: mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak lama atau menyongsong modernitas yang diusung oleh reformasi. Mereka harus menemukan jalan tengah yang seimbang antara menjaga nilai-nilai agama dan budaya tradisional dengan menerima perubahan dan kemajuan zaman. Tantangan ini menjadi semakin kompleks, karena setiap keputusan yang diambil bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, hubungan internasional negara, dan stabilitas politik yang sedang dibangun oleh pemerintah Saudi. Oleh karena itu, ulama, pemerintah, dan masyarakat Saudi harus bekerja bersama untuk menyelesaikan konflik ini dengan bijaksana dan penuh pertimbangan.¹³³

Reformasi sosial dan politik yang diusung oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman termasuk dalam program “Vision 2030” yang bertujuan untuk mewujudkan visi negara Arab Saudi sebagai negara yang lebih moderat dan terbuka secara sosial dan ekonomi.¹³⁴ Program ini meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, dan sektor swasta. Kebijakan dalam bidang politik diantaranya liberalisasi sosial, pemilihan umum local, dan anti-korupsi, dapat mengguncang konservatisme sosial dan politik yang telah menjadi ciri khas negara Arab Saudi selama bertahun-tahun. Para kelompok konservatif yang didalamnya

¹³³ J. A. Kechichian, “The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia,” *International Journal of Middle East Studies* 18, no. 1 (1986): 53–71.

¹³⁴ Mehmood Khan, “Saudi Arabia ’ s Vision 2030,” *Defence Journal* 9, no. 11 (2016): 36–42.

terdapat para ulama merasa khawatir tentang kemungkinan dampak hilangnya nilai-nilai tradisional dan perubahan yang terlalu cepat. Mereka menganggap bahwa perubahan-perubahan tersebut melanggar ajaran agama dan dapat mengancam stabilitas sosial dan politik Arab Saudi.¹³⁵

Dalam konteks ini, ulama di Arab Saudi memainkan peran yang sangat krusial karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perubahan dan reformasi..¹³⁶ Seiring dengan perubahan yang terjadi di Arab Saudi, peran ulama semakin mendapat perhatian besar, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ulama, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin spiritual umat Islam, kini juga terlibat lebih aktif dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan politik negara. Dalam menghadapi berbagai perubahan besar, seperti reformasi ekonomi dan sosial yang diusung oleh Pangeran Mohammed bin Salman, ulama menjadi pihak yang

¹³⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto and Amanah Aida Qur'an, "Political Economy of the Agricultural Sector in a Review of Development Studies in Indonesia," *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2021): 191, <https://doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3627>.

¹³⁶ Moh Asvin Abdurrohman, Moh. Hazim Ahrori, and Ratna Pangastuti, "Ulama Dan Politik Di Arab Saudi:," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 1 (2023): 768–78, .

sangat penting dalam memberikan panduan agama dan mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Namun, perubahan ini tidak mudah. Terdapat berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda antara kelompok-kelompok di masyarakat, terutama antara kelompok yang mendukung reformasi dan mereka yang lebih konservatif. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sangat penting bagi ulama dan pemerintah untuk melakukan dialog dan kerjasama dengan berbagai kelompok ini. Dialog ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat menjaga stabilitas sosial dan politik, serta memastikan bahwa perubahan yang terjadi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai sosial yang ada.

Pemerintah Arab Saudi menyadari pentingnya komunikasi antara ulama dan masyarakat dalam menghadapi perubahan ini. Sebagai langkah konkret, mereka memfasilitasi dialog melalui berbagai program penyuluhan agama yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Islam dan bagaimana menghadapi tantangan zaman. Selain itu, pemerintah juga mengadakan forum-forum diskusi di mana ulama, tokoh agama, dan masyarakat dapat bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, serta mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah sosial dan politik yang muncul akibat reformasi. Dengan cara ini, diharapkan terjalin kerjasama yang lebih harmonis dan tercapai pemahaman yang lebih baik di antara semua pihak, demi kemajuan dan stabilitas negara.

Pada masa kepemimpinan Mohammed bin Salman, posisi ulama terus mengalami pergeseran. Sebagian ulama mendukung kebijakan modernisasi yang diambil oleh sang putra mahkota, namun sebagian lagi mengkritik keras kebijakan-kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tradisi Arab yang konservatif. Sebagai contoh, kebijakan liberalisasi sosial seperti mengizinkan bioskop dan konser music mendapat dukungan dari sejumlah ulama yang melihatnya sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peran Ulama dalam Sosial Budaya

Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Arab Saudi. Mereka bukan hanya menjadi pemimpin dalam hal keagamaan, tetapi juga menjadi panutan utama dalam hal moral dan etika yang diikuti oleh masyarakat luas. Artinya, jika ada pertanyaan atau permasalahan tentang nilai-nilai moral, etika, dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan mengacu pada panduan atau nasihat dari ulama. Pengaruh ulama terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bagaimana orang Saudi berinteraksi satu sama lain, cara mereka beribadah, berpakaian, hingga bagaimana mereka berperilaku dalam masyarakat.¹³⁷

¹³⁷).", "plainTextFormattedCitation": "A Hamidaddin, Tweeted Heresies: Saudi Islam in Transformation. (Inggris: Oxford University Press, 2019).", "properties": {"noteIndex": 5}, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} A

Selain menjadi pemandu dalam kehidupan sehari-hari, ulama juga berperan sebagai penjaga tradisi dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai Islam yang kuat di masyarakat Saudi. Dengan menjaga tradisi ini, ulama berusaha memastikan bahwa masyarakat tetap terhubung dengan akar budaya dan agama mereka di tengah arus perubahan zaman. Tidak hanya itu, ulama juga sering berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika terjadi perselisihan atau konflik, ulama kerap diminta untuk memberikan nasihat atau fatwa yang mengutamakan pendekatan damai sesuai dengan hukum Islam (syariah) serta mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, ulama tidak hanya menjalankan peran sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi figur yang menjaga kedamaian dan kestabilan sosial di masyarakat Saudi.

3. Hubungan Ulama dengan Pemerintah

Hubungan antara ulama dengan pemerintah di Arab Saudi adalah hubungan yang unik dan rumit, di mana peran keduanya saling terkait namun juga memiliki batasan yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan sosial dan politik yang sedang berlangsung. Di satu sisi, para ulama memiliki wewenang atau otonomi untuk mengeluarkan fatwa, yaitu keputusan atau panduan agama yang diambil berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Fatwa ini sering kali menjadi acuan utama masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan,

Hamidaddin, *Tweeted Heresies: Saudi Islam in Transformation*.
(Inggris: Oxford University Press, 2019).

baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam urusan publik. Selain memberikan fatwa, ulama juga berperan sebagai pemberi nasihat yang mengarahkan masyarakat untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama, membantu masyarakat membedakan antara yang benar dan salah menurut ajaran Islam.

Namun, di sisi lain, pemerintah Arab Saudi juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan peran yang dapat diambil oleh para ulama. Pemerintah menggunakan kebijakan dan program tertentu yang dapat mengarahkan, mendorong, atau bahkan membatasi ruang lingkup pengaruh ulama, terutama ketika kepentingan negara terlibat.¹³⁸ Kebijakan-kebijakan ini dapat mencakup regulasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan, program pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum agama, atau bahkan dukungan finansial yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang sejalan dengan visi pemerintah. Oleh karena itu, terdapat aspek saling ketergantungan antara ulama dan pemerintah, di mana keduanya perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, namun juga harus menyesuaikan diri sesuai dengan situasi dan kepentingan masing-masing.

Keseimbangan dalam hubungan ini sangatlah penting, sebab ketidaksepahaman atau ketegangan antara ulama dan pemerintah dapat berdampak besar pada stabilitas sosial dan politik negara.¹³⁹ Arab Saudi, sebagai negara yang mengutamakan identitas keislaman yang

¹³⁸ Kechichian, J. A. (2000). Saudi Arabia's will to power. *Middle East Policy*, 7(2), 47-60.

¹³⁹ Universitas Sebelas Maret, "Vision 2030 : Saudia Arabia's Modernization," *Jurnal Studi Timur Tengah* XV, no. 2 (2022): 137-48.

kuat, sangat bergantung pada harmoni antara ulama dan pemerintah untuk menjaga kesatuan nasional. Bila terjadi perbedaan pandangan yang cukup besar, hal ini bisa memicu ketidakpuasan di antara masyarakat yang dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan ulama menjadi prioritas yang krusial bagi kestabilan negara, baik dari segi politik, sosial, maupun ekonomi. Hubungan harmonis ini menjadi jaminan bahwa masyarakat Saudi dapat tetap bersatu di bawah kepemimpinan yang kuat, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar utama kehidupan mereka.

Lembaga Fatwa di Saudi

Pengertian fatwa secara etimologi adalah sesuatu yang masih baru, baru, dan bersifat menjelaskan.¹⁴⁰ Fatwa adalah menerangkan suatu masalah yang dimufti oleh mufti untuk mustafti.¹⁴¹ Ibnu Faris menggabungkan dua suku kata, yaitu: menerangkan dan fatwa, yang artinya fatwa berfungsi untuk menerangkan status hukum yang baru.¹⁴² Sementara berbagai fukaha memberikan keterangan tentang pengertian fatwa secara etimologi, yaitu suatu kegiatan menerangkan hukum syariat yang ditanyakan kepada seorang mufti. Yusuf al-Qardawi menjelaskan, pengertian di atas sama dengan yang

¹⁴⁰ Abu al-Fadl Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, 2020).

¹⁴¹ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit* (Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, 2020).

¹⁴² Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah V*, Beirut (Dar al-Fikr al-Arabi, 2000).

diuraikan oleh John, L. Esposito, dalam Oxford Muslim Encyclopedia World. Al-Qarafi mengatakan bahwa fatwa adalah keterangan dari Allah, dalam suatu hukum syariat dan bersifat mengikat atau wajib (ilzam).

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas dan untuk apa yang menjadi perhatian, fatwa tidak sama dengan ijtihad. Fatwa muncul dari silang pendapat seorang mustafti yang menanyakan masalah yang dialami atau ingin diketahui, sedangkan ijtihad bersifat umum yang dilakukan melalui berbagai dalil istinbat untuk menerangkan kemungkinan hukum suatu masalah.¹⁴³

Hakikat berbagai makna yang disebutkan para fukaha seputar fatwa, yaitu, pertama; fatwa bersifat responsif, yaitu konsumen mengetahui bahwa para penuntut ilmu, ia merupakan pendapat hukum yang baru dikemukakan setelah diminta keterangan tentang aspek hukum suatu masalah syariat oleh mustafti. Kedua, kekuatan hukum fatwa tidak selamanya mengikat atau harus diikuti oleh isi hukum yang diberikan kepadanya, baik fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi maupun perorangan. Maka, dapat dipahami bahwa fatwa merupakan kekuatan hukum untuk mendukung atau menolak suatu masalah yang diberikan oleh lembaga resmi atau pun dari perorangan.

Lembaga Fatwa di Saudi: Pilar Kekuatan Spiritual dan Politik

Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta, atau Komite Tetap Penelitian Ilmiah dan Fatwa di Arab Saudi, memiliki peran penting yang mencakup berbagai

¹⁴³ Ibnu al-Hajib Abi Amr Jamaluddin Usman bin Umar bin Abi bakr, *Syarh Al-Adhi 'Ala Mukhtashar Al-Muntaha* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000).

aspek kehidupan masyarakat, budaya, dan politik di negara tersebut.¹⁴⁴ Sebagai lembaga yang diakui pemerintah, Lajnah Daimah adalah pihak yang menafsirkan hukum Islam dan mengeluarkan fatwa, yaitu panduan resmi berdasarkan ajaran Islam. Fatwa yang dikeluarkan lembaga ini mengatur banyak hal, mulai dari ibadah sehari-hari, seperti tata cara shalat dan puasa, hingga aturan yang lebih kompleks seperti hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Karena statusnya sebagai otoritas utama dalam bidang agama, masyarakat Saudi memandang fatwa-fatwa dari lembaga ini sebagai sumber yang sah dan dapat diandalkan.

Lebih dari sekadar mengatur urusan pribadi, peran Lajnah Daimah juga berdampak besar pada pembuatan kebijakan negara. Fatwa yang dikeluarkan sering menjadi dasar atau acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan nasional yang mengatur berbagai bidang, seperti hukum, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Dengan kata lain, lembaga ini tidak hanya memberi panduan keagamaan bagi individu, tetapi juga mengarahkan seluruh masyarakat dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Lajnah Daimah memiliki struktur organisasi yang kuat dan terdiri dari para ulama dan ahli agama yang mendalam pengetahuannya tentang syariah, atau hukum Islam. Hal ini memberikan lembaga ini kekuatan yang

¹⁴⁴ Ayu Rahayu Nurhaliza, "Future Gold Commodity: Indonesian Ulema Council Vs Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal Ifta Ayu Rahayu Nurhalizah 1 , Ach. Fageh 2 1," *Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2021): 1–10.

besar dalam memengaruhi masyarakat.¹⁴⁵ Selain itu, hubungan dekat antara lembaga ini dengan pemerintah memperkuat kemampuan mereka dalam menyampaikan fatwa yang sesuai dengan kepentingan negara. Kolaborasi erat ini memungkinkan lembaga fatwa berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan memengaruhi opini publik melalui fatwa yang dikeluarkan.

Peran sentral Lajnah Daimah dalam menjaga kesatuan umat sangatlah penting bagi Arab Saudi, yang menempatkan identitas Islam sebagai fondasi utama negara. Dengan memberikan pedoman yang relevan sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang ada, lembaga ini tidak hanya menjaga stabilitas di dalam negeri tetapi juga membantu membentuk identitas keagamaan masyarakat Saudi secara luas.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Fatwa

Lembaga fatwa di Arab Saudi memiliki peran yang penting dalam sejarah terbentuknya negara tersebut dan berkembangnya ajaran Islam di kawasan itu. Pada awal pembentukannya, lembaga fatwa ini muncul bersamaan dengan proses penyatuan Arab Saudi oleh Raja Abdulaziz Al-Saud, pendiri negara modern ini. Pada masa itu, wilayah Arab Saudi terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Untuk bisa menyatukan semua suku ini di bawah satu pemerintahan, diperlukan landasan ideologi yang kuat dan bisa diterima

¹⁴⁵ Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law," *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 05, no. 2 (2019): 181–206.

oleh seluruh masyarakat.¹⁴⁶ Di sinilah ideologi Wahhabisme, sebuah paham Islam yang didirikan oleh ulama Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18 yang menjadi dasar negara. Wahhabisme dianggap sebagai ajaran yang murni dan sejalan dengan pandangan Islam Sunni, sehingga cocok untuk menjadi panduan hidup masyarakat. Dengan dukungan para ulama Wahhabi, pemerintah Arab Saudi membentuk lembaga fatwa yang bertugas menginterpretasikan atau menafsirkan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Lembaga ini memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam harus beribadah, berperilaku sosial, bahkan hingga aturan dalam hukum pidana.¹⁴⁷

Peran lembaga fatwa ini begitu besar dalam menciptakan persatuan di Arab Saudi. Fatwa atau keputusan agama yang dikeluarkan lembaga ini membantu menyatukan suku-suku yang tadinya memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda. Lembaga fatwa memberikan pedoman agama yang jelas dan menetapkan aturan-aturan berdasarkan ajaran Islam, sehingga masyarakat bisa memiliki panduan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini tidak hanya berfungsi dalam urusan ibadah,

¹⁴⁶ Hilal Kholid Bajri and Akim Akim, "Faktor Domestik Yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al-Nimr," *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 108–24, <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.92>.

¹⁴⁷ Ibnu Irawan, Jayusman, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law."

tetapi juga mengatur bagaimana masyarakat seharusnya berinteraksi satu sama lain sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Seiring berjalannya waktu, lembaga fatwa di Arab Saudi terus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman. Ketika era globalisasi dan modernisasi mulai memengaruhi Arab Saudi, lembaga ini berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Masyarakat Saudi mulai terbuka terhadap berbagai pengaruh dari luar, termasuk teknologi dan perubahan sosial yang semakin berkembang. Hal ini membuat lembaga fatwa menghadapi tuntutan untuk memberikan panduan agama yang tetap relevan dengan keadaan baru ini, sehingga masyarakat Saudi bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai Islam.

Peran lembaga fatwa dalam menjembatani ideologi Wahhabisme dengan tuntutan zaman yang berubah ini menunjukkan bagaimana lembaga tersebut berupaya menjaga stabilitas sosial di negara tersebut. Selain itu, lembaga fatwa juga berperan dalam menjaga identitas Islam yang kuat dalam masyarakat Saudi di tengah arus modernisasi. Lembaga ini berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjaga ajaran Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Peran Lembaga Fatwa dalam Masyarakat

Lembaga fatwa di Arab Saudi memiliki peran yang sangat penting dan mendalam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan seputar agama, lembaga ini juga bertugas menjaga dan menegakkan nilai-nilai moral yang

menjadi landasan hidup masyarakat Saudi. Melalui fatwa, yaitu keputusan resmi berbasis ajaran Islam, lembaga ini memberikan panduan bagi berbagai aspek kehidupan. Misalnya, ketika masyarakat memiliki pertanyaan tentang tata cara beribadah yang benar, hubungan antar anggota keluarga, atau interaksi sosial dalam komunitas, lembaga fatwa memberikan penjelasan yang jelas dan didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang kuat.¹⁴⁸

Selain sebagai panduan spiritual, lembaga fatwa juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Ketika terjadi konflik atau perselisihan di masyarakat, lembaga ini kerap kali dipanggil untuk memberikan saran atau keputusan yang berfungsi sebagai solusi damai. Dengan panduan yang berpijak pada ajaran Islam dan nilai-nilai lokal yang bijaksana, lembaga fatwa membantu masyarakat mengatasi masalah secara adil dan bijak, sehingga dapat mencegah ketegangan sosial.

Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini juga memiliki dampak besar pada keputusan sehari-hari masyarakat. Bukan hanya menjadi pedoman dalam aspek agama, fatwa ini juga diandalkan dalam lingkup keluarga dan komunitas yang lebih luas. Banyak masyarakat Saudi yang menganggap fatwa ini sebagai panduan yang sah karena dasar keagamaannya, sehingga mereka merasa yakin dalam mengambil keputusan berdasarkan fatwa tersebut. Melalui fatwa-fatwa ini, lembaga fatwa turut berperan dalam memberikan pendidikan agama kepada masyarakat, membantu mereka memahami ajaran Islam dengan lebih baik, serta menanamkan nilai-nilai moral yang dianggap penting untuk menjalani kehidupan sehari-

¹⁴⁸ Al-Rasheed, *A History of Saudi Arabia* (Inggris: Cambridge University Press, 2010).

hari. Dengan demikian, lembaga fatwa di Arab Saudi tidak hanya mengarahkan kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga membentuk kehidupan sosial yang stabil dan berlandaskan prinsip agama yang kuat.

Pengaruh Lembaga Fatwa terhadap Kebijakan Negara

Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Arab Saudi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kebijakan negara. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan atau nasihat keagamaan bagi masyarakat umum, tetapi juga menjadi dasar atau rujukan bagi pemerintah dalam membuat undang-undang dan peraturan yang berlaku secara nasional.¹⁴⁹ Ketika pemerintah merumuskan kebijakan baru, terutama dalam hal yang menyangkut nilai-nilai agama, moral, atau masalah sosial, sering kali mereka berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa. Dengan demikian, fatwa membantu memberikan landasan hukum yang dianggap sah oleh masyarakat, karena dianggap mencerminkan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Saudi. Ini membuat kebijakan yang disusun pemerintah memiliki legitimasi di mata masyarakat, yang merasa bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka pegang teguh.

Di sisi lain, lembaga fatwa juga memainkan peran sebagai penasihat resmi bagi pemerintah dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama. Ketika muncul isu atau permasalahan yang memerlukan sudut pandang

¹⁴⁹ Vogel, F. E. (2000). *Islamic law and the legal system of Saudi: Studies of Saudi Arabia* (Vol. 8). Brill.

agama, pemerintah sering meminta pendapat dari lembaga fatwa. Pandangan yang diberikan oleh lembaga ini kemudian menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan tersebut, baik itu dalam hal pendidikan, ekonomi, atau bahkan dalam hukum pidana. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan lembaga fatwa ini memungkinkan fatwa untuk menjadi instrumen yang kuat dalam pembentukan kebijakan negara. Selain itu, hubungan ini juga membantu menjaga stabilitas sosial, karena kebijakan publik yang dibuat selaras dengan norma agama yang dijunjung tinggi di Arab Saudi.

Melalui kerja sama ini, pemerintah memiliki dasar yang sah dan dapat diterima masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada saat yang sama, lembaga fatwa juga dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi lembaga fatwa sebagai penentu moral dan agama di masyarakat, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan kepentingan negara, sehingga tercipta stabilitas dan persatuan di Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Moh Asvin, Moh. Hazim Ahrori, and Ratna Pangastuti. "Ulama Dan Politik Di Arab Saudi." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (2023): 768–78. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4118>.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah V*. Beirut. Dar al-Fikr al-Arabi, 2000.
- Al-Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhit*. Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, 2020.
- Al-Rasheed, M. *A History of Saudi Arabia*. Inggris: Cambridge University Press, 2010.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, and Amanah Aida Qur'an. "Political Economy of the Agricultural Sector in a Review of Development Studies in Indonesia." *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2021): 191. <https://doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3627>.
- Ayu Rahayu Nurhaliza. "Future Gold Commodity: Indonesian Ulema Council Vs Lajnah Daimah Lil Buhuts Al- 'Ilmiyyah Wal Ifta Ayu Rahayu Nurhalizah 1 , Ach. Fageh 2 1." *Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2021): 1–10.
- Bajri, Hilal Kholid, and Akim Akim. "Faktor Domestik Yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al-Nimr." *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 108–24. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.92>.
- Ibnu al-Hajib Abi Amr Jamaluddin Usman bin Umar bin Abi bakr. *Syarh Al-Adhi 'Ala Mukhtashar Al- Muntaha*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto. "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law." *Fitrah , Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 05, no. 2 (2019): 181–206.

- Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, 2020.
- Kechichian, J. A. "The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia." *International Journal of Middle East Studies* 18, no.1 (1986): 53–71.
- Khan, Mehmood. "Saudi Arabia ' s Vision 2030." *Defence Journal* 9, no. 11 (2016): 36–42.
- Maret, Universitas Sebelas. "Vision 2030 : Saudia Arabia's Modernization." *Jurnal Studi Timur Tengah* XV, no. 2 (2022): 137–48.
- Vogel, F. E. (2000). *Islamic law and the legal system of Saudi: Studies of Saudi Arabia* (Vol. 8).

Perkembangan Pendidikan di Saudi

Oleh : Maryam Agusti

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku baik individu maupun kelompok. Melalui pendidikan, kualitas kemanusiaan yang suatu negara inginkan dapat tercapai. Seperti yang dikatakan mantan Presiden Afrika Selatan ini, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan dapat mencerminkan dan menentukan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara di dunia berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya. Termasuk Arab Saudi.¹⁵⁰

Arab Saudi terletak di sudut barat daya Asia. Negara ini adalah negara monarki yang sepenuhnya bergantung pada Al-Quran untuk urusan negara. Agama resminya adalah Islam dengan mayoritas Sunni sementara minoritasnya, yang berjumlah sekitar 33% dari populasi adalah Syiah.¹⁵¹ Arab Saudi terlatak dikawasan strategis yang berbatasan langsung dengan teluk Persia Qatar dan negara persatuan Emirat Arab di sebelah timur dengan negara Oman dan Yaman di Selatan laut merah dan teluk aqaba di sebelah barat dan dengan Jordan Irak dan Quait di sebelah utara. Ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh, kepadatan penduduknya mencapai sekitar 12,3/Km²

¹⁵⁰ Saszlin Rahmadhani et al., “Sistem Pendidikan Di Arab Saudi Dan Perbandingannya Dengan Sistem Pendidikan Di Indonesia,” *Kutubkhanah* 23, no. 2 (2023): 163–83, <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i3.26174>.

¹⁵¹ Maysoon A. Dakhiel, “Saudi Arabian Educational Reforms: A Road from Traditionalism to Modernization,” *British Journal of Education* 7, no. 5 (2017): 69–82, www.eajournals.org.

dengan jumlah populasi Arab Saudi saat ini adalah 37.612.543 jiwa 43% diantaranya berusia dibawah 15 tahun dan 2, 5% berusia dibawah 65 tahun dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,393 %. Raja mempunyai fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Raja juga mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membubarkan Dewan Menteri. Anggota asosiasi Dewan Menteri harus bersumpah setia kepada raja sebelum diangkat, meskipun Dewan Menteri sebenarnya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. Raja-raja yang pernah memerintah antara lain Abdul Aziz, Faishal Ibu Abdul Aziz, Khalid Ibnu Abdul Aziz dan Fahd ·Ibnu Abdul Aziz.

Kondisi sosio-geografis Arab Saudi sangat mendukung bagi perkembangan pendidikan. Pendidikan sudah menjadi perhatian utama di Arab. Arab Saudi telah malangsungkan Pendidikan sejak tahun 1953. Pendidikannya dilaksanakan secara gratis menyeluruh untuk semua penduduk yang semua biayanya ditanggung oleh pemerintah.¹⁵² Data pada tahun 1979 menerangkan bahwa untuk perhitungan biaya pendidikan setiap tahunnya, pemerintah Saudi mengeluarkan 4.000 riyal untuk setiap siswa pertahunnya. Angka ini diprediksi akan mengalami peningkatan dua kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan atau kira-kira pada tahun 1989-1990, hingga mencapai 7.451 Riyal atau sekitar USD 2000 setiap siswa pertahun.¹⁵³

¹⁵² Wahdaniya, Sumiati, and Sandi Pratama, “Pengaruh Tokoh Pembaharu Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Di Arab Saudi,” *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 76–95.

¹⁵³ Sholawati Sholawati, “Sejarah Pendidikan Dan Dakwah Islam Pada Masa Arab Modern,” *Jurnal Studi Islam Dan*

Arab Saudi dalam menangani masalah pendidikan, ditangani oleh dua departemen yaitu pertama *Wuzarah at-Tarbiyah wa at-Ta'lim as-Su'udiyah* yang menangani Pendidikan dasar dan menengah baik Pendidikan umum maupun Pendidikan khusus. Kedua, *Wuzarah at-Ta'lim al'Ali as-Su'udiyah* adalah Kementerian dalam Arab Saudi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan Pendidikan tinggi di Arab Saudi dan mengawasi kebijakan perguruan tinggi dalam negeri. Selain dari dua departemen diatas, ada juga lembaga yang dikenal dengan "*the General Presidency of Girls' Education*" (GPGE). Lembaga ini yang secara khusus menangani Pendidikan bagi anak perempuan. Sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak perempuan yang didirikan ini sempat tertunda karena adanya rasa keberatan dari sebagian orang tua dan ulama yang beranggapan bahwa pendirian sekolah-sekolah modern itu berdampak tidak baik bagi anak perempuan. Namun akhirnya diputuskan karena urgensinya sekolah-sekolah anak perempuan ini bisa berjalan dengan pengawasan dan pengelolaan ulama.

154

Arab Saudi dalam melaksanakan sitem pendidikan dilaksanakan dengan syariat islam yaitu tetap memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun terpisah, keduanya mengikuti kurikulum dan ujian tahunan yang sama. System pendidikan Arab Saudi secara umum dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu

Kemuhammadiyah (JASIKA) 1, no. 1 (2021): 54–63,
<https://doi.org/10.18196/jasika.v1i1.5>.

¹⁵⁴ Muhdi, "Pendidikan Islam Di Saudi Arabia," *Adiba: Journal of Education* 1, no. 1 (2021): 33–48,
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi.

pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan dan pendidikan islam untuk laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan pada pendidikan umum, mereka sama-sama mendapatkan kurikulum dan ujian tahunan yang sama. Pendidikan islam tradisional yang ditujukan untuk anak laki-laki, diutamakan untuk membentuk calon-calon anggota dewan ulama yang focus pembelajarannya adalah pada studi islam dan Bahasa Arab, namun sebagian juga menggunakan kurikulum pendidikan umum.¹⁵⁵

Pendidikan Islam tradisional atau sekolah agama tradisional di Arab Saudi adalah institusi swasta, biasanya didirikan oleh perorangan atau kelompok warga negara dengan kualifikasi memiliki kewarganegaraan Saudi (taba'iyah). Oleh karena itu, madrasah-madrasah ini mandiri, mempunyai ciri khas tersendiri yaitu penekanan pada pembelajaran ilmu-ilmu agama kuno, meskipun beberapa di antaranya kemudian mengikuti kurikulum umum. Hal yang menarik dari sekolah agama swasta ini adalah madrasah-madrasah yang lebih membuka peluang belajar untuk ajanib (orang asing) dibandingkan sekolah agama nasional yang dibangun pemerintah.

Beberapa madrasah tradisional itu diantaranya adalah :

a. Madrasah Ash-shaulatiyyah

Madrasah ini merupakan madrasah tertua dari seluruh madrasah yang ada di Makkah, yang didirikan

¹⁵⁵ Ma'ruf Ma'ruf, "Problem Sosiologis Pendidikan Islam Di Indonesia, Pakistan, Arab Saudi Dan Beberapa Solusi," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 358–83, <https://doi.org/10.21274/taalum.2019.7.2.358-383>.

pada tahun 1291/1871 M oleh seorang dari India bernama al-Syeikh Muhammad Rahmatullah yang telah bermukim di Makkah. Shaulat an-Nisa adalah seorang saudagar perempuan yang mendasari nama madrasah ini. Dia dari India yang merupakan penyandang dana madrasah. Shaulat mendanai berdirinya madrasah ini yang pada awalnya dia ingin mendirikan Ribath di Makkah. Namun, Ribath diyakini sudah sangat banyak di Makkah sementara madrasah belum ada. Jadi, Shaulat mengurungkan niatnya membangun Ribath dan berkontribusi mendanai madrasah. Pada awalnya, madrasah ini hanya ditujukan untuk orang India yang belajar di Makkah, tetapi pada akhirnya madrasah ini dibuka untuk warga ajanib lainnya. Jumlah santri di tahun 1972 diantaranya 70% asalnya dari keturunan Yaman, 20% keturunan India dan Pakistan serta 20% keturunan Saudi.

Mata pelajaran yang diajarkan dalam madrasah ini yaitu 'aqidah, tafsir, hadits, fiqh, mantiq, tarikh Islam, dan ilmu tentang bahasa Arab yang merupakan pelajaran yang sama diajarkan di halaqah masjidil haram. Tujuan dari madrasah ini adalah :

- 1) Melakukan pemerataan pembelajaran dengan memberikan semua kemudahan baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, referensi dan perlengkapan belajar kepada anak-anak Muhajirin yang datang dari berbagai negara termasuk didalamnya anak-anak penduduk Makkah al-Munawwarah.
- 2) Dengan memberikan berbagai keterampilan dalam agama dan disiplin ilmu lainnya, termasuk sains,

tujuannya adalah agar para siswa mencapai kemandirian setelah menyelesaikan studi mereka, sehingga mereka dapat bekerja di berbagai sektor dan terbebas dari beban masyarakat.

- 3) Mencetak para Ulama yang cakap dan terampil dalam Al-Qur'an, yang mencakup qira'ah dan tafsir, serta studi Al-Qur'an. Para individu ini akan kembali ke negara asal mereka untuk mendidik orang lain tentang cara membaca Al-Qur'an dan mengungkap makna dalam ayat-ayatnya.

b. Darul Hadits

Darul hadits didirikan atas kesedihan kepada lemahnya perhatian hadits sejak abad ke-9 H. madrasah ini didirikan di Jiad (Barbarila) pada tahun 1352 H/1932 M. Materi yang diajarkan dalam madrasah ini meliputi Hadits, tafsir al-Qur'an, sastra dan tata Bahasa Arab. Kitab hadits yang menjadi pegangan diantaranya shahih imam bukhari, shahih imam muslim, jami'at-tirmizi, sunan abu Dawud, an nasa'I, dan ibn majah. Waktu Pendidikan dimadrasah darul hadits awalnya hanya dua tahun namun seiring bertambahnya waktu menjadi lima tahun.

c. Madrasah Darul 'Uluum

Madrasah ini didirikan pada tahun 1353 H/ 1933 M di Syi'b 'Ali Makkah oleh warga dari Indonesia yang dipelopori Sayyid Muhsin al-Musawii al-Hadramii. Madrasah darul 'uluum muridnya kebanyakan berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Burma. Pengajar dimadrasah ini banyaknya orang Makkah yang berdarah melayu seperti syeikh Yasin

Padang, syeikh Zakariya Bilal dan syeikh Ibrahim Dawud al-Fatani. Seperti umumnya madrasah swasta, status ijazah Darul 'ulum ini dianggap ghairu mu'adalah dengan ijazah negeri di Saudi Arabia, namun demikian para alumni dari Darul 'ulum banyak yang diterima di universitas di al-Azhar Mesir, sekalipun alumnus 'Aliyah Darul 'Ulum disamakan dengan ijazat tsanawiyah al-Azhar (Maksum Muchtar, tth). Dunia Arab pada umumnya saat itu dalam urusan pendidikan menjadikan Mesir sebagai prototype.¹⁵⁶

Arab Saudi dalam sistem pendidikannya terdiri pendidikan dasar, pendidikan sekunder dan pendidikan tinggi. Uraianya sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar

Dalam pendidikan dasar, sistem pendidikannya dibagi lagi menjadi 2 yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah. Pada sekolah dasar, untuk anak usia 6 sampai 12 tahun dengan waktu pendidikan selama 6 tahun. Pelajaran wajib yang dipelajari diantaranya adalah sejarah, bahasa Arab, seni, geografi sains, matematika, studi islam, ekonomi rumah tangga (khusus Perempuan) dan pendidikan fisika dikhususkan untuk laki-laki. Yang kedua yaitu sekolah menengah. Sekolah menengah adalah sekolah untuk anak usia 12-15 tahun dengan waktu pendidikan selama 3 tahun. Pelajaran wajib yang dipelajari sama dengan Pelajaran wajib pada sekolah dasar.

¹⁵⁶ Muhdi, "Pendidikan Islam Di Saudi Arabia."

b. Pendidikan Lanjutan

Pendidikan lanjutan terdiri dari pendidikan lanjutan umum, pendidikan lanjutan agama, dan pendidikan lanjutan teknik. Pendidikan ini untuk anak usia 15-18 tahun dengan waktu pendidikan selama 3 tahun. Pada pendidikan lanjutan umum siswa mendapatkan pelajaran yang sama. Kemudian di 2 tahun terakhir mulai dibagi menjadi sains dan sosial. Siswa yang memiliki grade 60% lebih boleh memilih keduanya, sedangkan siswa yang gradenya kurang dari 60% harus memilih sosial. Untuk Pelajaran umum pada pendidikan lanjutan umum diantaranya kimia, biologi, bahasa arab, bahasa inggris, Sejarah, geografi, matematika, pendidikan agama, ekonomi rumah tangga (khusus Perempuan) dan pendidikan fisika dikhususkan untuk laki-laki.

Kedua, pendidikan lanjutan agama dengan pelajaran bahasa inggris, bahasa arab dan literature, Sejarah, geografi, dan pendidikan agama. Selanjutnya pendidikan lanjutan teknik yang dibagi lagi menjadi 3 tipe yaitu :

- 1) Teknikal. Tipe yang memuat pelajaran otomotif, arsitektur, mekanika mesin, mekanika metal, elektrik, otomotif, radio dan televisi. Pelajaran tambahan pada tipe ini diantaranya adalah bahasa arab, bahasa inggris, fisika, pendidikan fisika dan pendidikan agama.
- 2) Komersial. Tipe yang memuat pelajaran bahasa arab, korespondensi komersial, akuntansi dan pembukuan, manajemen dan kesekretariatan,

matematika, geografi, matematika ekonomi dan pendidikan agama.

- 3) Agricultural. Tipe ini memuat pelajaran agronomi, ekonomi agrikultur, biologi terapan, perkembangbiakan hewan, kimia terapan, biologi terapan, fisika terapan, matematika terapan, bahasa arab dan inggris, hortikultural, manajemen pertanian dan lahan, pemasaran, nutrisi pangan dan pendidikan agama.

c. Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi di Arab Saudi meliputi universitas, institute untuk perempuan, institute administrasi public dan institute keguruan. Semua universitas dibawah supervisi Kementaian Pendidikan Tinggi kecuali Universitas islam Madinah yang merupakan universitas terbaik untuk pendidikan agama islam. Pendidikan tinggi Arab Saudi dibagi menjadi 2 jenis yaitu universitas dan non universitas.

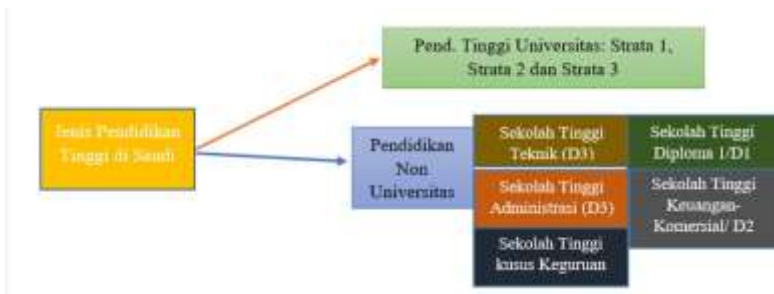
- 1) Universitas. Pendidikan ini sama dengan universitas pada umumnya yaitu Srata 1 (Bachelor), Strata 2 (Master) dan Strata 3 (Doktor). Untuk pendidikan S2 ada dua jalur yaitu dengan tesis atau dengan kuliah. Mahasiswa yang mengambil jalur tesis, ia harus menyelesaikan tesisnya kurang lebih selama satu tahun setelah semua mata kuliah yang sudah ditentukan selesai. Sedangkan untuk mahasiswa jalur kuliah, mahasiswa hanya perlu menyelesaikan jumlah mata kuliah yang lebih banyak dan menyelesaikan seluruh mata kuliah yang sudah ditentukan. Untuk S3, waktu pendidikan yang ditempuh adalah 3 tahun setelah menyelesaikan

pendidikan S2. Mahasiswa S3 harus menyelesaikan mata kuliah yang telah ditentukan serta menyusun disertasi yang merupakan hasil reset independent yang telah dilakukan. Selain disertasi, tambahan syarat untuk S3 juga kadang diperlukan seperti minimal mempublikasikan jurnal internasional atau konferensi internasional.

- 2) Non Universitas. Ada beberapa jenis pendidikan pada pendidikan tinggi non universitas, yang pertama yaitu *technical collage*. Pendidikan ini setara dengan pendidikan diploma yang diselesaikan selama 3 tahun. Bidang yang tersedia didalam pendidikan ini diantaranya sistem elektrikal otomatis, control otomatis, otomotif, instalasi elektrik, perlengkapan elektrik, kimia industry, elektronik industry dan teknik produksi. Kedua, *higher technical*. Pendidikan yang diselesaikan selama 1 tahun atau setara dengan D1. Ketiga, *institute higher technical institutes for financial and commercial science*. Pendidikan ini dilaksanakan selama 2 tahun yang merupakan pendidikan khusus untuk ilmu keuangan dan komersial dengan kurikulumnya yaitu asuransi, bahasa inggris, korespondensi komersil dan bisnis, akuntansi, pemasaran dan periklanan, kebudayaan islam, pembelian dan inventori serta kesekretariatan. Keempat, *the institute of public administration*. Pendidikan ini dilakukan selama 2 sampai 3 tahun dengan bidang yang tersedia adalah perbankan yang dilaksanakan selama 2 tahun, pemrosesan data dan elektronik 2,5 tahun pendidikan, administrasi rumah sakit 2 tahun pendidikan, ilmu kepustakaan 3 tahun

pendidikan, ilmu personal 2 tahun pendidikan, ilmu kesekretariatan 2 tahun pendidikan dan ilmu pergudangan selama 2 tahun pendidikan. terakhir yaitu *teacher training collage*. Pendidikan ini merupakan pendidikan keguruan yang dibagi lagi kedalam 3 jurusan yaitu guru sekolah dasar dan menengah pertama (*primary school*), guru sekolah menengah atas (*secondary school*), dan guru pendidikan lanjut (*higher education*).¹⁵⁷

Berikut penulis gambarkan klasifikasi jenis



Gambar 1. Jenis-jenis Pendidikan Tinggi di Arab Saudi

Pendidikan Tinggi di Arab Saudi:¹⁵⁸

Kurikulum yang digunakan pada system pendidikan Saudi Arabia mengambil dari kurikulum Mesir. Hal ini dikarena Mesir menjadi salah satu pusat

¹⁵⁷ Ma'ruf, "Problem Sosiologis Pendidikan Islam Di Indonesia, Pakistan, Arab Saudi Dan Beberapa Solusi."

¹⁵⁸ Muhamad Basyrul Muvid, "Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 160, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.3018>.

Pendidikan umum dan islam disunia yang dikenal dengan Universitas Al-. Sehingga tak heran Arab Saudi mengambil dasar kurikulum dari Mesir untuk system Pendidikan. Mata pelajaran keagamaan yang ditekankan pada proses pembelajaran menjadi karakteristik kurikulum Mesir ini.¹⁵⁹

Pola pendidikan di Kerajaan Saudi Arabia masih relative sederhana sesuai kondisi pemerintahan ketika itu sehingga persoalan-persoalan pendidikan dapat diselesaikan dengan baik. Arab Saudi mengalami perubahan pada system pemerintahan setelah berhasil mengalahkan Turki Usmani yang hal ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Munculnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah adalah pengembangan dari system pendidikan dan pengajaran yang telah lama berlangsung dimasjid-masjid maupun pusat-pusat pengajian lainnya merupakan tanda dari sistem pendidikan di Arab yang berubah. Maka sejak itu dimulailah pembaharuan sistem pendidikan islam melalui 3 pola pemikiran.

Pertama, pendidikan yang berorientasi pada pendidikan modern Barat. Bangsa barat yang mencapai kemajuan dibidang iptek dan teknologi merupakan pengembangan iptek dan kebudayaan dari dunia islam. Dengan menerapkan pola pendidikan yang berorientasi pada pendidikan barat, itu bisa dijadikan sebuah cara untuk pemulihan kejayaan dan kekuatan umat islam kembali. Dalam praktiknya, bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan pengiriman pelajar untuk mempelajari dan menguasai iptek ke Prancis dan

¹⁵⁹ Rahmadhani et al., "Sistem Pendidikan Di Arab Saudi Dan Perbandingannya Dengan Sistem Pendidikan Di Indonesia."

membangun sekolah-sekolah umum serta madrasah yang diperlukan di Semenanjung Arabiyah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan modern dengan sistem barat.¹⁶⁰

Kedua, pembaharuan pendidikan yang bertujuan untuk pemurnian ajaran islam asli yang tidak tercampur dengan sesuatu lain. Alasannya karena ajaran islam murni sudah banyak ditinggalkan. Ajarannya sudah banyak tercampur dengan TBC (takhayul, bid'ah dan churafat. Kemunduran umat islam dikarenakan meninggalkan keyakinan dan prinsip Islam yang sebenarnya kemudian mengadopsi dan mengambil ajaran dari luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam, yang tidak terkontaminasi oleh pengaruh atau penafsiran budaya dan paham asing. Jika seseorang memilih untuk mengikuti tuntunan agama, maka ia tidak akan hilang arah selamanya. Di dalam kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern islam memiliki peranan yang sangat penting. Namun kemerosotannya terjadi ketika umat Islam mengabaikan dan meninggalkan prinsip serta nilai-nilai yang sudah seharusnya diterapkan.¹⁶¹

¹⁶⁰ S L Azis, "Pendidikan Islam di Saudi Arabiyah Dan Sekitarnya Pasca Jatuhnya Turki Usmani," *Tarbiyah Assultaniyah* 5 (2016): 137–67, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultaniyah/article/view/23%0Ahttp://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultaniyah/article/viewFile/23/19>.

¹⁶¹ Azyumardi Azra, "Sejarah Pendidikan Islam Mengulas Perjalanan Dari Masa Klasik , Pertengahan Hingga Masa Modern," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 06, no. 02 (2024): 535–1539.

Ketiga, pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Melalui para tokohnya, negara-negara islam mengembangkan ide nasionalisme yang disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan mereka. Untuk meningkatkan mutu kehidupan umat, tidak hanya mengambil dari barat saja tetapi juga mengambil nilai budaya yang bersangkutan agar tidak bertentangan dengan ajaran islam.¹⁶²

Pendidikan Saudi Arabia paling awal ada di daerah perkotaan dan disediakan untuk anak laki-laki di sekolah agama yang disebut Kuttaab, oleh para ulama yang terpelajar. Al-Qur'an studi Islam diajarkan kepada para siswa yang diberikan sertifikat untuk mengajar mata pelajaran yang telah mereka kuasai. Sekolah-sekolah di Mekkah ada tiga jenis: Ottoman didirikan pada tahun 1905, Hashimite didirikan pada tahun 1913, dan sekolah swasta yang didirikan jauh lebih awal. Sekolah Alsulatiyah adalah sekolah swasta pertama yang didirikan pada tahun 1872. Kurikulumnya dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan di India karena para guru berasal dari sana. Lulusan mengajar di Halaquat (kelompok) di Masjidil Haram di Makkah. Pada tahun 1912, sekolah tersebut berkembang menjadi sebuah lembaga yang memiliki empat tahap studi: empat tahun pra dasar, empat tahun di dasar, empat tahun di menengah, dan dua tahun di tahap sekolah menengah atas.

Sistem pendidikan formal pertama didirikan pada tahun 1924 dan diawasi oleh administrasi pendidikan yang disebut Modeeriat Al-Maarif Al-Ammah, pada tahun 1924. Sekolah menengah pertama dibuka pada tahun 1936

¹⁶² Azyumardi Azra.

untuk mempersiapkan siswa yang akan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Selain itu, pada tahun 1944, sebuah sekolah untuk mempersiapkan hakim dibuka di Taif. Pendidikan terdiri dari enam tahun, tiga tahun menengah pertama, dan tiga tahun menengah atas. Kemudian, Pada tahun 1945, sekolah pertama untuk para perantau didirikan. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, sebuah perguruan tinggi untuk studi Islam, Syariah, didirikan pada tahun 1949 untuk mempersiapkan para hakim dan guru studi Islam untuk sekolah menengah. Pada tahun 1952, Sekolah Tinggi Guru dibuka untuk mempersiapkan guru tingkat menengah dalam mata pelajaran lainnya. Tahun berikutnya Kuliyat Al-Shari'ah, perguruan tinggi hukum Islam, didirikan di Riyadh.¹⁶³

Lembaga Pendidikan islam di Saudi Arabia mengalami pembaharuan dalam materi pelajaran maupun metode yang digunakan dalam mengajar yang disesuaikan dengan perkembangan modern pada awal abad ke- 20. Pembaharuan itu berkenaan dengan kedekatan hubungan suatu negara dengan pikiran Barat. Pendidikan di Arab Saudi mulanya berbentuk Kuttab yang sudah ada sejak zaman pra-islam. Kuttab dalam dunia islam sendiri merupakan lembaga pendidikan dasar yang pertama. Materi yang diajarkan dikuttab awalnya adalah membaca dan menulis dengan puisi Arab, kemudian ditambah dengan pelajaran pokok-pokok ajaran islam dan menghafalkan Al-Qur'an.

Lembaga swasta mulai menyediakan pendidikan khusus pada tahun 1952. Pemerintah membuka lembaga

¹⁶³ Maysoon A. Dakhiel, "Saudi Arabian Educational Reforms a Road from Tradisionalism to Modernization," *English Journal of Education* 80, no. 7 (2017): 311–20, (www.eajournals.org).

pendidikan khusus pada tahun 1959. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan dan Layanan Sipil, dan Kementerian Kesehatan mengawasi pendidikan khusus. Ada beberapa jenis lembaga seperti berikut ini, misalnya sekolah untuk tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara, serta lembaga pendidikan kognitif.¹⁶⁴

Arab Saudi telah memperhatikan pendidikan sejak penyatuan hukum negeri pada tahun 1932 dan khususnya pada tahun 1954 saat dibentuknya Kementerian Pendidikan. Raja Faisal Ibn Abd Aziz pada tahun 1954 menggantikan ayahnya memegang pemerintahan. Saat pemerintahan Raja Faisal Ibn Abd Aziz, beliau secara besar-besaran mengadakan pembaharuan didalam bidang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Mahasiswa yang berprestasi diberi beasiswa untuk studi spesialis dan yang orang tuanya kurang mampu dalam pembiayaan sekolah anaknya dibantu oleh negara.¹⁶⁵

Pada pertengahan abad ke-20, Arab Saudi mulai menyelenggarakan Perguruan Tinggi. King Sa'ud University merupakan universitas pertama di Riyadh yang didirikan pada tahun 1953 dan masuk kedalam salah satu dari tiga universitas terbaik di Arab Saudi. Perguruan Tinggi di Arab Saudi saat ini terdapat 26 Perguruan Tinggi Negeri dan sekitar 8 Perguruan Tinggi Swasta. Ada salah

¹⁶⁴ Informasi Artikel and A B S T R Ak, "222472-Kuttab-Sebagai-Potret-Pendidikan-Dasar-P" 1, no. 2 (2016): 98–111.

¹⁶⁵ Didin Sirojudin and Waslah -, "Signifikansi Pengembangan Mutu Pendidikan Arab Saudi," *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 3 (2020): 63–86, <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i3.845>.

satu universitas Arab Saudi yang memiliki cabang hamper diseluruh dunia, yaitu Universitas Islam Imam Mohammad Ibnu Saud/ Imam Mohammad Saud Islamic University. Universitas ini memiliki cabang hamper diseluruh dunia termasuk Indonesia yaitu LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab).¹⁶⁶ Dalam studi islam, tempat terbaik untuk program Master adalah Arab Saudi. Selain studi islam, lembaga Saudi modern juga menyediakan berbagai program Master lain diantaranya dalam pengetahuan, seni, kedokteran, teknik, pertanian, ilmu computer, dan ilmu informasi.¹⁶⁷ Selain membuka perguruan tinggi, pemerintah juga mendirikan pusat penelitian Kota Raja Abdulaziz untuk Sains dan Teknologi disebut sebagai Kota Sains dan Teknologi Raja Abdulaziz untuk membantu para peneliti di berbagai bidang, termasuk pendidikan.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Anwar Hasbi, "Politik Luar Negeri Arab Saudi Dan Ajaran Salafi-Wahabi Di Indonesia," *Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations* 1, no. September (2016): 15–30.

¹⁶⁷ Sirojudin and -, "Signifikansi Pengembangan Mutu Pendidikan Arab Saudi."

¹⁶⁸ Dakhiel, "Saudi Arabian Educational Reforms a Road from Tradisionalism to Modernization."

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, Informasi, and A B S T R Ak. “222472-Kuttab-Sebagai-Potret-Pendidikan-Dasar-P” 1, no. 2 (2016):98–111.
- Azis, S L. “Pendidikan Islamdi Saudai Arabiyah Dan Sekitarnya Pasca Jatuhnya Turki Usmani.” *Tarbiyah Assultaniyah* 5 (2016): 137–67. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultaniyah/article/view/23%0Ahttp://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultaniyah/article/viewFile/23/19>.
- Azyumardi Azra. “Sejarah Pendidikan Islam Mengulas Perjalanan Dari Masa Klasik , Pertengahan Hingga Masa Modern.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 06, no. 02 (2024): 535–1539.
- Dakhiel, Maysoon A. “Saudi Arabian Educational Reforms: A Road from Traditionalism to Modernization.” *British Journal of Education* 7, no.5 (2017): 69–82. www.eajournals.org.
- . “Saudi Arabian Educational Reforms a Road from Tradisionalism to Modernization.” *English Journal of Education* 80, no. 7 (2017): 311–20. (www.eajournals.org).
- Hasbi, Anwar. “Politik Luar Negeri Arab Saudi Dan Ajaran Salafi-Wahabi Di Indonesia.” *Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations* 1, no. September (2016): 15–30.
- Ma’ruf, Ma’ruf. “Problem Sosiologis Pendidikan Islam Di Indonesia, Pakistan, Arab Saudi Dan Beberapa Solusi.” *Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2(2019): 358–83.
- <https://doi.org/10.21274/taalum.2019.7.2.358-383>. Muhdi. “Pendidikan Islam Di Saudi Arabia.” *Adiba: Journal of Education* 1, no. 1 (2021): 33–48. http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi.
- Muvid, Muhamad Basyrul. “Perbandingan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Dan Kurikulum Di Indonesia, Iran Dan Arab Saudi.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 160. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.3018>.
- Rahmadhani, Saszlin, Hakmi Wahyudi, Yudha Okta Anuhgra, and

- Suriyah Suriyah. "Sistem Pendidikan Di Arab Saudi Dan Perbandingannya Dengan Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Kutubkhanah* 23, no. 2 (2023): 163–83.
<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i3.26174>. Sholawati, Sholawati. "Sejarah Pendidikan Dan Dakwah Islam Pada Masa Arab Modern." *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah* (JASIKA) 1, no. 1 (2021): 54–63. <https://doi.org/10.18196/jasika.v1i1.5>.
 Sirojudin, Didin, and Waslah -. "Signifikansi Pengembangan Mutu Pendidikan Arab Saudi." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 3 (2020): 63–86. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i3.845>.
 Wahdaniya, Sumiati, and Sandi Pratama. "Pengaruh Tokoh Pembaharu Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Di Arab Saudi." *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 76–95.

BAB III

ARAB SAUDI DAN TANTANGAN GLOBAL

Penyusun :

Latifah Ainun Hardini

Ismi Romadona

Hubungan Arab Saudi dengan Iran

Oleh : Latifah Ainun Hardini

Ikatan antara Arab Saudi dengan Iran dapat dikatakan memiliki hubungan yang kurang baik. Hal itu terbukti berawal dari perubahan kekuasaan untuk menjadi penerus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Iran dan Arab Saudi merupakan dua negara yang memercayai sekte berbeda yaitu Sunni dan Syiah.¹⁶⁹ Perbedaan sekte inilah yang kemudian menjadikan kedua negara memiliki ketahanan saat di kawasan Timur Tengah. Iran ialah negara yang mempunyai rakyat pluralitas atau sekitar 85% memeluk paham Syiah, sementara itu Arab Saudi 95% pluralitas rakyatnya berpaham Sunni. Hal tersebut mengakibatkan ikatan antara kedua negara memiliki celah dan salah satu aspek yang menyebabkan kian kuatnya pertikaian yang telah berjalan selama puluhan tahun. Kaum Sunni memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khatab, dan Utsman bin Affan. Sedangkan, kaum Syiah menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak lain ialah sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang figur yang mulia dan patut dijadikan pemimpin umat. Kaum Syiah juga tidak memperkenankan atas kekuasaan dari ketiga khalifah kaum Sunni, mereka

¹⁶⁹ Rezky Ramadhan Antuli and Wandi Abbas, “Faktor Penyebab Ketegangan Hubungan Arab Saudi Dan Iran Di Kawasan Timur Tengah,” *MANDAR: Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 108–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2944>.

mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib telah diutus langsung oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁷⁰

Revolusi Iran tahun 1979 adalah pemicu awal kian memburuknya ikatan antara Arab Saudi dengan Iran. Bermula dari pemerintah Saudi yang menyatakan adanya kuasa baru serta Raja Khalid menyerahkan surat kepada pemimpin agung Iran yaitu Ayaatollah Khomeini yang memuat ucapan selamat atas keberhasilan dalam pembangunan republik baru. Terlebih lagi, pemerintah Saudi juga menyatakan mengenai persetujuan Arab Saudi untuk mewujudkan hubungan baik antara Arab Saudi-Iran serta menyusun kolaborasi berkenaan dengan “solidaritas Islam” sebagai pokok keterikatan hubungan antara kedua negara. Berkisar pada pertengahan tahun 1979, Iran memberi sokongannya mengenai desas-desus Syiah di wilayah Timur Tengah. Pemimpin agung Iran yakni Khomeini juga menyampaikan bahwa Iran sendiri bertindak sebagai pemrakarsa revolusi. Tetapi, negara Iran yang beralih bentuk menjadi negara Syiah menyebabkan Arab Saudi lebih mengembangkan supremasi Wahabi di daerah Timur Tengah.

Berkisar antara tahun 1980-1988 ikatan antara Arab Saudi dengan Iran mendapati kekacauan yang diikuti dengan adanya peperangan antara Iran dengan Irak. Konflik antara Iran dengan Irak ini timbul diakibatkan oleh kedudukan paham Iran dan geopolitik wilayah Irak. Informasi atau rumor yang menyebar adalah

¹⁷⁰ Anin Lailatul Qodariyah, “Peranan Dan Kepentingan Nasional Indoneia Dalam Penyelesaian Konflik Antara Arab Saudi- Iran Tahun 2016” 8, no. 1 (2023): 54–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v8i1.7949>.

bahwa telah terjadi kompetisi kultur kuno antara kebudayaan Persia dan Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi memegang konflik distingtif dengan Irak, Arab Saudi masih memberikan sokongan pada kekuasaan Saddam Hussein yang terletak di Baghdad. Arab Saudi juga memberikan anggaran sebanyak 25 milyar US Dollar serta melakukan tekanan kepada wilayah-wilayah teluk agar turut mendukung dalam membagikan bantuan dana kepada Irak.

Penganut paham Sunni-Syiah merebak tak cuma di wilayah Timur Tengah, namun di beragam kawasan pada belahan dunia. Saudi Arabia ialah wilayah paham wahabi-Sunni, kemudian Iran dengan paham Syiah ialah dua wilayah yang mempunyai dampak yang kuat di wilayah Timur Tengah. Dua negara ini membawa paham yang berlainan, yang menyebabkan kerap terjadi permusuhan, terlebih saling menyokong dengan musuh yang bertentangan pada negara yang tengah berlangsung pertumpahan darah. Ibarat gambaran Syiah, Iran sungguh bersangkutan dalam menyebarkanluaskan akibatnya di kawasan, demikian juga dengan Arab Saudi. Jadi, sokongan kepada wilayah yang berselisih sudah menyebabkan negara yang berselisih tersebut kian merosot. Padahal, Arab Saudi dan Iran masih mengharapakan agar dapat mengembangkan suremasi dan alirannya. Aliran ini membuat suatu upaya yang berarti untuk kedua negara dalam menguatkan dampak mereka

agar bisa dilalui dengan strategi kultur, sains, ekonomi, politik, maupun perang.¹⁷¹

Arab Saudi dan Iran sudah memerankan sebagai saingan domestik sepanjang tiga dasawarsa lebih. Pemusuhan bermula semenjak tahun 1979 saat Revolusi Iran. Kerajaan Saudi, melandaskan dasarnya pada Islam menganggap penguasaannya terganggu karena adanya Republik Islam. Ikatan tersebut menjadi memburuk selama tahun 1980-an, semasa Arab Saudi dengan diam-diam menyokong Irak semasa perang Iran-Irak. Di tahun 2011 sewaktu Arab mengalami musim semi, kerusuhan menjadi kian parah. Dua negara tersebut berseteru perihal perselisihan regional, terutama di Suriah dan Yaman. Ratusan warga Iran wafat terpijak saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi pada September 2015. Iran menduga Arab Saudi menjalankan kesalahan dalam penjagaan, serta pemimpin-pemimpin Arab Saudi menduga Iran bermain politik selepas bencana tersebut. Selepas Arab Saudi menghukum tokoh Syiah Nimr al Nimr pada Januari 2016, para demonstran menyerbu kedutaan Saudi di Teheran. Alhasil, Saudi menghentikan ikatan politik dengan Iran.¹⁷² Kubu Arab Saudi menyatakan kejadian tersebut adalah “kekacauan yang

¹⁷¹ Ihsan Hamid and Ozi Setiadi, “Arab Saudi Dan Iran: Kontestasi Ideologi Dan Dampaknya Di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring,” *Politea* 4, no. 1 (2021): 129, <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10453>.

¹⁷² Ahmad Zainal Mustofa, Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora, and Universitas Gadjah Mada, “Kepentingan China Sebagai Aktor Di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi Dan Iran” 14, no. 2 (2023): 253–68, <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.253-268>.

telah dirancang” yakni para jemaat haji Iran melaksanakan tindakan unjuk rasa kemudian wafat terijak-pijak dalam keributan.¹⁷³ Selain itu, pihak Iran mengungkapkan bahwa kejadian itu merupakan “pembunuhan yang dirancang” Dimana petugas pengamanan Saudi secara terencana menghabisi jemaat haji Iran yang tengah melangsungkan unjuk rasa. Kejadian tersebut bertepatan dengan masa akhir pertikaian Iran-Irak yakni Arab Saudi (bebarengan dengan negara-negara Teluk lainnya) dengan jelas menyumbang bantuan perang kepada Irak. Iran menentang keras Arab Saudi akibat kejadian Mekah 1987 kemudian mengakhiri ikatan politik bersama Arab Saudi.

Secara spesifik, perdamaian Iran-Saudi ini bisa diuraikan dengan tiga tahapan yakni internal, teritorial, dan universal. Di tahap internal, gerakan Iran diartikan menjadi komponen atas dogma “Look East” serta “Neighbourhood Policy” yang dibawa oleh Presiden Ebrahim Raisi. Strategi memandang ke Timur bermaksud agar dapat mengoptimalkan ikatan antara Tiongkok dan Rusia, sementara itu strategi kawasan mementingkan negara-negara di sekitar Iran menjadi rekan ekonomi serta politik khusus. Dogma ini diisyaratkan dalam rencana memulihkan ketegangan Amerika Serikat dan Eropa. Pada sisi yang lain, pemulihan hubungan ialah satu diantara usaha utama Saudi dalam menciptakan rencana pembaruan sosial dan ekonomi yang diangkat dalam visi

¹⁷³ Hilal Kholid Bajri and Akim Akim, “Faktor Domestik Yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al-Nimr,” *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 108–24, <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.92>.

2030. Kerajaan Arab Saudi mendapati apabila perolehan rencana penuh ambisi ini berdasar pada kestabilan teritorial. Hal tersebut bisa digapai dengan menormalisasi hubungan dengan Iran.

Di satu sisi, dasar China menjadi penengah adalah usaha mereka untuk membuktikan keberadaannya sebagai pemuka internasional yang bisa dipercaya di wilayah Timur Tengah yang objektif. Selaku perantara, China sudah memperlihatkan apabila mereka memiliki kedudukan yang mendukung dan pasti bermaksud untuk memperbaiki relevansi kesejahteraan dan perekonomiannya. Aksi oportunis China telah menjumpai harapan untuk memperlihatkan keahlian dalam kebijaksanaan soft power-nya dengan mengakomodasi negara-negara yang tersangkut persaingan agar memulihkan ikatan kedua pihak. Normalisasi ikatan antara Saudi-Iran tersebut bisa memperbaiki kondisi politik Timur Tengah. Kondisi ini bertepatan dengan menyamakan dan menghubungkan kedua terkemuka utama tersebut kepada harapan global China.

Perselisihan Arab Saudi dan Iran mempunyai jalur autentik yang panjang. Namun, sederhananya, perselisihan ini bertumpu pada beberapa alasan. Sebab pertama ialah konflik pemikiran antar dua negara tersebut. Paham Sunni yang diyakini Arab Saudi serta Syiah yang diyakini Iran menggambarkan dua paham yang bersaing serta tidak bisa bersua. Eksekusi mati kepada Nimr al Nimr seorang tokoh Syiah, yang menetap di Arab Saudi adalah contoh sederhana perselisihan aliran tersebut. Diduga ia berupaya menggoncang penguasaan Wahabi

dari dalam, oleh karena itu ia dieksekusi mati pada penghujung Desember.

Sebab kedua, berpengaruh pula pada peselisihan yang timbul antara Arab Saudi dan Iran, yaitu pernyataan bila tiap-tiap negara menganggapnya menjadi negara pemeluk agama Islam dengan bentuk yang berlainan. Saudi merupakan negara yang memiliki dua area yang sangat suci dalam Islam, Makkah dan Madinah, hingga menuturkan diriya menjadi pemuka Sunni dunia, sementara itu Iran mempunyai pemeluk Syiah terbanyak dunia kemudian semenjak revolusi Iran di tahun 1979 menjadi pemimpin dunia Syiah. Sebab tersebut biasa timbul dikarenakan berhubungan kuat tentang kesaksian dunia internasional atas realitas penguasaan dan kekuasaan keperluan politik.

Sebab lainnya ialah minyak. Minyakpun diduga sebagai sebab berpengaruh sebagai faktor terus menegangnya perselisihan dua negara tersebut. Arab Saudi dan Iran merupakan wilayah-wilayah penting di kawasan negara Arab Teluk. Kedua negara tersebut adalah produsen minyak paling banyak di dunia. Walaupun kuantitas minyak yang diperoleh Iran tak sebesar Arab Saudi, namun Iran memerankan dampak yang penting pula di wilayah tersebut. Terlebih rancangan bom atom Iran sudah menjadikan daerah disekitarnya (Amerika dan negara-negara Eropa) was-was. Dalam latar belakang hukum Islam, perdagangan minyak dan pengaruh Arab Saudi sebagai pemegang ketahanan yang hakiki dapat memiliki beberapa keterikatan. Penguasaan Sumber Daya Alam: Hukum Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam ialah hak bersama umat manusia dan Allah sebagai

Pemilik sejati. Maka dari itu, pengendalian serta penggunaan sumber daya alam, termasuk minyak, perlu digunakan dengan adil dan berkeadilan. Dalam hal ini, Arab Saudi sebagai pemilik cadangan minyak yang besar memiliki peranan untuk menggunakan sumber daya ini dengan penuh pertimbangan, melestarikan alam, serta menjamin keuntungannya bisa dinikmati oleh masyarakat secara merata.¹⁷⁴

Pada permulaan tahun 2016, bumi dikagetkan dengan permasalahan yang kembali berlaku di antara Arab Saudi dengan Iran yang memang semenjak dulu kedua negara ini merupakan negara di Timur Tengah yang kurang baik kekerabatannya. Permasalahannya ini bermula pada 2 Januari 2016, dimana pemerintah Riyadh sudah memberitakan bahwa ada 47 orang yang satu diantaranya ialah Ulama Besar Syi'ah Nimr al Nirm. Selepas beberapa saat, diberitakan kemudian disampaikan rakyat Iran menjalankan sip rotes dengan berupaya masuk ke Gedung kedutaan, menghancurkan dan membakar kedutaan Arab yang terletak di Teheran. Dampak tindakan ini, Arab Saudi memohon kedutaan Iran agar pergi lalu ditetapkan hubungan politis antara dua negara tersebut.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Trisia Megawati Kusuma Dewi, "Hubungan Islam Dan Barat: Benturan Atau Kerjasama," *The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 1 (2024): 13–21, <https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.521>.

¹⁷⁵ Lila Agustin Triana Sari, Pipin Nabila, and Depict Pristine Adi, "Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Mediator Konflik Antara Arab Saudi Dengan Iran Tahun 2016," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 4, no. 2 (2020): 233, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.768.

Menegangkannya ikatan kedua negara ini tak hanya menimbulkan penghentian hubungan politis antara Arab Saudi dengan Iran, namun Negara-negara teluk sekutu Arab Saudi turut serta beramai-ramai menghentikan hubungan politis dengan Iran, yakni Bahrein, Sudan, Yordania, Kuwait, Qatar, Djibouti serta Somalia. Sementara Uni Emirat Arab memutuskan akan meninggalkan kedudukan ikatannya bersama Iran. Banyaknya negara-negara yang turut serta menetapkan untuk memutuskan ikatan politik karena beranggapan apabila Iran sudah melawan perjanjian Internasional dengan tidak melindungi keamanan diplomat.

Ramainya Negara yang turut berpartisipasi untuk mengakhiri ikatan politis bersama Iran menjadikan Indonesia dengan mayoritas adalah pemeluk Islam terbanyak juga meminta dalam persekutuan demi menghentikan ikatan diplomatik, namun Presiden Jokowi dengan gamblang menentang permintaan tersebut yang berasal dari Arab Saudi untuk menyokong permasalahannya dengan Iran. Sehingga jalan yang dilalui Indonesia dalam menanggapi pertikaianya antara Arab Saudi dengan Iran adalah diposisi netral.

Perseteruan dengan dalih dominasi politis, kepercayaan dan minyak bisa menimbulkan remuknya pertikaian negara-negara tersebut. Hal ini menjadi dampak buruk dalam perdagangan menyeluruh yang sampai sekarang sangat memerlukan minyak bumi sebagai modal esensial untuk memajukan perekonomian. Walaupun demikian, persoalan kedua negara ini dapat mempengaruhi serta berimbas bagi politik Kawasan.

Revolusi Iran lebih spesifik diibaratkan menjadi pelaksana pertikaian Arab Saudi dan Iran yang menimbulkan ikatan politis negara-negara tersebut yang pada awalnya mengarah sepadan dan sejajar menjadi bernuansa permusuhan di beragam lini serta menegang pada jalan konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah.¹⁷⁶ Namun, realitasnya revolusi Islam Iran adalah gertakan pada Arab Saudi serta negara-negara Arab pada dasarnya yang menerapkan bentuk pemerintahan kerajaan. Secara diplomatis, kedua negara memiliki bentuk pemerintahan yang saling bersangkutan. Di sisi lain, Iran sebagai cerminan golongan radikal menyangkal kolonialisme, disisi yang lain Arab Saudi serta negara-negara Teluk menjadi cerminan negara kerajaan yang berupaya untuk menegakkan situasi mereka saat ini. Terlebih pada pertengahan 1979 saat Khomeini bermula menegaskan tanggung jawab Iran untuk meluaskan dampaknya melalui cara “ekspor revolusi” di negara-negara Iran (Karsh, 2002). Arab Saudi memandang tipu daya ekspor revolusi yang bernaung di Teheran tersebut sebagai bahaya bagi posisi quo negara mereka.

Para pimpinan Arab Saudi mebenahi pertikaianya bersama Iran dengan terminologi dogmatis serta menuduh bahwa Iran yang menyebabkan tantangan denominasionalisme dengan menyokong milisi Syi'ah yang menetapkan negara yang sebagian besar

¹⁷⁶ Rizki Pratama Putra, Maryam Jamilah, and Poppy Irawan, “Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah,” *Jurnal PIR : Power in International Relations* 4, no. 1 (2020): 76, <https://doi.org/10.22303/pir.4.1.2019.76-100>.

masyarakatnya adalah Sunni seperti Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman (Dorsey, 2016). Runtuhnya pemerintahan Shah Iran yang otokratik menjadikan ruang bagi bentuk pemerintahan baru yang fanatik. Setelah revolusi, Iran menjadi negara republik yang kontra pada bentuk pemerintahan kerajaan absolut seperti yang dilaksanakan Arab Saudi serta berupaya untuk mengekspor nilai-nilai peredarannya ke negara-negara Teluk. Hal itu selanjutnya diduga menjadi sebuah bahaya bagi kestabilan kerajaan Arab Saudi.

Terlebih lagi peranan ulama serta akibat dari kebiasaan dalam negeri Arab Saudi, adanya aspek dari luar juga mempengaruhi tanggapan Arab Saudi terhadap gertakan Iran. Demikian aspek luar tersebut merupakan persekutuan yang dibentuk Arab Saudi dan Amerika Serikat. Persekutuan Arab Saudi – Amerika Serikat bermula saat Perang Dunia II dimana dua negara tersebut bersekongkol dalam memerangi komunisme, menyokong tarif minyak yang seimbang, seimbangnyanya pembuatan dengan penyaluran minyak, serta seimbangnyanya ekonomi pada negara-negara Barat. Khususnya kedua negara bergabung saat memerangi Uni Soviet di Afghanistan dan mendeportasi Irak keluar dari Kuwait pada tahun 1991 (Grayson, 1982). Sampai saat ini, pandangan anti-Amerika dengan negara-negara gabungannya yang dianut Iran diyakini menjadi gertakan oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk menggapai keperluan masing-masing negara.

Iran dan Arab Saudi sendiri akhirnya menetapkan untuk berembuk lalu kembali menjalankan ikatan

diplomasi antara mereka.¹⁷⁷ Saat ini pula pemerintah Arab Saudi kembali memperkenankan masyarakat Iran untuk melaksanakan ibadah haji yang dimana sebelumnya tidak diperkenankan oleh pemerintah Arab Saudi. Masalah yang timbul antara Iran dan Arab Saudi yang sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun telah tuntas. Permasalahan dari Iran dan Arab Saudi dalam jangka waktu sekitar 30 tahun juga mengakibatkan banyak sejarah yang tidak akurat antara keduanya. Sudah dilaksanakannya berulang kali mediasi untuk damainya Iran dan Arab Saudi pun tidak pasti langsung terjalin perdamaian antar keduanya, apabila masih ada gertakan dari satu sama lain dan masih adanya ancaman yang diberikan antara kedua negara tersebut. Dan dengan berlangsungnya pemerintahan yang amat ketat juga tidak membentuk ikatan persatuan menjadi terhubung dengan baik. Yang pada mulanya baik menjadi kurangnya ikatan antara Iran dan Arab Saudi.

Arab Saudi dan Iran lalu membentuk rekonsiliasi dalam meneruskan ikatan politik diantara mereka, serta membuka lagi kedutaan dan tujuan mereka pada masa kurang dari dua bulan. Perjanjian itu berisi penekanan mengenai penghargaan pada kedaulatan negara serta tidak mencampuri urusan internal negara. Selain itu, disepakati pula bahwa menteri luar negeri dari kedua negara tersebut akan berjumpa untuk menjalankan hal tersebut, menata

¹⁷⁷ Safira Nurmalita Sari Hardiansyah Putri, "Perjalanan Arab Saudi Menuju Damai Dengan Iran Sebagai Bentuk Turbulansi Timur Tengah: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis," *JurnalTapis:TeropongAspirasiPolitikIslam* 18, no. 2 (2022): 121–33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/tps.v18i2.14809>.

duta besar mereka untuk pulang, serta mendiskusikan solusi untuk memperbaiki hubungan bilateral.¹⁷⁸

Diskusi antar kedua negara serta perbincangan antara menteri luar negeri Arab Saudi dan Iran terlaksana di Beijing dengan situasi yang baik dan kolaboratif. Pada diskusi tersebut, menteri luar negeri Iran yakni Hossein Amirabdollahian menekankan apabila hubungan legal-formal diantara Arab Saudi dan Iran secara resmi diteruskan pada 6 April 2023. Perdamaian antara kedua negara ini akan merangkai komunikasi bilateral mengenai keperluan dan kebijakan luar negeri mereka. Pada bidang ekonomi, ada banyak keperluan yang saling berkaitan dengan keperluan ekonomi dalam negeri seperti perdagangan juga investasi yang dapat dilakukan tanpa ada kekacauan.

¹⁷⁸ Ahmad Zainal Musofa, “Rekonsiliasi Arab Saudi Dan Iran Dalam Perspektif Konstruktivisme,” *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 75–99, <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.75-99>.

DAFTAR PUSTAKA

- Antuli, Rezky Ramadhan, and Wandi Abbas. "Faktor Penyebab Ketegangan Hubungan Arab Saudi Dan Iran Di Kawasan Timur Tengah." *MANDAR: Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 108–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2944>.
- Bajri, Hilal Kholid, and Akim Akim. "Faktor Domestik Yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al- Nimr." *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 108–24. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.92>.
- Dewi, Trisia Megawati Kusuma. "Hubungan Islam Dan Barat: Benturan Atau Kerjasama." *The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 1 (2024): 13–21. <https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.521>.
- Hamid, Ihsan, and Ozi Setiadi. "Arab Saudi Dan Iran: Kontestasi Ideologi Dan Dampaknya Di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring." *Politea* 4, no. 1 (2021): 129. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10453>.
- Musofa, Ahmad Zainal. "Rekonsiliasi Arab Saudi Dan Iran Dalam Perspektif Konstruktivisme." *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 75–99. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.75-99>.
- Mustofa, Ahmad Zainal, Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora, and Universitas Gadjah Mada. "Kepentingan China Sebagai Aktor Di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi Dan Iran" 14, no. 2 (2023): 253–68. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.253-268>.
- Putra, Rizki Pratama, Maryam Jamilah, and Poppy Irawan. "Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 4, no. 1 (2020): 76.

<https://doi.org/10.22303/pir.4.1.2019.76-100>.

Qodariyah, Anin Lailatul. “Peranan Dan Kepentingan Nasional Indoneia Dalam Penyelesaian Konflik Antara Arab Saudi-Iran Tahun 2016” 8, no. 1 (2023): 54–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v8i1.7949>.

Safira Nuralita Sari Hardiansyah Putri. “Perjalanan Arab Saudi Menuju Damai Dengan Iran Sebagai Bentuk Turbulansi Timur Tengah: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis.”
JurnalTapis:TeropongAspirasiPolitikIslam 18, no. 2 (2022): 121–33.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/tps.v18i2.14809>.

Sari, Lila Agustin Triana, Pipin Nabila, and Depict Pristine Adi. “Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Mediator Konflik Antara Arab Saudi Dengan Iran Tahun 2016.”
CERMIN: Jurnal Penelitian 4, no. 2 (2020): 233.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.768.

Arab Saudi dan Visi 2030

Oleh : Ismi Romadona

Latar belakang Pembentukan Visi 2030

Arab Saudi memiliki latar belakang yang panjang dan kompleks dimulai dari zaman pra-Islam hingga saat ini. Arab Saudi merupakan tempat dimana lahirnya agama Islam dan telah melewati berbagai peradaban yang saling bertaut selama ribuan tahun. Pada abad ke-17, Dinasti Saud muncul di wilayah Hijaz dengan pimpinan Abdul Azizi ibn Saud. Ia berhasil menaklukkan kota Mekkah pada 1924 yang kemudian dibentuklah Kerajaan Arab Saudi pada 1932¹⁷⁹. Dengan ditemukan minyak bumi pada awal abad ke-20, Arab Saudi mengalami percepatan pembangunan ekonomi.

Kekayaan alam yang ada membuat pemerintah dapat melakukan investasi besar-besaran dalam hal infrastruktur dan pengembangan sosialnya. Saat ini, Arab Saudi masih menjalankan rezim monarki absolut yang dipimpin oleh Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS)¹⁸⁰. Di bawah kepemimpinan MBS, pemerintahan Arab Saudi

¹⁷⁹ Abu Haif, 'PERKEMBANGAN ISLAM DI ARAB SAUDI (STUDI SEJARAH ISLAM MODERN)', *Jurnal Rihlah*, III.1 (2015), 12–24.

¹⁸⁰ Adi Warsito and Serli Wulandari, 'Konsep Pemerintahan Arab Saudi Dan Kebijakan Visi 2030', *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 2.3 (2022), 231–41
<<https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14024>>.

melaksanakan rencana transformasi yang bernama Visi 2030¹⁸¹.

Visi 2030 ditetapkan oleh Raja Salman bin Abdul aziz Al Saud pada tahun 2016 sebagai langkah strategis untuk mengubah struktur ekonomi Arab Saudi¹⁸². Dengan tujuan utama meningkatkan ketahanan ekonomi, visi ini berfokus pada pengurangan ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam, khususnya minyak bumi yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Pilar Utama Visi 2030

Visi 2030 Arab Saudi adalah kerangka strategis bagi upaya kerajaan dalam mewujudkan kawasan yang modern, dengan beberapa pilar utama di dalamnya. meliputi masyarakat yang dinamis (A Vibrant Society), pengembangan ekonomi (Thriving Economy) dan negara yang berambisi (An Ambition Nation)¹⁸³

A Vibrant Society atau masyarakat yang dinamis , bahwa Arab Saudi ingin memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, berangkat dari pandangan bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya berasal dari sumber daya alam, melainkan dari sumber daya manusianya.

¹⁸¹ Warsito and Wulandari.

¹⁸² Panji Haryadi, 'Peran Muhammad Bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi', *Jurnal ICMES*, 2.1 (2018), 25–47 <<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.16>>.

¹⁸³ Anna Zakiah Derajat and Toni Kurniawan, 'Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi', *Global and Policy Journal of International Relations*, 9.1 (2021), 39–50 <<https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>>.

Sebagai pusat dunia Arab dan Islam, pemerintah kerajaan juga terdorong untuk memperkuat masyarakat Arab Saudi agar tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadi identitas nasional mereka.¹⁸⁴

Thriving Economy atau pengembangan ekonomi merupakan inti dalam visi 2030 ini. Minyak dan gas adalah sebuah sendi dalam perekonomian Arab Saudi yang mana berarti penting, akan tetapi terkait perihai ini Arab Saudi akan menggarap perluasan perekonomian, dalam jangka panjang dan berkesinambungan, Arab Saudi berupaya mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas dengan cara mendiversifikasi ekonominya. Diversifikasi ini penting untuk meningkatkan investasi dan menciptakan sektor-sektor ekstra yang kontinu¹⁸⁵.

An Ambition National atau ambisi nasional negara, merupakan kepekaan negara yang wajib menindaki dan memaksimalkan semua runtunan dalam birokrasi. Kerajaan yang mempunyai keteerbukaan terkait transparansi dan akuntabilitas yang berkualitas. Keterbukaan serta pertanggungjawaban dianggap penting terhadap pengawasan pemerintahan, khususnya dalam pengawasan terkait proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi Arab Saudi. Fokus utama

¹⁸⁴ Assyiffah Aulia and Ali Noer Zaman, 'Kepentingan Arab Saudi Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023', *HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1.2 (2024), 276–98 <<https://doi.org/10.62180/699ehk90>>.

¹⁸⁵ Aulia and Zaman.

dari visi Arab Saudi 2030 sebenarnya berorientasi pada pengembangan ekonomi negara tersebut.¹⁸⁶

Sektor Ekonomi Non-Minyak dalam Visi 2030

Ketergantungan Arab Saudi yang tinggi terhadap penghasilan minyak bumi pada bidang ekonomi memiliki dampak yang mengakibatkan resiko yang signifikan. Dalam kondisi ini, diversifikasi ekonomi hadir sebagai strategi untuk memberikan jalan keluar menstabilkan perekonomian negara dari ketergantungan pada hasil minyak bumi. Diversifikasi ekonomi hadir dengan melibatkan banyak sektor lain seperti pariwisata, industri manufaktur, teknologi dan lainnya. Hadirnya ide diversifikasi ekonomi ini, Arab Saudi berupaya untuk memperoleh perkembangan ekonomi yang lebih kontinu, mensejahterakan masyarakat dari pengangguran dan menyetabilkan daya tahan perekonomian negara Arab Saudi¹⁸⁷.

Transformasi ini menunjukkan adanya tingkat liberalisasi sosial dalam masyarakat Saudi serta perkembangan industri lain di luar perminyakan untuk mendukung peningkatan pendapatan negara, seperti pertumbuhan sektor hiburan dan pariwisata yang diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi Saudi

¹⁸⁶ Nevrita Sianturi, 'PENGARUH SAUDI VISION 2030 DAN AGENDA FOREIGN DIRECT INVESTMENT(FDI) ARAB SAUDI DI INDONESIA', 4.2, 1–15
<<http://vision2030.gov.sa/en/goals>>.

¹⁸⁷ Luthfiyah Rahma Salsabila and Madian Muhammad Muchlis, 'Analisis Stabilitas Perekonomian Di Arab Saudi Dampak Adanya Diversifikasi Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2.01 (2024).

di luar industri minyak. Seperti halnya kegiatan haji dan umroh yang dilaksanakan setiap tahun, peningkatan izin konser, festival, dan acara olahraga internasional untuk menarik wisatawan serta meningkatkan aktivitas ekonomi. Tak hanya itu Arab Saudi juga membangun pusat teknologi dan inovasi, seperti kota pintar NEOM, yang difokuskan pada teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan, dan robotika. NEOM menjadi elemen penting dalam Visi 2030 Arab Saudi untuk mereformasi perekonomian dan mendorong perkembangan yang berkesinambungan¹⁸⁸.

Transformasi Sosial dalam Visi 2030

Adanaya visi 2030 ini merupakan suatu gebrakan dalam Kerajaan Arab Saudi untuk merubah kawasannya menjadi lebih modern¹⁸⁹. Visi ini merupakan rencana jangka panjang untuk memodernisasikan perekonomian Arab Saudi, seperti salah satu tujuannya adalah diversifikasi ekonomi, politik, pertahanan-keamanan dan juga sosial.

Tujuan lain dari Visi Saudi 2030 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Arab Saudi juga meningkatkan partisipasi perempuan dipasar tenaga kerja, dan untuk meningkatkan citra negara dimata dunia. Salah satu contoh upaya untuk meningkatkan

¹⁸⁸ R Am Kurniawan and S Z A Ghany, 'Efek Digitalisasi Pada Kehidupan Masyarakat Arab Saudi Era Raja Salman', *Multaqa Nasional Bahasa Arab*, 2023, 71–82
<<http://www.munasbauai.com/index.php/mnba/article/download/183/145>>.

¹⁸⁹ Derajat and Kurniawan.

partisipasi angka kerja perempuan di Arab Saudi yaitu termasuk melonggarkan peraturan perjalanan bagi perempuan dan juga mengizinkan perempuan bekerja di sektor publik¹⁹⁰.

Reformasi sosial terkait Saudi Vision 2030 menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan perempuan di Arab Saudi¹⁹¹. Sebagai salah satu contoh kebijakan krusial dalam perwujudan memenuhi hak-hak perempuan di Arab Saudi adalah telah dilakukannya reformasi terhadap sistem perwalian. Langkah besar ini diambil oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengubah pandangan dunia terhadap negaranya, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan pandangan sangat konservatif. Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan baru, Arab Saudi kini lebih mengutamakan kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Kehadiran program Saudi Vision 2030 pun membawa angin segar bagi perempuan di Arab Saudi, yang kini tidak lagi dibatasi oleh berbagai peraturan yang menghambat kebebasan mereka. Langkah ini sejalan dengan tujuan strategis Saudi Vision 2030 yang berfokus pada pemberdayaan perempuan¹⁹².

¹⁹⁰ Aulia and Zaman.

¹⁹¹ Nahdhiyatus Sholihah and others, 'Post-Implementation of the " Saudi Vision 2030 " in the Perspective of Modernism Transformasi Peran Perempuan Saudi Arabia Modern Pasca Visi Saudi Arabia 2030 Dalam Perspektif Modernisme', *Center of Middle Eastern Studies*, 16.2 (2023), 201–10.

¹⁹² Leni Winarni and Aberrant Pratama Yoga Nur Permana, 'Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia', *Journal of Islamic World and*

Visi 2030 Arab Saudi, yang diluncurkan pada tahun 2016, merupakan program ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai sumber pendapatan utama. Di bidang ekonomi, sektor non-minyak seperti pariwisata, hiburan, dan teknologi mulai menunjukkan pertumbuhan. Dari segi sosial, beberapa perubahan penting juga terjadi. Pemerintah telah melonggarkan sejumlah kebijakan yang memungkinkan perempuan memiliki peran lebih besar dalam masyarakat, termasuk mengizinkan mereka untuk bekerja di sektor-sektor baru dan berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi.

Secara keseluruhan, Visi 2030 telah membawa perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan dan ekonomi Arab Saudi. Evaluasi terhadap pencapaian sejauh ini menunjukkan adanya potensi besar untuk transformasi yang lebih luas, meskipun perjalanan menuju tujuan akhir masih panjang dan membutuhkan upaya yang konsisten. Jika dapat diatasi, tantangan ini akan memungkinkan Arab Saudi untuk mencapai visi ambisiusnya sebagai negara yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing di panggung global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Assyiffah, and Ali Noer Zaman, 'Kepentingan Arab Saudi Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023', *HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1.2 (2024), 276–98<<https://doi.org/10.62180/699ehk90>>
- Derajat, Anna Zakiah, and Toni Kurniawan, 'Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi', *Global and Policy Journal of International Relations*, 9.1 (2021), 39–50
<<https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>>
- Haif, Abu, 'PERKEMBANGAN ISLAM DI ARAB SAUDI (STUDI SEJARAH ISLAM MODERN)', *Jurnal Rihlah*, III.1 (2015), 12–24
- Haryadi, Panji, 'Peran Muhammad Bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi', *Jurnal ICMES*, 2.1 (2018), 25–47
<<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.16>>
- Kurniawan, R Am, and S Z A Ghany, 'Efek Digitalisasi Pada Kehidupan Masyarakat Arab Saudi Era Raja Salman', *Multaqa Nasional Bahasa Arab*, 2023, 71–82
<<http://www.munasbauai.com/index.php/mnba/article/download/183/145>>
- Salsabila, Luthfiyah Rahma, and Madian Muhammad Muchlis, 'Analisis Stabilitas Perekonomian Di Arab Saudi Dampak Adanya Diversifikasi Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2.01 (2024)
- Sholihah, Nahdhiyatus, Andi Khaeratul Ummah, Wildana Wargadinata, Haura Jannah, Islam Negeri, and Maulana Malik, 'Post-Implementation of the " Saudi Vision 2030 " in the Perspective of Modernism Transformasi Peran Perempuan Saudi Arabia Modern Pasca Visi Saudi Arabia 2030 Dalam Perspektif Modernisme', *Center of Middle Eastern Studies*, 16.2 (2023), 201–10
- Sianturi, Nevrita, 'PENGARUH SAUDI VISION 2030 DAN AGENDA FOREIGN DIRECT INVESTMENT(FDI) ARAB SAUDI DI INDONESIA', 4.2, 1–15<<http://vision2030.gov.sa/en/goals>>

- Warsito, Adi, and Serli Wulandari, 'Konsep Pemerintahan Arab Saudi Dan Kebijakan Visi 2030', *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 2.3 (2022), 231–41
<<https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14024>>
- Winarni, Leni, and Aberrant Pratama Yoga Nur Permana, 'Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia', *Journal of Islamic World and Politics*, 6.1 (2022), 115–16<<https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/14579>>
- Zulifan, M, 'Reposisi Identitas Sosial Perempuan Saudi Pasca Terbitnya Visi Saudi 2030', *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, 18.2 (2021), 111–22

BIONARASI PENULIS



Muhammad Fu'ad Muhtadi, lahir di Banyumas, 9 Mei 2004. Masih berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN SAIZU Purwokerto. Saat ini aktif bergiat di Kominfo Al Amin, Tpq Nur Hidayah, Karang Taruna Kusuma Yudha XI Desa Banjaranyar. Di samping itu, santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Amin Pabuwaran ini merupakan pengurus pondok pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah As Salafiyah Al Amin Pabuwaran. Ia pernah memenagkan Sayembara Essai yang diadakan oleh DEMA FTIK UIN SAIZU Purwokerto. Karyanya pernah dipublikasikan di Tajdid.id, Jurnal La Tahzan dan Blogspot PPQ Al Amin Pabuaran. Ig: @muhammadfuadmuhtadi. Wa: 085746326938.



Nolla Alifa Ramadhani, mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi PAI. Beralamat di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Selain menjadi mahasiswa kesibukannya juga di pondok pesantren. Menulis menjadi hal yang sudah disukainya dari sekolah menengah pertama. Hobinya Membaca dan travelling. Pernah menulis cerpen, puisi, cerita anak. Karyanya pernah di terbitkan di majalah Banyumas, buku sekolah, dan dibuku kumpulan cerita. Email: nollaalifa@gmail.com. Instagram : [@nollaalifa19](https://www.instagram.com/nollaalifa19)



Syofi Latifah, lahir pada 31 Agustus 2004 di Purbalingga. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi PAI. Beralamat di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Memiliki hobi membaca buku self improvement dan menonton film. Seperti yang tertulis dalam buku karya Ardhi Mohamad bahwa " Tahu kesalahan adalah ilmu. Tahu kesalahan adalah the beginning of a change. A good change." Ini adalah karya pertamanya, semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran bisa menghubungi email atau instagram ini. Email : latifahsofi0@gmail.com. Ig : @syofisl_



Ismi Romadona, terlahir di tengah keluarga sederhana pada 17 Oktober 2003 di Purbalingga. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi PAI. Beralamat di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Senang melakukan hal hal menyenangkan di waktu luangnya. Ini merupakan sebuah karya pertamanya, semoga bermanfaat. Email: ismiromadona17@gmail.com. Instagram : @ismirro



Maryam Agusti, lahir pada 30 Agustus 2003 di Banjarnegara. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Saat ini, sedang menempuh pendidikan S1 di UIN SAIZU Purwokerto jurusan Pendidikan Agama Islam. Memiliki hobi memasak dan menyanyi, seringkali saat membuat masakan sambil bernyanyi dan kamar mandi biasa dijadikan tempat konser ala-ala dengan suara seadanya. Suka dunia fotografi, potret memotret sesuatu momen dalam sebuah acara. Seperti yang dikata Ani Yudhoyono dalam buku 10 Tahun Perjalanan Hati, “ Ada perasaan yang sulit dilukiskan ketika kita mampu menghasilkan foto yang bagus didalam detik kita menekan tombol”. Ig: @maryamagusti_ . WA: 085642921337.



Gian Faiq Al Ahnaf, mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Keseharian penulis disibukkan dengan perkuliahan dan di sela- sela perkuliahan tersebut, penulis mengisi waktunya dengan melakukan beberapa hobinya seperti berenang dan traveling. Disamping itu, penulis juga meluangkan waktunya untuk berbagai kegiatan di pondok yang merupakan tempat tinggalnya. Pembaca dapat menghubungi penulis dengan dm di instagram @g.faiq.al



Latifah Ainun Hardini, merupakan penulis asal Purbalingga yang lahir pada tahun 2004. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis sekarang menetap dan tinggal di Purbalingga. Penulis menempuh pendidikan awalnya di SD N 1 Pengadegan (2016), kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP N 1 Pengadegan (2019), dan SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga (2022). Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan strata 1 Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Moto dari penulis yaitu: "Setetes keringat ibuku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju".



Ade Ayu Sulistiani, lahir di Purbalingga, 10 Desember 2004. Ia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis sekarang menetap dan tinggal di Purbalingga. Penulis menempuh pendidikan awalnya di MI Muhammadiyah 2 Slinga (2016), kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs Muhammadiyah 4 Slinga (2019), dan MAN Purbalingga (2022). Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan strata 1 Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis memiliki hobi menyanyi. Moto dari penulis yaitu: "You can't be good at everything. But that doesn't mean that you can't do anything."



Chimayah Abadiyah, mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saiffuddin Zuhri Purwokerto, Prodi PAI. Beralamat di Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Selain menjadi mahasiswa, juga menjadi santri di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu. Hobinya Membaca dan melukis. Selain hobi tersebut, penulis juga bergiat mengikuti Hadroh di pondok dan pernah menjadi juara di tingkat karesidenan Banyumas. Email: chimayah19@gmail.com. Instagram : @chi_mayah



Farij Ardani, lahir di Kebumen, 20 Desember 2003. Masih berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saat ini aktif bergiat di UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada saat ini, ia aktif menjabat sebagai Koordinator Pengurus Hadroh. Ia sering berkunjung ke berbagai kota di wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi undangan hadroh dan mengikuti beberapa perlombaan. Terbaru ia mengikuti Festival Hadroh Bandingan Se-Jateng DIY di Sirau, Purbalingga dan mendapat juara 2 dalam perlombaan tersebut. Dengan latar belakang yang kaya dalam dunia keorganisasian, ia telah mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi yang kuat. Di UKM PIQSI, ia sangat aktif dan bertanggungjawab dengan jabatannya serta berperan aktif dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kecintaan terhadap ilmu agama, sekaligus membangun semangat literasi di kalangan mahasiswa. Instagram: @ardani.fs74. WhatsApp: 081542407655.

SEJARAH KERAJAAN ARAB SAUDI

Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini terus mengalami kemajuan dalam berbagai hal. Dulunya, Arab Saudi hanya dikenal sebagai negara yang tandus disamping merupakan tempat dimana terdapat kiblat umat muslim. Hingga pada akhirnya Arab Saudi menemukan cadangan minyak yang sangat besar yang dapat membuatnya jauh berkembang ekonominya sampai saat ini.

Dibalik itu semua, Arab Saudi yang kita lihat sekarang ini telah mengalami proses yang panjang untuk mencapai kemajuannya. Arab pernah melakukan perjuangan untuk melepaskan diri dari pengaruh Turki Usmani bersama dengan Wahabi hingga terbentuk dinasti Saud. Dalam buku kecil ini akan dibahas lebih mendalam lagi terkait hal-hal yang sudah disinggung diatas, yakni perjalanan Arab Saudi dari pembentukan kerajaannya hingga visi misi Arab Saudi di 2030 mendatang.



Anggota IKAPI
No. 232/JTE/2021
Jln Raya Tinggarjaya, Jatilawang
Banyumas, Jawa Tengah

Email : satriapublisher@gmail.com
WhatsApp : 0858 7040 9407
Facebook : Satria Publisher
IG : [satriapublisher](https://www.instagram.com/satriapublisher)
Website : www.satriapublisher.com

ISBN 978-623-412-786-7

